

PETAKA DAN PRAKARSA DI SUNGAI SADDANG

*Kumpulan Cerita Adaptasi Perubahan Iklim
di Sepanjang Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan*

Rangkaian cerita dalam buku ini menggambarkan bagaimana krisis global ‘perubahan iklim’ secara nyata membawa ragam persoalan bagi masyarakat desa, juga bagaimana mereka coba mengatasinya lewat beraneka bentuk adaptasi, termasuk yang dinisiasi oleh KAPABEL (Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan) dan KEMITRAAN (*The Partnership for Governance Reform*). Buku ini mengangkat kisah-kisah dari desa yang menjadi sasaran program ‘Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan’ oleh KAPABEL dan KEMITRAAN di lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, Sulawesi Selatan. Satu program yang berupaya mempromosikan aksi adaptasi perubahan iklim berbasis lanskap DAS. Buku ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mendorong aksi-aksi perubahan iklim lokal yang lebih luas dengan terlebih dahulu melihat realitas yang terjadi di desa.



ISBN 978-623-97187-4-9



PETAKA DAN PRAKARSA DI SUNGAI SADDANG

Editor
Mulyani Hasan
Murnady Sirimorok

PETAKA DAN PRAKARSA DI SUNGAI SADDANG

*Kumpulan Cerita Adaptasi Perubahan Iklim
di Sepanjang Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan*

Editor
Mulyani Hasan
Murnady Sirimorok

PETAKA DAN PRAKARSA DI SUNGAI SADDANG

*Kumpulan Cerita Adaptasi Perubahan Iklim
di Sepanjang Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan*

Editor

**Mulyani Hasan
Nurhady Sirimorok**

Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat



2022

PETAKA DAN PRAKARSA: KUMPULAN CERITA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI SEPANJANG ALIRAN DAS SADDANG SULAWESI SELATAN



Buku ini merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan oleh Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL) melalui pendanaan Adaptation Fund dan KEMITRAAN Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia di lanskap DAS Saddang, Sulawesi Selatan.

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) selaku lead KAPABEL bekerjasama dengan Adaptation Fund dan KEMITRAAN Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Editor : Mulyani Hasan
Nurhady Sirimorok

Penulis	: Irfan Saputra	Abdurrahman Abdullah
	: Arung Ezra Hasman	Pettarani Sastranegara
	: Yasmita Yaman	Moh. Gusti Zainal
	: Andi Putri Ramadhani Musa	

Co-Editor	: Suci Maisyarah	Muh. Faisal M
	: Hery Sulistio	Syafriman Ali
	: Arif Nurdiansah	Andi Gunawan Pratama
	: Muchlas Dharmawan Tualle	Dedy
	: Dadang Anugrah	

Cover : TanahindieSign

Penerbit : Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat

Petaka Dan Prakarsa di Sungai Saddang: Kumpulan Cerita Adaptasi Perubahan Iklim di Sepanjang Aliran DAS Saddang, Sulawesi Selatan, Makassar: Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, 2022, 130 hal.

ISBN: 978-623-97187-4-9

Disclaimer : Publikasi buku ini diterbitkan melalui dukungan dana dari Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Seluruh isi dalam publikasi ini ditanggung sepenuhnya dari Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat/KAPABEL dan tidak otomatis mencerminkan pandangan dari Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	iii
<i>Kata Pengantar</i>	iv
 Bab I	
Petaka dan Prakarsa di Sepanjang Aliran Sungai	1
Bab II	
Mengurai Timbunan Masalah di Ladang Kopi	21
Bab III	
Menyingkap Kekuatan Tersembunyi Perempuan Desa	47
Bab IV	
Melestarikan Hutan Butuh Kerja Bersama	69
Bab V	
Setelah Terjatuh di Lubang yang Sama, Berkali-kali.....	81
Bab VI	
Tumpukan Masalah Itu Terus Mengalir dari Hulu	99
Epilog	
Refleksi Program Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Sungai Saddang	119

Kata Pengantar

Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan telah berjalan 20 bulan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 14 desa intervensi yang tersebar di empat kabupaten tersebut. Program ini merupakan program dari dana adaptasi yang pertama berjalan di Indonesia dengan fokus utama adalah pemanfaatan pangan yang ada di sekitar hutan di sepanjang aliran sungai Saddang yang melalui 4 kabupaten. Banyak hal menarik yang bisa ditemukan selama implementasi program baik hambatan atau tantangan maupun cerita baik dari lapangan.

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh *Field Officer* yang hampir menghabiskan waktu 18 bulan di lapangan, menjadi sumber pengetahuan yang luas untuk dibangun menjadi sebuah produk pengetahuan. Banyak pengetahuan yang bisa diambil dari program ini, salah satunya adalah penulisan buku *best practice* yang mengangkat cerita keberhasilan dari 14 desa intervensi. Berbagai cerita dituliskan dengan sudut pandang yang berbeda dituliskan dalam buku ini. Sebagai *Implementing Entity* (IE), Kemitraan berkontribusi untuk penyempurnaan buku ini melalui tulisan singkat yang dirangkum dalam “project story” sebagai bagian dari keberhasilan program ini. Harapan besar tulisan dari

Kemitraan dapat menjadi pengantar buku ini sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk pembaca nantinya.

Mekanisme Pertanian Meningkatkan Produktivitas Petani Hutan

Sejak tahun 2020, sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti: alat pemecah kemiri, alat pengolahan kopi pasca panen dan stup, telah disalurkan secara bertahap kepada petani hutan penerima izin Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Tana Toraja. Alsintan akan digunakan oleh 874 petani hutan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan seluas 2293 Ha.

Dukungan alsintan kepada petani hutan merupakan bagian dari program *Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed* yang dijalankan oleh Kapabel sebagai entitas pelaksana (*Implementing Entity*) dan KEMITRAAN selaku entitas terakreditasi (*Accredited Entity*). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan komunitas di kawasan ekosistem DAS Saddang sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Ketahanan pangan menjadi tantangan penting bagi petani hutan di ekosistem DAS Saddang. Meskipun demikian, mereka tidak dapat memperluas lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Melalui mekanisasi pertanian berbasis dukungan alsintan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen petani hutan. Pada akhirnya petani hutan dapat memenuhi permintaan *off taker* sehingga dapat meningkatkan pendapatan. “Adanya alsintan membuat waktu untuk mengolah produk hasil pertanian hanya memerlukan waktu satu hari dibandingkan sebelumnya tiga hari. Sehingga kami sebagai anggota kelompok perempuan memiliki waktu lebih banyak untuk mengurus keluarga,” ujar Ibu Dorkas anggota KTH Mesa Penawa di Lembang Paku.

Peningkatan pendapatan petani hutan sebesar 10% menjadi modal dasar bagi petani hutan untuk dapat mengakses produk pangan tanpa harus melakukan ekstensifikasi lahan pertanian

tanaman pangan di kawasan hutan DAS Saddang.

Dukungan *Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed* dilakukan melalui pengembangan sejumlah komoditas tanaman hutan non kayu seperti kopi dan kemiri. Program ini memberikan solusi meningkatkan ketahanan pangan dalam peningkatan ketahanan iklim di kawasan ekosistem DAS Saddang.

Menatap Masa Depan Kelompok Perempuan di Kawasan Hulu DAS Saddang

Peningkatan kapasitas telah diberikan kepada kelompok perempuan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan *home industry* di masing-masing desa dampingan. Terdapat hampir 98 anggota perempuan pada bulan Desember 2021 – April 2022 yang telah mengikuti rangkaian pelatihan yang diberikan baik secara langsung atau tidak kepada anggota dengan tujuan untuk mendorong pengelolaan *home industry* yang lebih baik dan terkontrol sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang berubah akibat perubahan iklim.

Pelatihan atau studi banding memberikan dampak perubahan yang bermanfaat terhadap kelompok perempuan di desa dampingan yang mendapatkan intervensi dari program. Perubahan yang dirasakan oleh anggota tidak saja tentang kemampuan produktivitas tetapi mereka mampu mengatur manajemen *home industry* dengan efektif dan efisien.

Pelatihan atau studi banding yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap masing-masing kelompok industri. Ibu Sadaria dari kelompok Industri Sumber Alam di Desa Tungka mengatakan, “Studi banding yang diberikan program kapabel memberikan pengetahuan baru dalam mengelola umbi Sikapa, yang sebelumnya kami menggunakan garam untuk menghilangkan getah racun dan didiamkan selama 3 hari, sekarang kami cukup menggunakan abu kayu bakar dan didiamkan dalam satu hari.” Pengetahuan baru yang diperoleh anggota kelompok dapat mempercepat waktu produksi mereka sehingga produktivitas juga dapat meningkat.

Ibu Citra dari Kelompok Pademaran di Desa Bokin juga merasakan dampak positif yang sama, khususnya saat melakukan *roasting* kopi. Ada ukuran warna yang harus diperhatikan agar kopi yang dihasilkan berkualitas, sebelumnya mereka melakukan penyangraian hingga berwarna hitam dan terasa pahit sehingga kopi yang mereka produksi tidak sesuai dengan keinginan pasar.

Keberhasilan yang dialami oleh anggota kelompok perempuan menjadi dasar kemajuan untuk kelompok ke depannya nanti. Melalui program *Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed* telah memberikan rangkaian pelatihan kepada anggota perempuan dalam pengelolaan *home industry* meningkatkan kapasitas hampir 70% dari 98 orang dibandingkan sebelum adanya program ini. Sehingga ini dapat menjadi jaminan bahwa kelompok akan terus memproduksi aktif ke depan termasuk ketika program selesai dengan penerapan ilmu dan pengetahuan yang telah mereka peroleh.

Tim Penulis

KEMITRAAN (Partnership)

KAPABEL

Petaka dan Prakarsa di Sepanjang Aliran Sungai

Irfan Saputra

Penghidupan kaum tani pedesaan sangat bergantung pada musim. Perubahan cuaca yang ekstrem membuat petani seringkali gagal panen dan menghadapi risiko bencana alam.

Para petani di sepanjang aliran Sungai Saddang, misalnya. Mereka berhadapan dengan berbagai perubahan alam yang mengancam penghidupannya. Kekeringan, banjir, longsor dan kondisi tanah yang buruk membuat mereka harus merancang strategi baru dalam bertani untuk menyesuaikan dengan kondisi alam. Tapi, dalam beberapa kasus, strategi itu justru menimbulkan bencana lain.

Sungai Saddang mengalir empat kabupaten, dari Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang sebagai hulu sungai, berakhir di Pinrang.

Pada periode 2009 sampai dengan 2010 curah hujan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang meningkat rata-rata 50 persen.

Sedangkan di musim kemarau debit sungai menurun sampai 12,74 persen.¹

Kedadaan seperti ini membuat para petani di sepanjang aliran Sungai Saddang menyesuaikan diri dengan berbagai cara. Ada yang meningkatkan produksi komoditas tertentu, sebagian lagi memperluas lahan pertanian, mengubah komoditi, atau beralih ke pekerjaan lain.

Perubahan strategi penghidupan para petani ini menyebabkan dampak lain, yaitu perubahan penggunaan lahan dan deforestasi. Dari 2009 hingga 2021, perubahan penggunaan lahan yang sangat besar terjadi di daerah hulu Sungai Saddang. Usaha tani yang awalnya berupa kebun campuran seperti kopi, kakao, kemiri, ubi jalar, cengkeh, kacang tanah, dan jagung, beralih menjadi pertanian sejenis (monokultur). Jagung, salah satu komoditi yang luasannya meningkat 13 kali lipat menjadi 77.837 hektare.

Sementara itu, pada periode 2000-2010 berkurangnya hutan di hulu aliran Sungai Saddang meningkat seluas 3.413 hektare, sedangkan pada periode 2010-2019 seluas 1.562 hektare. Kejadian ini umumnya disebabkan oleh perambahan hutan untuk perkebunan dan pertanian.²

Pola penyesuaian diri petani ini saling terhubung satu sama lain, apa yang dilakukan oleh petani di daerah hulu Sungai Saddang seperti petani di Desa Randan Batu, Kabupaten Tana Toraja dan Desa Ranga, Kabupaten Enrekang mempengaruhi penghidupan petani yang ada di hilir Sungai Saddang seperti penambak yang ada di Desa Bababinanga dan Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Berikut ini beberapa kisah tentang bagaimana para petani di desa-desa tersebut mengubah strategi bertani, dan dampaknya bagi mereka sendiri dan bagi petani di wilayah lain.

¹ Dokumen Proposal Proyek Adaptation Fund-Kemitraan-KAPABEL dengan Judul "Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed Ecosystem" dapat diakses pada: <https://www.adaptation-fund.org>

² Putri, ALA (2019). Pola Spasial Deforestasi Di Sub Daerah Aliran Sungai Bila dan Sub Daerah Aliran Sungai Saddang Hulu.

Kisah Para Penghuni Lereng

Matahari belum menampakkan dirinya namun sahut-sahutan warga mulai terdengar, lalu lalang orang semakin ramai seiring dengan naiknya matahari. Mereka membawa *sepu*,³ ada pula yang membawa karung yang isinya sayur-sayuran segar hasil kebun mereka. Ada pula seseorang yang sedang sibuk membongkar muatan dari mobil *pick up* hitam. Tumpukan gabus putih satu persatu dipindahkan ke satu lapak di pasar *lembang*,⁴ yang berada di Dusun Putu, Desa Randan Batu, Kabupaten Tana Toraja.

Butuh waktu 40 menit dari ibukota kabupaten untuk mencapainya dengan sepeda motor. Lepas dari jalan poros kecamatan, jalan terus menanjak dan berbatu menuju ke pasar ini. Di sisi kiri, sungai mengalir sepanjang jalan; sedangkan di sisi kanan, lereng akan menemani sepanjang jalan. Walaupun sudah dilakukan pengerasan, sebagian besar telah kembali rusak, bahkan masih ada yang belum tersentuh pengerasan sama sekali.

Pada keramaian pagi itu, terlihat seorang lelaki yang duduk di beranda rumahnya, bersama secangkir kopi. Lelaki paruh baya dengan sarung yang terikat di pinggang mulai menyiapkan peralatan 'tempurnya', sebuah *chainsaw*, alat potong kayu sejenis gergaji mesin. Lelaki itu Hasan Natan, akrab dipanggil Natan.

Sinar matahari belum sempat menerangi keseluruhan dinding rumahnya, Natan telah meninggalkan rumah dengan *chainsaw* yang sudah bersandar di bahu kanan, serta satu jeriken bensin di tangan kirinya.

Beberapa hari sebelumnya ia mendapat pesanan kayu untuk bahan baku rumah, mereka menyebutnya *ramuan*.⁵ Bapak beranak tiga itu lalu bergegas menuju kebun yang tak jauh dari rumahnya. Ditemani oleh dua orang lelaki lainnya, Natan menerka-nerka arah jatuhnya pohon suren, sebelum menumbangkannya.

³ Tas yang terbuat dari jahitan karung bekas.

⁴ *Lembang* adalah penyebutan desa di Tana Toraja dan Toraja Utara.

⁵ Istilah yang warga gunakan untuk menyebutkan bahan-bahan untuk membangun rumah.

Penebangan pohon lumrah terjadi di desa ini untuk kebutuhan ramuan atau lahan garapan. Lahan-lahan terbuka akan dijadikan kebun sayur-sayuran oleh warga.

Lembang Randan Batu berada pada ketinggian 1300-1500 meter di atas permukaan laut. Kondisi tanah berbukit-bukit. Warga desa menanam sayur-sayuran seperti buncis, kol, wortel, kacang merah, dan bawang prei.

Pada awal dekade 2000-an, warga Randan Batu mulai mengenal tanaman hortikultura. Saat itulah mereka mulai banyak membuka lahan, yang nantinya akan berdampak besar bagi kehidupan mereka.

Selain sayur-sayuran, kopi, kakao, dan cengkeh juga mendominasi tutupan lahan di Randan Batu. Kopi telah mereka usahakan sejak 1960-an, semakin berkembang sejak berdirinya PT. Sulotco Jaya Abadi pada tahun 1986. Kakao menyusul sebagai dampak dari tingginya harga pada dekade 1990-an, sedangkan cengkeh baru mulai mereka kenal pada awal dekade 2010-an sampai sekarang.

Karena sedikitnya tanah datar yang bisa ditemui, memaksa mereka menanam di kemiringan, meski mereka sadar terhadap bahaya longsor ketika musim hujan tiba.

“Setiap tahun ada longsor,” ujar Natan.

Pada April 2020, longsor terjadi di Dusun Putu, tempat Natan tinggal. Longsor ini menghanyutkan satu rumah dan merusak dua lainnya. Tanah yang tak mampu lagi menahan beban mengalami longsor. Beberapa rumah warga terpendam, tiga orang meninggal.

Agustina Dudung salah satu korban yang selamat pada peristiwa itu. Saat longsor terjadi, ia sedang berada di rumah tetangganya. untuk menonton televisi.

Hari itu hujan telah turun sejak pagi, hingga pukul sembilan malam hujan tak juga reda. Ia pun memutuskan menginap pada malam itu di rumah tetangganya. Tak berselang lama setelah ia menutup matanya, sekitar pukul sebelas malam, suara gemuruh dari atas gunung terdengar. Dalam sekejap longsor menghantam rumah tempat ia bermalam.



Kejadian longsor di Randan Batu tahun 2020. (sumber: Kompas)

Agustina masih sempat menyelamatkan diri, pada malam gelap gulita itu ia merangkak keluar dari reruntuhan rumah dengan bantuan bambu yang ikut terbawa longsor. Beberapa menit berlalu, cahaya senter yang redup berdatangan ke arahnya. Bantuan warga pun datang.

Agustina mengungsi selama 2 minggu di bangunan sekolah bersama para pengungsi lain. Agustina dan keluarganya bingung harus tinggal di mana, karena hanya lahan itu yang ia punya. Setelah 14 hari berlalu, ia kembali membangun gubuk dari puing-puing yang tersisa, tak jauh dari lokasi longsor, hanya berkisar 30 meter.

Hanya berselang satu tahun, longsor melanda dusun yang sama, di lokasi yang berbeda. Satu orang meninggal. Peristiwa itu terjadi pada November 2021.

Menurut Lele Padang, tetangga korban, hari itu hujan deras disertai angin kencang turun sejak jam sebelas pagi hingga sore. Longsor terjadi sekitar pukul lima sore. Longsor itu menimbun jalan, sawah, serta menumbangkan tiang listrik. Listrik padam, jalan tertutup selama beberapa hari.

“Di sinilah penghidupanku berada,” ujar seorang petani yang tak ingin disebutkan namanya.

Warga Lembang Randan Batu mendiami lereng itu sejak pertengahan dekade 1950 dan awal 1960 an. Mereka berbondong-bondong dari daerah Tana Toraja bagian selatan yang berdekatan dengan Enrekang menuju pegunungan untuk menghindari pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Cerita yang sama terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Karena nyaman, akhirnya mereka menetap, membuka sawah dan ladang.

“Lebih baik mati karena bencana, daripada mati karena kelaparan,” katanya. Sementara warga desa di hilir sungai tengah cemas menghadapi banjir dan longsor akibat pembukaan lahan tersebut.

Ancaman longsor tidak membuat warga meninggalkan rumah. Mereka tidak punya pilihan selain menetap dan berkawan dengan kerentanan.

Menghadapi Perubahan Iklim; Dari Krisis ke Prahara

Huti merasakan peliknya kehidupan sebelum menjadikan jagung sebagai gantungan hidup keluarganya. Baginya, waktu terasa memanjang setiap kali musim menanam padi lewat. Ia harus menanti dalam ketidakpastian, tak tahu sebanyak apa hasil panennya. Ini lumrah bagi petani sawah di Desa Ranga, Kabupaten Enrekang.

Desa ini berjarak delapan kilometer dari ibu kota kabupaten, setengah jam ke arah timur dengan sepeda motor. Ketiga dusunnya⁶ berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara dan saling terhubung dengan jalan beton yang melewati lereng dan punggung bukit. Pada beberapa titik jalan ini berlubang digerus musim.

Bertengger di lereng perbukitan, hanya tersisa sedikit kawasan landai yang bisa warga manfaatkan sebagai perkampungan. Akibatnya, setiap dusun terbentuk oleh beberapa kampung yang terpisah oleh bukit.

Hidup di daerah pegunungan yang berbatasan dengan hutan negara membatasi pilihan penghidupan warga desa. Salah satunya Huti, bapak beranak sembilan yang menggantungkan hidup pada sawah dan kebun kakao.

Antara tahun 2000 sampai 2010 sawah-sawah di Desa Ranga seringkali mengering kala musim kemarau tiba, sungai mulai enggan mengairi sawah. Petani pun mulai kebingungan menentukan waktu tanam padi karena musim hujan datang serampangan. Penyakit-penyakit padi bermunculan, bunga padi memerah, buah yang seharusnya menguning malah memutih, dan kosong. Ini persoalan runyam bagi rumah tangga Huti.

Kakao sempat menjadi tanaman utama di desa ini. Tapi, sejak paruh kedua dekade 1990-an dan sepanjang dekade berikutnya tidak bisa ia harapkan. Kakao mulai sakit-sakitan, kemudian ditinggalkan sejak awal 2010. Huti, yang kini berusia 58 menuturkan bagaimana buah-buah kakaonya menghitam lalu mengering sebelum siap panen.

⁶ Desa Ranga terbagi ke dalam tiga dusun antara lain Dusun Ranga, Dusun Lembang, dan Dusun Tirowali.

Berbagai lembaga sudah mendatangi Desa Ranga untuk membantu mengatasi persoalan kakao petani. Pada tahun 2012 Program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao memperkenalkan berbagai metode peremajaan: sambung pucuk, sambung samping, dan penanaman ulang menggunakan bibit unggul produksi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), Jember, Jawa Timur. Dan tahun 2016 perusahaan coklat asal Belgia, Barry Callebaut⁷ bersama Mondelez International mendampingi dan memfasilitasi warga Desa Rangga melalui Program Cocoa Life. Namun semua usaha ini menemui kegagalan.

Kakao yang semakin tenggelam akhirnya digantikan oleh jagung sebagai primadona baru.

Mencari Pengganti Kakao

Menghadapi krisis kakao para petani di Desa Ranga terus mencari pilihan tanaman budidaya yang setara dengan kakao. Bila belum berhasil menemukannya, mereka akan bersandar pada apa yang bisa mereka jangkau, setidaknya untuk sementara. Ada yang kembali memungut kemiri, mata pencaharian utama pendahulu mereka. Sebagian lainnya merantau, umumnya ke Kalimantan atau Malaysia.

Huti yang mengalami krisis serupa juga terus mencari-cari jalan keluar, dan satu kunjungan ke kota mengubah peruntungannya. Huti salah satu petani di desa ini yang paling awal menghadapi serangan hama dan penyakit kakao. Pada awal 2000-an persoalan ini sudah mengganggu pikirannya. Sejak itu ia mulai mencari peluang lain demi menjaga dapur tetap menyala. Kebun yang sebagian besar ia tanami kakao mengalami nasib yang sama dengan petani lainnya. Pohon-pohon di kebun itu sudah menua dan lelah berbuah.

Di sela-sela mengurus sawah dan kebun kakao yang sekarat, ia sesekali menyambangi satu bengkel di Kota Enrekang,

⁷ Perusahaan pengolah kakao asal Belgia yang memproduksi berbagai produk coklat terkenal seperti Kitkat dan Snickers.

sekadar melepas penat dengan bertegur sapa bersama kawan-kawannya. Dari sanalah Huti mendengar kabar tentang seorang petani jagung di utara Kecamatan Enrekang, yang bisa membeli sepeda motor, lemari, dan kasur mewah dari hasil panennya.

Bermodalkan kabar burung itu, Huti lalu melakukan uji coba di sepetak lahan kosong miliknya. Di lahan kurang lebih sehektar itulah ia memulai, sekaligus menjadi titik awal merebaknya jagung di Desa Ranga.

Berkat uji coba yang penuh dengan keterbatasan itu, ia dan tetangganya berhasil menumbuhkan jagung. Rupanya tanaman ini bisa menyesuaikan diri dengan cuaca yang tak menentu, bertahan di tengah kemarau panjang, dan tetap subur di musim penghujan.

Huti tidak terlepas dari masalah ketika mulai mengusahakan jagung sebagai tanaman utama. Bagi Huti, ongkos untuk memulai penanaman jagung cukup besar. Karena itulah selama beberapa tahun awal ia hanya bisa menanam jagung dalam jumlah terbatas. Ia belum sanggup membeli bibit, pestisida, dan pupuk dalam jumlah besar dengan harga pasar. Namun pelan-pelan ia mengumpulkan modal dari keuntungan panen. Tahun demi tahun luasan kebun jagungnya terus bertambah.

Melihat keberhasilan Huti, petani lain pun terdorong untuk menanam jagung, meski terkendala ongkos produksi yang terlampau tinggi. Titik terang muncul pada tahun 2010 ketika warga Desa Ranga mengusulkan bantuan bibit ke Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang secara berkala. Bantuan ini bisa memangkas sebagian ongkos tanam yang cukup besar. Demi mendapatkan bantuan ini petani harus membentuk kelompok tani untuk menyusun proposal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk mereka ajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.

Akan tetapi, bantuan yang tersedia belum cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh anggota kelompok. Kebutuhan bibit setiap anggota berkisar 10-15 liter, sedangkan yang tersedia dari bantuan hanya 5 liter per anggota.

Huti dan tetangganya kurang pengalaman dalam mengolah lahan. Mereka kewalahan di saat bekerja mulai dari membersihkan lahan, menanam, hingga panen tanpa tenaga kerja tambahan.

Kendala ini malah membangkitkan lagi sistem kerja bersama di Desa Ranga. Setiap petani yang butuh bantuan di lahannya bisa meminta bantuan dari petani lain namun sebelumnya harus membayar iuran kelompok. Uang di kas kelompok digunakan untuk belanja keperluan kelompok, apabila sampai satu bulan tidak ada keperluan apa-apa, uang itu akan dibagi rata ke semua anggota kelompok.

Seiring berjalannya waktu, dari mulut ke mulut pengetahuan baru terus berdatangan berkat jejaring petani jagung yang kian lama semakin menguat. Penyuluh pertanian juga berperan dalam membangun pengetahuan bersama petani di Desa Ranga.

Pada tahun 2022, genap dua dekade jagung menjadi tanaman utama di Desa Ranga. Huti dan petani jagung lainnya telah mahir mengurus jagung. Mereka punya kiat-kiat membersihkan lahan usai panen, dan menghindari hama. Pohon jagung akan dibakar usai panen untuk mengurangi beban kerja sebelum penyemprotan herbisida.

“Buat lubang menggunakan tajak (tongkat kayu berujung runcing) sebelum menanam 1-3 biji jagung ke dalamnya, lalu memupuknya 15-20 hari setelah penanaman,” ujar dia.

Untuk mengatasi hama babi, warga desa memasang kawat beraliran listrik mengelilingi kebun jagung, ketika jagung mulai berbuah. Pada usia dua bulan jagung mulai berisi, monyet dari pegunungan pun mulai sering datang. Saat itu warga akan lebih sering di lahan, mulai dari terbit sampai terbenamnya matahari.

Usai panen, jagung masih harus dikeringkan sebelum dijual. Para petani membangun *kalampang*, bangunan semi permanen terbuat dari bambu atau kayu. Lantainya terbuat dari potongan bambu yang disusun berjejer, atapnya terbuat dari terpal atau spanduk bekas. Atap hanya digunakan ketika hujan dan malam hari.

Setelah kering, mesin *deros* akan memipil bulir jagung dari bonggolnya. Bagi sebagian petani yang belum memiliki mesin, mereka akan mengeluarkan lagi ongkos sewa. Pada musim panen, raungan mesin *deros* ini akan terdengar dari kejauhan.

Lalu, ke mana jagung itu dijual?

Berbekal informasi dari dunia perbengkelan, Huti mendatangkan peternak yang mengambil langsung jagung di Ranga untuk pakan ternak. Pengepul ini akan mengambil jagung terlebih dahulu, setelah laku barulah Huti akan dibayar. Pernah suatu waktu, Huti menyerahkan jagung kurang lebih 10 ton, tapi tak kunjung dibayar.

Ia juga pernah membawa hasil panennya ke JAPFA di perbatasan Kota Pare-Pare, perusahaan agribisnis nasional yang memproduksi pakan serta ternak ayam broiler. Sesampainya di gudang perusahaan, jagung yang ia bawa langsung masuk ke bagian pengendalian mutu perusahaan tersebut. Jagung yang ia bawa ternyata tergolong mutu rendah berdasarkan standar JAPFA, sehingga ditolak oleh perusahaan. Huti terpaksa membawa pulang jagungnya ke peternak ayam di Kabupaten Sidrap.

Kondisi demikian tak mematahkan semangat Huti, ia kembali bergerilya di perkotaan Enrekang mencari pasaran jagung yang tepat. Usahnya membuahkan hasil, ia mendapatkan akses pasar baru. Lokasinya berada di kabupaten tetangga, Sidenreng Rappang yang memang terkenal sebagai pusat peternak ayam.

Huti mengumpulkan sendiri hasil panen yang ada di dusunnya lalu menjualnya ke para peternak ayam itu. Saat ini ia tak hanya menjadi pengepul di dusunnya, Huti bahkan telah mengambil jagung dari dusun lain di Desa Ranga.

Menanam Jagung di Hulu Sungai, Petaka di Hilir

Bagaikan pisau bermata dua, kehadiran jagung bisa memenuhi kebutuhan hidup petani di Desa Ranga, bahkan memberi keuntungan lebih bagi segelintir petani. Namun dalam waktu yang panjang ada bahaya mengintai.

Warga di Desa Ranga mulai merasakan berkurangnya debit air di sumber mata air mereka. Warga membangun penampungan di dekat mata air untuk menghadapi musim kemarau. Sebagian warga menyalakan drum di depan rumah untuk menampung air hujan.

Menurut Rudi, warga Desa Ranga, kelangkaan air di desa itu terjadi sejak kakao menjadi tanaman utama di desa. Kakao tak suka

ada tanaman lain di dekatnya, sehingga tanaman lain yang bisa menahan air ditebang oleh para petani.

“Satu gunung itu semuanya kakao,” kata Rudi sambil mengarahkan telunjuknya ke arah gunung. Itu terjadi awal 1990-an ketika terjadi ledakan kakao.

Setelah itu hamparan jagung menggantikannya. Saat ini luas lahan jagung di Desa Ranga telah mencapai kurang lebih 300 hektare, jumlah yang sangat besar.

Penggunaan pupuk kimia terus menerus untuk padi, kakao dan jagung membuat tanah semakin mengeras, akibatnya kemampuannya dalam menyerap air pun semakin berkurang. Sehingga pada musim penghujan air akan terus ke sungai, tidak lagi menjadi air tanah.

Pemerintah pusat datang membantu melalui Program Air bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas),⁸ pada tahun 2016, program ini sampai di Ranga. Program ini membangun penampungan di beberapa titik di Desa Ranga.

Tak hanya kekeringan, longsor berpotensi terjadi. Sebab kebun jagung warga kebanyakan berada di lahan yang miring.

Desa di Hilir Sungai Bertubi-tubi Kena Imbas

“*Maruttungsi tanggul'e!*,” seorang warga berteriak dalam Bahasa Bugis yang berarti tanggul air sedang runtuh. Suasana hening tiba-tiba pecah, teriakan itu membangunkan warga yang sedang terlelap. Kabar itu dengan cepat menyebar luas ke warga desa yang lain, hingga ke rumah Sutriani pada malam tanggal 7 Desember 2021.

Sutriani, warga Desa Bababinanga, Kabupaten Pinrang akrab dipanggil Utti. Saat itu dengan gawainya ia lalu mengambil gambar lokasi runtuhnya tanggul tersebut lalu ia kirim ke akun *Instagram*

⁸ Program Pamsimas Berlangsung sejak 2008, terbagi atas beberapa tahap; Pamsimas I (2008–2012), Pamsimas II (2013–2016), & Pamsimas III (2017–2021).

@Pinrang_info. Kabar itu langsung viral di media sosial.

Desa Bababinanga berbatasan langsung dengan Selat Makassar sekaligus menjadi pintu gerbang aliran Sungai Saddang. Sungai ini mengangkut air dari tiga kabupaten di hulunya, di Kabupaten Toraja Utara lalu melalui Kabupaten Tana Toraja serta Kabupaten Enrekang.

Tanggul yang dibangun pada tahun 2013 itu, tak mampu lagi menahan beban aliran air yang terus menggerusnya. Sebelumnya, selama empat hari hujan tanpa henti mengguyur Kabupaten Toraja Utara, tak butuh waktu lama air dari hulu ini lalu membuat panik warga Desa Bababinanga.

Empat kepala keluarga yang rumahnya berdekatan dengan tanggul tersebut, terpaksa memilih mengungsi ke rumah kerabatnya untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya warga secara bersama-sama menambalnya dengan peralatan yang seadanya. Karung bekas berisi tanah digunakan warga untuk menahan air sungai.

Awalnya tanggul ini dibangun untuk mencegah banjir terulang kembali. Banjir sebelumnya terjadi pada tahun 2010.

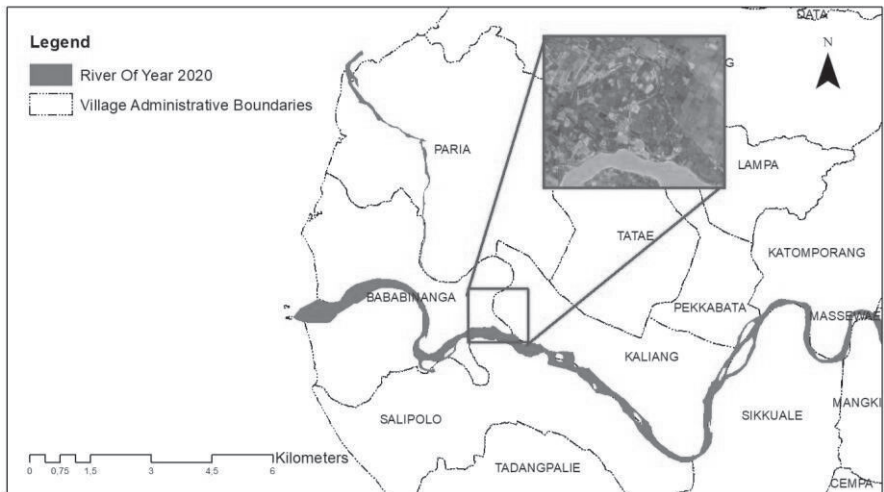
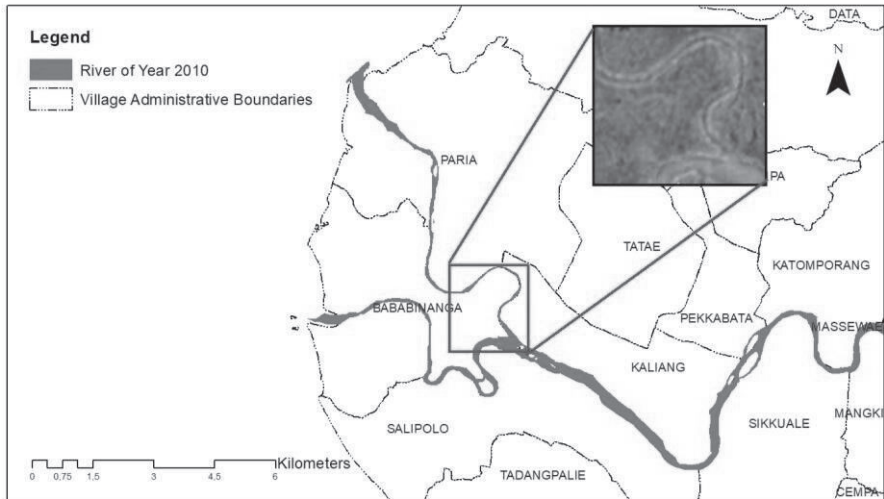
Utti mengisahkan peristiwa banjir pada tahun 2010 itu. Ia harus memindahkan rumah serta meninggalkan kenangan masa kecilnya hanyut terbawa air. Arus air mengikis tanah sepanjang sungai selebar lima meter. Ratusan orang terpaksa pindah, meski memerlukan waktu hampir satu bulan karena jauhnya lokasi yang dituju.

Pintu air di desa itu dibangun oleh pemerintah tahun 2001 untuk keperluan tambak ikan dan udang. Pemerintah Kabupaten Pinrang ingin menjadikan Desa Bababinanga sebagai salah satu pusat penghasil ikan dan udang tambak.

Ternyata pembangunan pintu air mengakibatkan sedimentasi Sungai Saddang. yang mengarah ke Desa Paria, desa yang berbatasan dengan Desa Bababinanga. Endapan di pintu air semakin bertambah. Hanya dalam satu tahun setelah dibangun, pintu air itu jebol.

“Dulu di Bababinanga hanya ada sungai-sungai kecil

PETAKA DAN PRAKARSA DI SUNGAI SADDANG



Perubahan pola aliran sungai tahun dalam 10 tahun (2010-2020)

(Sumber: Data primer diolah KAPABEL, 2021)

sekarang sungainya sudah meluas. Dulu orang bisa menyeberang dengan berjalan kaki, sekarang hanya bisa diseberangi apabila menggunakan sampan,” ujar Najuddin, warga setempat.

Petambak Desa Bababinanga

Landing pernah memiliki lahan tambak seluas 10 hektare di Desa Bababinanga. Tapi sejak 2019 hingga sekarang, luas tambaknya telah menyusut tinggal satu hektare. Banjir bandang yang terjadi pada 2010 telah mengikis lahan tambak warga di muara Sungai Saddang.

Pengikisan tanah terus berlanjut hingga sekarang menggerus tambak-tambak yang tersisa, termasuk tambak milik Landing. Selama tiga puluh tahun menambak, ini adalah kerugian terbesar yang pernah ia alami. Selama tiga tahun ini, Landing tidak menghasilkan panen dari bibit ikan dan udang yang ia usahakan.

“Semua ikan akan hilang terbawa arus dan gagal panen sudah pasti,” kata Landing yang kini berusia 55 tahun.

Pada 2021 Haji Landing, sapaan akrabnya mencoba kembali mengisi tambaknya dengan ikan nila dan udang putih (udang *vannamei*) walau dibayang-bayangi ketakutan akan meluapnya sungai ketika musim hujan tiba. Menurut pengalamannya, debit air sungai paling tinggi terjadi pada Maret dan April.

Para petani tambak lain juga mengalami gagal panen dan kehilangan tambak. Menurut perkiraan Landing, dalam waktu 10 tahun, sekitar 30 hektare lahan tambak warga tambak hilang tergerus air sungai.

“Harapan sangat tipis apabila sungai tidak dikeruk,” ujar dia.

Petambak Desa Paria

Cerita lain tersingkap di Desa Paria, desa terakhir yang dialiri Sungai Saddang. Pada Desember 2021 pematang tambak jebol. Saat itu air laut pasang bersamaan dengan datangnya angin kencang.

Para penambak di Desa Paria tidak punya pelindung

gelombang. Seringkali para petani memungut benih mangrove api-api yang terbawa gelombang ke dekat pematang tambaknya. Seperti yang dilakukan oleh seorang penambak bernama Ambo Jabi. Ia menambak sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya ia menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat ini, Ambo Jabi menanam Ikan bandeng, udang putih (*vannamei*), dan udang hitam (*windu*). Ia menggabungkan ikan bandeng dengan udang di tambaknya. Menurut dia, keberadaan ikan akan membantunya mengaduk permukaan tambak. Cara-cara seperti ini tidak dilakukan oleh petani di Desa Bababinanga. Mereka sibuk menangani banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Mengupayakan Perubahan Melalui Pengorganisasian

Di kawasan hulu, Desa Ranga menghadapi hama dan penyakit tanaman, sedangkan Randan Batu mesti hidup bersama longsor yang terjadi setiap tahun. Sementara itu, di hilir, di Desa Bababinanga dan Paria, orang-orang tengah dipusingkan oleh banjir dan abrasi. Seluruh desa tengah berhadapan dengan beraneka masalah yang merupakan efek turunan dari perubahan iklim.

Sebagai akibat dari perubahan ekologis berskala global, solusi yang akan mereka jalankan pun perlu menimbang pengaruhnya di tempat-tempat lain. Sebagaimana sudah kita lihat, membuka lahan-lahan baru di hulu demi mengejar ketertinggalan produksi bisa menimbulkan air bah di kawasan hilir. Menyelamatkan kampung sendiri bisa mencipta bencana di kampung orang.

Karena itu, deretan jalan keluar yang KAPABEL dan warga desa usahakan mesti menimbang soal-soal yang mungkin muncul di sepanjang aliran sungai.

Mengembalikan Kejayaan Warisan Leluhur

Bagi warga Desa Ranga, dua tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun penting dalam hidup mereka. Mereka tak mesti lagi berkonflik dengan pemerintah karena urusan pengelolaan kebun yang berada dalam kawasan hutan negara. Bahkan beberapa petani dipenjar

karena menerobos wilayah hutan negara.

Sejak tahun 2021 hingga 35 tahun yang akan datang, warga Desa Ranga mendapat izin Hutan Kemasyarakatan melalui kebijakan Perhutanan Sosial,⁹ bisa diperpanjang asalkan tetap menjaga hutan secara berkelanjutan. Upaya warga desa dalam mendapatkan izin pengelolaan hutan berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada November, 2020. Bersama seorang pendamping dari Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL)¹⁰ melalui program hibah internasional untuk adaptasi perubahan iklim-Adaptation Fund bersama Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*). Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara mengelola kebun tanpa melanggar aturan negara. Pada Maret 2021, mereka secara resmi mengajukan permohonan izin yang dikabulkan pada Desember 2021.

Tantangan berikutnya bagi kelompok tani ini, bagaimana mengolah lahan tanpa merusaknya, dan menanam tanaman yang menguntungkan bagi mereka dan hutan.

Sebagai tahap awal mereka membangun rumah bibit, untuk membibitkan komoditas yang dapat menjaga keberlanjutan sumber air dan sumber pangan alternatif ketika terjadi lagi kekeringan yang berkepanjangan.

Sebagai permulaan pendamping menyarankan sukun. Melalui diskusi bersama yang melibatkan kelompok rentan; perempuan, janda, kaum disabilitas, petani penyakap, serta kelompok yang terpinggirkan lainnya. Akhirnya mereka sepakat membibit sukun. Selain bisa mengikat air dan menjaga kekuatan tanah buah sukun juga dapat menjadi sumber pangan bagi warga.

Dari hasil pengamatan pendamping selama bekerja di Desa Ranga, selain sukun, ia menemukan keunggulan kemiri, komoditi warisan leluhur yang masih dikerjakan oleh beberapa petani. Ternyata, sebagian besar anggota kelompok tani setuju

⁹ Permen LHK No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

¹⁰ KAPABEL merupakan gabungan dari empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Yayasan AKU, Kanopi Hijau, Bumi Lestari, dan satu Lembaga Pendidikan dan Penelitian yaitu Puslitbang Natural Heritage, Biodiversity, and Climate Change, Universitas Hasanuddin.

mengembangkan kemiri melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam mengembangkan komoditas ini, termasuk studi banding ke Kalimantan Timur dan mencari pasar untuk menjual kemiri. Usaha mereka berbuah manis. Produksi kemiri pertama mereka mendapatkan akses ekspor ke Hongkong.

Saat ini, KUPS mendapat dukungan berupa modal usaha sebesar Rp25.000.000, dari pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga bulan Mei 2022, mereka telah menjual 3 ton kemiri, dan terus meningkatkan produksinya.

Selain mendatangkan pendapatan baru bagi keluarga petani, pemanfaatan kemiri tidak menimbulkan perubahan tutupan hutan, dan dengan begitu menghindari pelepasan karbon yang merusak ozon, sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan air di desa.

Warga Desa Randan Batu Bersandar pada Kopi

Warga di Desa Randan Batu, juga sudah mengantongi izin pengelolaan hutan, Sebagai tindak lanjut saat ini mereka sedang mengembangkan komoditi kopi yang sudah mereka tanam sejak lama.

Tanaman kopi desa ini sudah tua, buahnya semakin sedikit dengan mutu yang rendah. Bersama KAPABEL, petani kopi ke Bandung, Jawa Barat untuk belajar proses pengolahan kopi. Lalu mereka mengadakan *pulper* pengupas kulit *chery*, *huller* pengupas gabah kopi, mesin *roasting*, *grinder*, dan mesin pengemas serta barang yang dianggap penting untuk peningkatan kualitas produksi petani.

Melalui KUPS Kopi yang dibentuk pada November 2021, mereka lalu menentukan sendiri harga kopi, sekaligus memotong rantai pasar yang sangat panjang dan merugikan mereka.

Mengusahakan kopi bukan hanya meningkatkan pendapatan keluarga Desa Randan Batu. Kopi juga perlu ditanam di bawah pohon-pohon naungan sehingga menjamin bertahannya

keberagaman tutupan lahan dan hutan.

Selain itu, Randan Batu yang rentan terkena longsor kini bisa berharap terhindar dari bencana susulan. Memulihkan tutupan lahan dan hutan bisa melenyapkan ancaman longsor.

Peran Pemuda untuk Perubahan Iklim

Di Desa Bababinanga dan Desa Paria, Kabupaten Pinrang, KAPABEL mengajak pemuda desa untuk aktif dalam kegiatan masyarakat. Melalui beberapa pertemuan mereka sepakat untuk membentuk kelompok yang mereka namai Kelompok Pemuda Perubahan Iklim (KPPI)¹¹ di dua desa tersebut.

Mereka mulai membicarakan isu-isu penting yang ada di desa, seperti abrasi dan banjir yang kerap terjadi di desanya.

Untuk menanggulangi abrasi, mereka membangun rumah bibit mangrove atas dukungan KAPABEL. Mereka studi banding ke Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, sebelum budidaya mangrove.

Tiga bulan kemudian, mangrove siap tanam. Bersama komunitas-komunitas, mereka menanam sejauh 1,2 km di sepanjang pesisir yang melintasi tiga desa yaitu Desa Bababinanga, Desa Paria, dan Desa Salipolo.

Selain pemuda, para perempuan desa terlibat aktif dalam mengusahakan komoditi untuk meningkatkan taraf hidup warga desa. Mereka mengembangkan komoditi rumput laut dan salak. KAPABEL membantu warga membentuk kelompok industri rumahan yang beranggotakan perempuan. Targetnya, membuat berbagai olahan rumput laut dan keripik salak, seperti keripik untuk dikemas dan dijual ke berbagai toko makanan.

¹¹ Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dibentuk di lima desa di Pinrang yaitu Desa Bababinanga, Paria, Salipolo, Katomporang dan Massewae.

Mengurai Timbunan Masalah di Ladang Kopi

Arung Ezra Hasman

PT. Toarco Jaya (selanjutnya disebut ‘perusahaan’) datang ke Tana Toraja pada tahun 1976,¹ untuk menjadi salah satu perusahaan kopi terbesar di Sulawesi Selatan. Mereka membuka kantor, membangun pabrik, dan menanam kopi arabika di lahan seluas 530 ha yang membentang di tiga kecamatan: Rantebua, Nanggala, dan Buntao.

Sebagian besar warga Lembang² Sapan Kua Kua, satu desa di Kecamatan Buntao, waktu itu sudah menanam kopi jenis robusta,

¹ PT. Toarco Jaya membangun pabrik di kawasan Pedamaran, Kelurahan Bokin, Tana Toraja. Saat perusahaan datang tahun 1976, wilayah ini masih bagian dari Kabupaten Tana Toraja—sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Toarco memegang Hak Guna Usaha dalam mengelola kebun dan pabriknya.

² Lembang adalah sebutan resmi desa di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

di samping padi. Berbatasan langsung dengan perusahaan, ratusan warga desa bekerja sebagai buruh perusahaan sejak awal operasinya—bahkan menurut warga desa pernah mencapai ribuan ketika perusahaan baru saja memulai. Sebagian besar mereka adalah pekerja harian yang bertugas membersihkan kebun, memangkas dan memupuk pohon kopi, memetik dan mengolah biji kopi.

Dua dekade kemudian, pada 1990-an, kebun perusahaan mengalami penurunan jumlah panen kopi. Menurut warga Sapan Kua-Kua, pohon-pohon kopi di kebun perusahaan terserang penyakit karat daun dan menyusutkan panen.

Perusahaan mencoba memulihkan kebun dengan mengerahkan sebagian besar tenaga kerja untuk menyemprotkan “obat” atau pestisida, dan karena harus menempuh jarak jauh untuk mendatangkannya, usaha itu akhirnya gagal. Bahkan, perusahaan mengganti sebagian besar jenis kopi arabika mereka dari *Typica* ke *Lini S-795*. Jenis ini mereka datangkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Jember, Jawa Timur.

Untuk menutupi kebutuhan bahan baku yang berkurang, perusahaan kemudian membeli biji kopi dari petani. Mereka memburu biji arabika ke seluruh penjuru Tana Toraja, kecuali di kawasan sekitar kebun perusahaan. Di Sapan Kua Kua waktu itu memang belum banyak petani yang menanam kopi arabika.

Melihat perusahaan terus mencari bahan baku dari luar kebun sendiri, gelombang besar penanaman kopi arabika terjadi di Sapan Kua Kua. Kini, sekitar 200 hektare wilayah desa itu tertutupi kebun kopi rakyat. Seluruhnya berada di dalam kawasan hutan. Kebun-kebun dan rumah-rumah warga hanya berjarak beberapa langkah dari kebun perusahaan yang setiap tahun mengeksport ratusan ton kopi ke luar negeri.

Dan hingga hari ini, dua dasawarsa lebih sejak gelombang penanaman itu, Lembang Sapan Kua Kua yang berpenduduk 2.417 jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai petani, belum pernah sekali pun menjual kopi langsung ke perusahaan. Perusahaan hanya mengambil kopi langsung dari petani di desa-desa dengan ketinggian 1.200 mdpl ke atas. Perusahaan juga memercayai beberapa penyuplai untuk terus menyediakan dan menjual kopi



Tampak perusahaan PT. Toarco Jaya yang berdampingan dengan rumah warga
Lembang Sapan Kua Kua.

kepada mereka. Penyuplai ini membeli dan mengumpulkan kopi dari petani di berbagai daerah Toraja lalu menjualnya ke perusahaan. Begitulah rantai pasok kopi bekerja di Toraja. Rantai pasokan bahan baku perusahaan, lewat satu dan lain cara, telah mengabaikan tetangganya.

Harapan pada Lahan Garapan

Barisan pohon pinus berdampingan dengan cemara membentang di seluas 252 hektare kawasan hutan Lembang Sapan Kua Kua. Di sela-sela pinus dan cemara terselip pohon-pohon kopi yang jauh lebih pendek, nyaris setinggi orang dewasa. Namun lebih banyak kopi tumbuh di lahan-lahan garapan para petani. Kebun-kebun kopi terhampar menutupi bukit dan lembah desa itu, yang berjarak sekitar setengah jam dari Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara.

Di tepi jalan utama Lembang Sapan Kua Kua, seorang pria paruh baya sedang menggendong tas yang terbuat dari karung bekas penampung beras, di dalamnya puluhan bibit kopi yang ia cabut dari kebun perusahaan. Sejak awal 2000-an perusahaan berhenti melarang warga setempat untuk mencabut bibit dari kebun perusahaan.³ Kulit wajahnya mulai keriput, janggutnya tumbuh lebat, topi krem lusuh menutupi rambut panjangnya. Seutas tali yang menggantung parang melingkar di pinggangnya. Namanya Marthen Duma.

Ia lahir di Lembang Misa Ba'bana yang berbatasan Langsung dengan Sapan Kua Kua. Ia menetap di Sapan Kua-Kua setelah mempersunting Elisabeth Sombo, perempuan yang dulu bekerja menyortir biji kopi di perusahaan. Mereka membangun rumah dan menetap di desa itu karena jaraknya lebih dekat dari tempat kerja sang istri.

Elisabeth Sombo bekerja di perusahaan hingga akhir 2000-

³ Perusahaan hanya membatasi jumlah bibit yang diambil dengan cara tidak mengambil bibit secara besar-besaran, misalnya dengan membawa mobil untuk pengangkutanannya.

an. Pekerjaan itu ia geluti bersama puluhan perempuan lainnya. Menyortir biji kopi sepenuhnya menjadi tugas perempuan. Ia dalam sehari bisa menyortir hingga 50 kilogram. Kopi-kopi yang berlubang, pecah, dan berwarna hitam ia pisahkan satu per satu, selama 8 jam kerja, setiap hari kerja. Ia berhenti bekerja karena tak tahan lagi.

“Capek, duduk terus mensortir,” atau “belum lagi mata [sakit], pakai lampu pas di depan wajah. Lampunya warna biru,” begitu ungkapan Elisabeth tentang apa yang ia alami di pabrik.

Marthen lebih dulu berhenti bekerja sebagai pengemudi angkutan umum, sekitar awal 2000-an. Sebagai pengemudi, sehari-harinya ia menempuh puluhan kilometer. Dengan mobil Kijang kotak biru tua keluaran 1980-an, ia mengantar penumpang dari *lembang* ke *lembang*. Setiap pagi ia mengendarai Kijangnya sejauh 20 kilometer, dari Pasar Ledo, pasar terbesar di Kecamatan Buntao, menuju Pasar Bolu di Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara. Ia melakukan satu kali perjalanan pergi-pulang dalam sehari, pagi hari menuju Pasar Bolu dan siang kembali ke Pasar Ledo. Setiap penumpang membayar Rp3.000 sampai Rp5.000, tergantung jarak yang mereka tempuh.

Asam lambung menjangkitinya, memaksa ia berhenti. Menurutnyanya kebiasaan merokok dan meminum *ballo* atau tuak menjadi sebab penyakit yang ia idap. Mobil kijang kotak kesayangannya pun telah laku terjual.

Setelah Marthen dan kemudian Elisabeth meninggalkan pekerjaan masing-masing, mereka hanya menggarap lahan sendiri. Lahan yang mereka garap tak cukup satu hektare.

Lahan itu masih menyisakan beberapa pohon kopi robusta peninggalan penggarap sebelumnya. Menurut Marthen, kopi-kopi robusta itu telah ada sebelum perusahaan datang, dan kini hanya menghasilkan satu kilogram kopi setiap tahun.

Pada akhir 1990-an, tak lama sebelum ia berhenti menjadi supir angkutan umum, Marthen mulai membersihkan lahan yang lama terbengkalai, semak belukar rimbun menutupinya.

Setelah membersihkannya, Marten menanam lebih banyak

pohon kopi. Lahan itu berada di dalam kawasan hutan negara dan penggarap lama, yang memutuskan mencari penghidupan baru di kota telah meninggalkannya begitu saja. Melihat lahan itu terlantar, penggarap lama hanya perlu menjawab, “Iya, garaplah kebun itu,” ketika Marthen bertanya lewat telepon. Dengan begitu, penguasaan kebun itu telah berpindah tangan.

Lahan itu, sebagaimana lahan kopi lain di Sapan Kua Kua, belum memiliki izin. Selama lebih dari dua dekade mereka menggarap lahannya tanpa sertifikat atau izin pemanfaatan lain. Aturan mengatakan bahwa tindakan mereka melanggar hukum, dan mereka tahu menebang pohon itu dilarang oleh pemerintah. Warga pun tahu, menebang pohon turut merugikan mereka. Tahun 2019, Marthen dan warga desa lain yang menggarap lahan di kawasan hutan, mengusulkan izin pemanfaatan namun usulan mereka ditolak Dinas Kehutanan. Menurut petugas Dinas Kehutanan, luasan yang mereka usulkan tidak memenuhi syarat luas lahan yaitu 500 hektare.

Tanpa izin, para petani Sapan Kua Kua melanjutkan penggarapan lahan. Marthen pun menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao, vanili dan jahe. Ia menanam kakao pada akhir masa ia bekerja sebagai pengemudi angkutan umum. Ia juga sempat menanam vanili namun tidak berlangsung lama. Begitupun dengan jahe, cuma bertahan beberapa tahun. Dan sejak 2008, ia juga memelihara lebah di kebun mereka.

Kini, hanya kopi, kakao dan kotak lebah tersebar di kebunnya. Pisang, singkong dan ubi jalar juga mengisi celah di antara tanaman-tanaman utama itu.

Marthen menanam kopi arabika dengan mengambil bibit secara langsung dari kebun perusahaan. Ia mencabut bibit, membawa, kemudian ia menanamnya di kebun. Larangan mengambil kopi di kebun perusahaan ketika itu mulai melonggar.

Sementara kopi robusta ia tanam dengan memindahkan bibit yang telah tumbuh di bawah pohon kopi tua di kebunnya sendiri –kopi peninggalan penggarap sebelumnya telah berusia lebih dari 40 tahun. Bibit kopi ramai di bawah pohon-pohon tua itu. Sebagian ia biarkan, sisanya ia tebas ketika membersihkan kebun.



Lanskap kebun kopi di Lembang Sapan Kua Kua.

Marthen merawat pohon kopi selama lebih dari dua dekade. Ia hanya sesekali menambah jumlah pohon kopinya. Kini, ia sudah kesulitan mengambil bibit kopi di kebun perusahaan. Ia merasa tenaganya mulai berkurang. Ia juga mempertimbangkan tenaga dan biaya jika harus merawat lebih banyak pohon kopi. Namun ia masih mengharapkan bantuan.

“Tidak pernah kami dapat bantuan bibit dari Toarco, [hanya] daerah Pangala selalu dia kasih [bantuan],” tutur Marthen.

Daerah Pangala yang ia maksud adalah daerah bagian utara Kabupaten Toraja Utara yang memiliki ketinggian tanah yang sangat baik untuk pohon kopi arabika. Sementara menurut Marthen, warga Sapan Kua Kua belum pernah mendapatkan bantuan bibit atau alat kopi, walaupun rumah dan lahan mereka berbatasan langsung dengan kebun perusahaan.

“Hanya Sapan, dan Pulu-Pulu,” lanjut Marthen.

Sapan dan Pulu-Pulu adalah dua daerah di Pangala. Warga Sapan Kua Kua maklum, mereka tahu kualitas kopi dari dua desa itu memang lebih baik. Dua desa itu berada di ketinggian antar 1.200-1.500 mdpl, tempat tumbuh yang ideal bagi kopi arabika.

Hari-hari Melelahkan

Marthen giat merawat kebun kopi, meski itu bukan pekerjaan yang mudah. Sehari-hari ia memulai paginya dengan bangun pukul enam, ketika Elisabeth tengah menyeduh kopi. Bagi Marthen, meminum kopi dapat menghangatkan diri di tengah dinginnya suhu pegunungan Toraja.

Setelah menyantap sarapan, Marthen menandakan kopi, memasang sepatu, mengikatkan parang ke pinggang, lalu berangkat ke kebun.

Di kebun, Marthen membersihkan rumput dan memangkas pohon kopi. Dalam sehari ia bisa membersihkan lima sampai sepuluh pohon. Ia bekerja hingga siang hari. Ia ragu menggunakan *racun*, harga yang mahal membuat ia lebih memilih menyisihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menjelang siang, ia pulang untuk makan siang dan kembali ke kebun setelahnya.

Seusai menuntaskan pekerjaan kebun, ia mengumpulkan potongan-potongan kayu untuk menghidupkan tungku di dapurnya, dan memetik sayuran seperti labu siam atau daun singkong dan cabai. Ia juga mengambil daun ubi jalar dan daun talas, makanan utama ternak babi miliknya. Ia punya empat ekor babi yang ia siapkan untuk kebutuhan pesta adat dan tabungan untuk kebutuhan uang tunai dalam jumlah besar.

Daun ubi jalar ia berikan kepada Elisabeth yang kemudian mencincangnya, mencampurnya dengan dedak, dan memasaknya hingga matang. Kurang lebih 45 menit. Setelah matang, ia kemudian membiarkannya beberapa saat, hingga hangat, lalu masukkan ke ember dan mengangkatnya ke depan rumahnya, di sisi jalan utama desa, di mana ia menempatkan kandang babinya. Ia lalu menaburnya di wadah persegi yang terbuat dari kayu dan bambu.

Marthen dan Elisabeth melimpahkan tenaganya, dari April hingga Agustus, untuk memetik dan mengolah buah kopi. Memetik kopi pun bukan pekerjaan enteng. Ia harus memastikan biji demi biji matang sempurna sebelum ia petik. Butuh ketelitian dan kegigihan. Biji muda akan memperburuk cita rasa kopi.

Marthen memetik buah kopi yang berwarna merah gelap dan ia masukkan ke dalam tas dari karung bekas yang menggantung menyilang di tubuhnya. Kopi yang ia kumpulkan kemudian ia bawa pulang. Marthen lalu memberikan kopi hasil petikannya kepada Elisabeth.

Elisabeth kemudian merendam buah kopi pada wadah ember selama satu malam. Setelah merendam, ia mengangkat lalu mencuci buah selama kurang lebih 30 menit kemudian ia biarkan mengering. Setelah cukup kering, ia menumbuk buah-buah kopi dalam wadah yang terbuat dari tanah liat untuk melepas kulit dari buah. Ia menumbuk biji kopi menggunakan batang kayu sepanjang lengan orang dewasa. Untuk menumbuk sekitar lima kilogram kopi, Elisabeth butuh 15-20 menit.

Setelah ditumbuk, biji kopi yang masih terlindungi kulit ari Elisabeth jemur di atas bentangan beberapa karung yang ia satukan



dengan jahitan agar membentuk alas yang lebih luas. Warga desa menyebut karung itu *karoro*. Ia butuh sehari penuh, pagi hingga sore, menjemur biji kopi, bila cahaya matahari sedang terik.

Setelah kering ia masukkan kopi ke dalam karung atau kantong plastik. Ia menjual kopinya dalam bentuk ‘kopi gabah’ atau warga desa menyebutnya *pasmen*, kopi yang telah dijemur namun masih terlindungi kulit ari. Kopi ini mereka jual kepada pedagang yang telah menunggu di Pasar Ledo atau pedagang yang datang langsung ke rumahnya. Marten dan Elisabeth mengerjakan tahapan ini untuk kopi arabika.



Marthen menatap penuh harap
pohon kopi miliknya.

Setelah melewati proses yang panjang dan melelahkan, Marthen menjual kopi arabikanya ke pedagang di Pasar Ledo dengan harga yang seringkali jauh dari harapan. “Murah sekali,” kata Marthen ketika ditanya tentang harga kopi yang ia terima dari pedagang.

Sementara kopi robusta melewati tahapan berbeda. Untuk jenis ini, Marthen memulai dengan memetik buah kopi yang berwarna merah, hanya saja untuk robusta ia seringkali memetik buah kopi yang masih berwarna oranye. Buah kopi yang ia petik kemudian ia masukkan ke dalam tas karung yang sama ia gunakan

ketika memetik buah kopi arabika. Ia lalu membawanya pulang dan menyerahkan kepada Elisabeth. Seluruh proses selanjutnya diambil alih oleh Elisabeth.

Elisabeth menumbuk buah kopi tanpa merendam terlebih dahulu seperti kopi arabika. Buah kopi ia masukkan ke wadah tanah liat, menumbuknya hingga kulit buah mengelupas atau setidaknya terbuka. Untuk 10 kilogram, ia menumbuk selama kurang dari 30 menit. Ia kemudian menebar biji-biji kopi yang telah ia tumbuk di atas karoro. Ia membiarkan biji-biji kopi terpapar sinar matahari langsung selama 4-5 hari jika cuaca sedang terik. Jika cuaca berawan atau hujan, pengeringan butuh sepekan.

Setelah menjemur, kopi yang menyisakan kulit ari kemudian kembali ia tumbuk. Kali ini, ia menumbuk untuk mengeluarkan kulit ari yang tersisa. Kopi yang telah menjadi 'kopi beras' atau *green bean* kemudian ia masukkan ke kantong plastik atau karung. Selanjutnya ia menyimpannya. Marthen dan Elisabeth akan melihat apakah ia akan menjual atau meminum sendiri.

Untuk biji kopi yang akan mereka minum sendiri, Elisabeth akan memanggang kopi yang berbentuk *green bean* menggunakan wadah yang mereka sebut *bibang*. Untuk memanggang lima kilogram kopi, Elisabeth butuh sekitar 30-45 menit hingga biji kopi berwarna hitam pekat, mendekati gosong. Selanjutnya Elisabeth membawa kopi yang telah ia panggang untuk ia giling di rumah Lisu Buntu, satu-satunya warga dusun yang memiliki alat penggiling kopi. Lisu Buntu membeli sendiri alat itu sejak tahun 2018. Untuk menggiling satu kilogram kopi, Elisabeth harus membayar biaya sebesar Rp5.000. Sering kali Lisu buntu menerima pembayaran menggunakan kopi.

Untuk menjual kopi, Marthen dan Elisabeth biasanya menjual langsung ke konsumen dan pedagang. Untuk biji kopi yang akan mereka jual langsung, Marthen membawanya kepada kerabat terdekat yang membutuhkan, atau terkadang mereka mendatangi rumah Marthen untuk membeli kopi. Marthen menjual kopi robusta dalam bentuk "biji beras" atau *green bean*. Ia menjualnya dengan harga Rp35.000 per liter. Pembeli biasanya butuh kopi untuk membawanya ke pesta-pesta adat. Kopi menjadi minuman wajib dalam gelaran pesta adat.



Menumbuk buah kopi.

Pada setiap upacara adat yang digelar di Lembang Sapan Kua Kua, Marthen selalu menyempatkan hadir. Ia membawa kurang lebih dua kilogram kopi bubuk. Namun jika yang menggelar upacara adat adalah orang-orang terdekatnya, semisal tetangga atau keluarga dekat, ia membawa paling sedikit lima kilogram.

Membawa kopi ke pesta adat menjadi bentuk sumbangsih Marthen dalam membantu pihak keluarga yang berduka melalui masa sulit. Kopi yang Marthen bawa akan dianggap “utang” oleh keluarga yang berduka. Jika Marthen berada pada kondisi berduka, pihak keluarga ini juga akan membantu Marthen dengan memberikan barang yang sama atau yang melampauinya.

Dalam satu upacara adat kedukaan atau disebut Rambu Solo, para tamu yang hadir pasti membawa barang-barang seperti kopi, gula, babi, kerbau atau uang tunai untuk mereka berikan kepada



Green bean atau kopi dalam bentuk biji beras.

keluarga yang berduka.

Marthen memelihara kopinya sepanjang tahun. Ia harus menguras tenaga dan biaya yang cukup besar agar bisa menuai panen yang baik. Ia mengerahkan tiga orang tetangganya untuk membersihkan rerumputan di bawah pohon kopi dan membayar upah sebesar Rp450.000. Ia pun menghabiskan jumlah yang sama untuk memangkas tangkai-tangkai pohon kopi, membeli pupuk dan membayar upah tenaga pemupukan sebesar Rp750.000. Dan untuk memetik kopi, ia butuh lima orang yang menerima upah total Rp750.000.

Semua itu untuk membiayai kurang lebih 100 pohon kopi arabika di lahan miliknya, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan panen yang drastis: dari 200-300 kilogram menjadi hanya sekira 100 kilogram dalam setahun.

Ragam Persoalan Petani Kopi

Petani Sapan Kua Kua umumnya menerima saja harga yang ditetapkan buat mereka. Daya tawar mereka sangat lemah di hadapan pedagang karena alur penjualan yang berlaku di desa itu menutup peluang mereka mencari harga yang lebih baik, setidaknya sebelum mereka membangun usaha bersama.

Alur penjualan kopi di Sapan Kua Kua lazimnya bermula dari pedagang desa yang membeli kopi petani. Mereka juga sesekali mendatangi petani untuk membeli kopi. Biasanya pedagang di kecamatan memiliki kerabat dekat yang tinggal di desa. Kerabat inilah yang berperan sebagai pedagang pengumpul di tingkat desa. Pedagang desa membuat kesepakatan dengan para petani untuk mengambil kopi yang akan petani hasilkan. Kesepakatan ini mereka buat sebelum para petani memanen kopi mereka. Mereka memutuskan jumlah panen yang akan dibeli dan memberi modal kepada petani untuk membiayai ongkos dari memelihara hingga memanen kopi. Dengan cara ini, petani terbebas dari keharusan membiayai seluruh ongkos produksi setiap tahun. Pedagang desa juga mengambil langsung kopi petani sehingga petani terbebas dari biaya transportasi angkutan hasil panen.

Kesepakatan yang tampak menguntungkan petani ini punya harganya sendiri. Dengan menjalin kesepakatan ini, pedagang mengikat para petani untuk memastikan jumlah panen yang telah mereka sepakati dan hanya menjual kopi kepada pedagang desa tersebut.

Pedagang desa lalu menjualnya ke pedagang tingkat kabupaten. Pedagang ini biasanya menunggu di Pasar Ledo, mengumpulkan sebanyak mungkin kopi yang dibawa petani yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Rantebua dan Buntao. Mereka kemudian menjual kopi kepada pedagang yang lebih besar di tingkat kabupaten. Pedagang besar ini mengambil kopi dari beberapa kecamatan. Pedagang besar ini, menurut warga desa, bisa menjual kopi langsung ke perusahaan, PT Toarco Jaya. Mereka punya kartu penanda, warga desa menyebutnya “kartu relasi”. Kartu ini diberikan langsung oleh pihak perusahaan sebagai bentuk kesetiaan dan *password* untuk terus menyediakan dan menjual kopi kepada perusahaan.

Para pedagang besar ini perlu melewati beberapa tahapan pengolahan lanjutan agar bisa memenuhi standar kualitas yang perusahaan tetapkan: mulai dari kualitas biji, tingkat kecacatan, kadar air, dan kebersihan biji kopi. Perusahaan juga menjadikan kualitas rasa dan aroma sebagai syarat. Kopi yang perusahaan beli mesti melalui tahapan *cup test* (uji cicip). Agen penjaminan mutu perusahaan mengambil sampel 300 gram dari keseluruhan kopi yang akan dibeli demi menilai kualitas biji, aroma dan rasanya. Mereka melihat keadaan biji, mencium, dan menyeduh untuk mencoba rasa.

Jika 300 gram kopi yang mereka nilai itu memenuhi syarat, perusahaan bersepakat untuk membeli seluruh kopi. Jika sampel gagal mencapai standar, perusahaan mengembalikan seluruh kopi kepada pedagang. Boleh jadi karena risiko inilah pedagang berusaha menekan harga pembelian dari petani.

Namun para pedagang masih punya jalan keluar. Mereka bisa menjual biji kopi yang gagal uji ini ke perusahaan lain, PT. Sulotco Jaya Abadi atau KUB Sane' yang membuka kantor di Tana Toraja dan Toraja Utara. Kedua perusahaan ini kemudian kembali menjual kopi kepada pembeli di Kota Makassar dan Pulau Jawa. Mereka hanya menjual untuk pasar nasional.

Kopi yang lulus syarat akan langsung perusahaan bayarkan dan bawa ke pabrik. Tak jauh dari rumah Marten dan Elisabeth, para buruh telah menunggu untuk menggiling, menjemur, menyortir dan mengemas berton-ton kopi. Biji-biji kopi yang telah melewati jalur dagang yang mengabaikan kopi dari kampung mereka sendiri.

Biji-biji kopi itu mereka masukkan ke dalam karung goni berwarna coklat masing-masing berisi 100 kg. Karung-karung itu lalu diangkut ke Pelabuhan Makassar untuk berlayar ke pasar internasional. Perusahaan mengekspor kopi langsung ke Jepang. Key Coffee Inc. menerima kopi itu di Yokohama, lalu memasarkannya ke pasar-pasar Amerika dan Eropa.

Sebagian besar warga desa yang masih bekerja memelihara kebun perusahaan hingga hari ini mendengar semua informasi tentang taktik dagang itu langsung dari lingkungan perusahaan.

Dalam penentuan harga, seringkali pedagang mematok harga



Kopi dalam bentuk *parchment* (atau “pasmen” dalam istilah lokal) yang dijual oleh petani.

beli kopi petani lebih tinggi dibandingkan harga beli perusahaan. Misalnya PT. Toarco Jaya membeli ‘kopi gabah’ (biji kopi dengan kulit ari) dari pedagang dengan harga Rp12.000 per liter, sementara pedagang membeli dari petani dengan harga Rp13.000 per liter.

Menurut Marthen dan kawan-kawan, para pedagang tidak mengalami kerugian karena meski membeli dengan harga lebih tinggi, para pedagang menerima biji kopi dengan selisih yang cukup besar dibandingkan perusahaan.

Ketika menakar para pedagang mengambil biji-biji kopi petani menggunakan kedua tangannya kemudian ia tuang secara perlahan masuk ke dalam literan yang telah ia sediakan. Wadah yang digunakan pedagang berbentuk tabung yang cukup gemuk. Wadah tersebut berukuran satu liter.

Para pedagang menumpuk gundukan biji kopi di atas literan hingga membumbung tinggi seperti Gunung Latimojong. “Liter bocco” petani setempat menyebutnya. Sesekali pedagang menahan kopi menggunakan lengannya seperti memeluk wadah literan demi memaksimalkan tiap literan yang ia takar. Sementara perusahaan membeli kopi dari pedagang tanpa kelebihan, dengan memapas tepat di bibir literan. Menurut para petani, kecurangan ini dilakukan para pedagang setiap kali membeli kopi dari petani.

Para pedagang juga mencampur biji kopi dari daerah yang berbeda. Sering kali, mereka menyatukan kopi dari Desa Sapan dan Pulu-Pulu dengan biji kopi dari desa-desa lain. Ini mereka lakukan demi memenuhi standar kualitas perusahaan. Kopi-kopi yang mereka ambil dari daerah yang telah terkenal berkualitas baik lalu mereka serahkan untuk dijadikan sampel uji standar kualitas oleh perusahaan.

Selain tekanan harga dari pedagang, para petani kopi Sapan Kua Kua juga harus menghadapi hama babi. Marthen masih ingat, ketika ia baru saja menanam singkong dan ubi jalar, ia mendapati tanah di kebunnya berhamburan. Babi hutan menggali-gali tanah mencari singkong dan talas. Bibit-bibit kopi yang tumbuh di dekat batang singkong patah atau tercabut dari tanah. Babi hutan juga memakan buah kakao yang dekat dengan tanah. Hama ini pun menjadi musuh menakutkan bagi warga *lembang* karena sering kali menyerang manusia bila mereka merasa terancam.

Peningkatan curah hujan juga menjadi kendala lain bagi Marthen dan kawan-kawan harus hadapi. Sejak tahun 2019, tanpa jeda, jumlah buah kopi yang Marthen dan kawan-kawan panen menyusut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu, mereka bisa memanen 200-300 kilogram per tahun. Kini, 100 kilogram saja sangat sulit. Berkurangnya panen kopi menurut mereka terjadi karena hujan yang terus mengguyur desa dan menggugurkan bunga kopi sehingga gagal berkembang menjadi buah. Selain itu, pohon kopi butuh sinar matahari yang cukup untuk membantu peralihan bunga ke buah. Perubahan curah hujan telah berlangsung beberapa tahun terakhir, bahkan pada tahun 2021 hujan turun sepanjang tahun. Dalam satu bulan sepanjang tahun 2021 hujan pasti turun.

Tanaman lain seperti mangga, manggis, durian dan alpukat juga mengalami penurunan hasil panen. Waktu dan tenaga yang mereka curahkan berbuah kenyataan pahit. Curah hujan yang meninggi telah memapas hasil panen mereka.

Mencari Penghasilan Lain

Di tengah seluruh masalah yang mereka hadapi, petani Sapan Kua Kua terus mencari cara lain agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Marthen sendiri, sudah dua dekade mencoba peruntungan dengan berbagai jenis tanaman lain. Kakao, vanili, jahe dan madu bergantian mengisi kebunnya.

Marthen masih memetik buah kakao yang masih layak jual meski jumlahnya sangat sedikit. Pohon-pohon kakao yang ia tanam sejak akhir 1990-an kini kondisinya cukup parah. Serangan penyakit menurunkan hasil panen secara drastis. Buah yang tumbuh membusuk, biji-bijinya hitam dan mengeras. Ia kini sudah berhenti berharap dari kakao, bahkan berencana untuk mengganti seluruh pohon kakaonya dengan kopi.

Sementara vanili, menurutnya, butuh kerja telaten dan harga bibit cukup tinggi—ia membelinya dari kerabat di desa sebelah seharga 5000 rupiah per stek. Waktu itu, ia hanya bisa menanam 50 stek. Ketika masa berbunga, vanili harus segera ia kawinkan. Dengan jarum atau peniti milik istrinya, ia menyentakkan bunga vanili satu per satu. Ini ia lakukan hanya pagi atau sore hari.

“Mulai mi tidak kulihat kalau kasih kawin, biasa salah-salah,” ungkapnya. Kemampuan bertani Marthen memang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Beberapa kali ia mengeluhkan kondisi kesehatannya. Usahnya bersama vanili tidak bertahan lama.

Marthen juga pernah menanam jahe di kebunnya. Tahun pertama hingga tahun ketiga, ia memperoleh hasil yang lumayan baik dari memanen jahe. Menurutny, memelihara dan memanen jahe tak serumit kopi. Hanya memerlukan sedikit tenaga. Namun, harga bibit yang mahal, di samping pupuk, memaksanya berhenti. Harga bibit di pasaran saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram.

Di samping kopi, komoditi lain yang bertahan cukup lama

sebagai penopang pendapatan petani adalah madu. Sejak 2008, Marthen bersama 13 kawan lainnya mulai mengusahakan madu jenis *Apis cerana*. Hingga saat ini, kurang lebih 200 kotak lebah telah ia sebar di kebun perusahaan yang terbengkalai. Pakan lebah melimpah di sana. Ia juga menempatkan beberapa kotak di kebunnya.

Awalnya ia membuat kotak lebah dengan kayu. Namun, kotak lebahnya mudah rusak tertimpa batang pohon dan lapuk oleh hujan. Kini ia membuat kotak dengan semen dan pasir sehingga menjadi lebih kuat dan awet. Warga desa menyebut kotak lebah ini dengan *stup*.

Dalam satu tahun ia bisa mendapatkan sekitar 50-100 liter madu. Madu-madu yang ia hasilkan ia jual dengan harga Rp150.000. Marthen tidak pernah khawatir akan pembeli madu. Ia menjualnya kepada keluarga dekat dan kerabat.

Marthen dan kawan-kawan menjuluki *stup-stupnya* sebagai “ATM” karena mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Kebutuhan seperti pendidikan anak adalah salah satu kebutuhan yang dipenuhi dari penjualan madu.

Marthen dan Elisabeth dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal di luar Toraja. Ketiga anaknya memilih keluar dari Lembang untuk melanjutkan pendidikan. Ketiga anaknya saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana, bahkan ada yang telah mencapai magister. Seluruh anaknya menempuh pendidikan di Kota Makassar dan Jakarta.

Petani Kopi Perlahan Berdaya

Angin segar lain datang pada akhir 2020, ketika KAPABEL bersama Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*) melalui program hibah internasional, *Adaptation Fund*, hadir di tengah warga Lembang Sapan Kua Kua. Mereka melaksanakan program adaptasi perubahan iklim yang menysar petani-petani yang menggantungkan hidup di kawasan hutan.

Bila Sapan Kua Kua menyambut baik program ini, itu karena desa ini sudah merasakan dampak perubahan iklim. Kita tahu



Tampakan *stup* lebah madu warga Lembang Sapan Kua Kua.

bahwa mereka mengalami penyusutan hasil panen seluruh tanaman akibat peningkatan curah hujan.

Laki-laki, perempuan, dan pemuda bersepakat untuk memanfaatkan lahan secara lebih baik. Namun untuk itu mereka lebih dulu harus mengusulkan izin pemanfaatan, dan pengusulan itu harus mereka tempuh secara berkelompok. Hasilnya, dalam waktu relatif singkat, 101 warga Lembang Sapan Kua Kua, seluruhnya petani, bersepakat membentuk kelompok tani hutan.



Madu yang petani hasilkan, menggunakan kemasan botol kaca bekas.

Mereka tergabung dalam Gapoktanhut Sapan Kua Kua. Kelompok itu merupakan gabungan tiga kelompok tani hutan yang berasal dari tiga dusun berbeda: Tambuntana, Limbong dan Tallang. Dari lima dusun di lembang ini, memang hanya tiga yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan.

Pembentukan kelompok mereka awali dengan saling bertemu dalam satu forum rapat kelompok. Pertemuan ini mereka bagi ke dalam tiga lokasi berdasarkan dusun tempat mereka tinggal

sehingga kelompok yang mereka bentuk juga berdasarkan dusun masing-masing. Mereka membentuk tiga Kelompok Tani Hutan (KTH): KTH Tambuntana, KTH Sipaele dan KTH Tombangriri.

Marthen menjadi ketua KTH Tombangriri. Hampir seluruh anggota KTH ini berasal dari Dusun Tallang. Sebagai ketua kelompok, Marthen bertugas untuk mengatur berjalannya kelompok, semisal menentukan jadwal pertemuan kelompok dan memanggil anggota untuk hadir. Ia menentukan jadwal pertemuan dengan membahasnya secara bersama di gereja seusai ibadah. Ia memanggil anggota kelompok melalui ibadah kumpulan yang jemaat laksanakan tiap pekan. Begitu pun dengan pelaksanaan pertemuan kelompok, sangat sering mereka laksanakan setelah ibadah atau minggu sore karena warga biasanya punya waktu luang setelah ibadah.

Pada awal 2021, Marthen dan seratus anggota Gapoktanhut lainnya memutuskan untuk mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan melalui izin Perhutanan Sosial. Mereka saling mengumpulkan informasi lahan-lahan yang mereka garap: batas dan luas lahan, jumlah dan jenis tanaman yang mereka usahakan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pun mereka kumpulkan. Mereka lalu menyusunnya dalam satu proposal, mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Mereka berupaya mendapatkan izin Perhutanan Sosial lewat skema Hutan Kemasyarakatan.

Dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Marthen dan kawan-kawan bukan hanya menjadi penggarap legal bagi lahan-lahan yang sudah mereka garap, mereka pun bisa mendapatkan bantuan peralatan pengolahan dan bibit kopi dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL). Bantuan bibit bisa mereka gunakan untuk menambah jumlah pohon kopi sehingga harapan meningkatkan jumlah panen bisa tercapai. Sementara peralatan pengolahan kopi pasca panen, bisa mereka gunakan untuk menghasilkan produk kopi yang lebih bernilai.

Pemanfaatan kawasan hutan ini mereka harapkan berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah hasil panen kopi. Mereka pun berencana menanam jenis pohon dan tumbuhan seperti

durian, sukun, dan pala. Marthen dan beberapa anggota kelompok lain telah memperoleh pelatihan-pelatihan yang membantu mereka memanfaatkan lahan garapan. Pelatihan menggabungkan tanaman pertanian dan kehutanan pada satu lahan atau *agroforestry*, pembuatan pupuk organik cair dan pestisida alami menjadi modal mereka.

Para petani juga membentuk satu kelompok usaha yang akan mengerjakan kopi petani hingga menjadi produk berkualitas dan bernilai tinggi. Melalui rapat-rapat kelompok yang melibatkan seluruh elemen pembangunan desa, mereka sepakat untuk mengusahakan kopi sebagai komoditi unggulan desa.

Para petani dan pemerintah *lembang* pun bersepakat memberikan tanggung jawab kepada tujuh dari anggota kelompok tani hutan untuk mengurus kelompok usaha ini. Mereka akan bertugas mengerjakan kopi petani menjadi produk siap jual. Para petani dan warga *Lembang* menamai kelompok usaha ini Kopi Paniki.

Mereka sepakat bahwa Kopi Paniki akan membeli kopi dari para petani yang mengusahakan pemeliharaan pohon lebih baik sebelum menjualnya kepada Kopi Paniki. Para anggota Kopi Paniki lalu menggiling, merendam, menjemur dan mengemas kopi. Mereka mengerjakan kopi-kopi petani menjadi produk *green bean*, *roast bean*, dan bubuk.

Para anggota Kopi Paniki juga akan bertanggung jawab memasarkan kopi yang telah mereka kerjakan. Penentuan harga beli dari petani dan harga jual kopi yang telah mereka kerjakan mereka lakukan secara bersama-sama. Dalam penentuan harga mereka mempertimbangkan tenaga dan biaya yang para petani keluarkan untuk menghasilkan tiap kilogram kopi. Mereka menyepakati harga beli kopi petani sebesar Rp7.500 per kilogram untuk arabika dan Rp4.500 per kilogram untuk robusta. Kopi Paniki membeli buah kopi basah petani atau mereka menyebutnya *cherry*. Para petani menganggap harga itu sudah sangat sesuai dengan tenaga dan biaya yang mereka keluarkan.

Kekhawatiran Marthen dan kawan-kawan akan kepastian pasar bagi kopi mereka perlahan terurai oleh kehadiran Kopi Paniki.



Rumah produksi Kopi Paniki yang terletak di Dusun Tallang.

Kembali Beranjak, Ini Belum Usai

Suatu hari Marthen dan Ubaldus tetangganya membersihkan rumput dan memangkas pohon kopi. Pada hari sebelumnya, Marthen telah mengatur janji bersama Ubaldus.

Pada pagi yang telah disepakati, Ubaldus tiba di rumah Marthen yang telah menunggu sepuluh menit. Ubaldus langsung duduk di hadapannya, ditemani kopi hitam yang mengepul di

tengah dinginnya suhu desa. Ubaldus duduk sejenak sembari meminum kopi yang telah Elisabeth siapkan.

Mereka berjalan setelah menandakan kopi, menyusuri jalan setapak. Di pinggang mereka tergantung parang. Berkali-kali Marthen mengayun parangnya menebas semak yang mulai meninggi hingga menyentuh lengan di sisi jalan setapak yang mereka lalui.

Setiba di kebun, rumput demi rumput mereka pangkas mengelilingi kebun, cucuran keringat mengalir tatkala mereka saling melepaskan canda. Sese kali mereka beristirahat dan mengisap satu dua batang kretek.

Mereka duduk beralaskan tanah di bawah naungan pondok kecil yang atapnya terbuat dari seng bekas yang telah berlubang. Pondok berukuran 1.5 x 1.5 meter di sisi utara kebun Marthen memang ia buat untuk tempat melepas penat. Di depan mereka, kemiringan tanah cukup curam namun beberapa pohon kopi masih bisa berbaris di atas terasering. Pohon-pohon itu belum mengeluarkan bunga padahal saat itu pohon kopi sudah memasuki masa berbunga.

Di bawah naungan pondok, mereka menyaksikan betapa perubahan iklim telah melencengkan tabiat alam yang mereka kenali, namun Marthen dan Ubaldus tak berlama-lama di sana. Mereka kembali berdiri dan mengayunkan parang, melanjutkan kerja yang belum usai.

Menyingkap Kekuatan Tersembunyi Perempuan Desa

Yasmita Yaman

Sebuah gapura kecil bertuliskan ‘Selamat Datang’ akan menyambut ketika kita memasuki Desa Pundilemo, Kabupaten Enrekang, di tengah jalan menuju Kabupaten Sidrap. Desa ini bertengger di lereng bukit yang membentang dari tenggara ke barat laut, dikelilingi hutan yang didominasi oleh pohon sukun, jati, aren, kemiri, dan kebun-kebun jagung.

Sehari-hari warga desa mengelola kebun jagung, beternak sapi, membuat gula aren. Di akhir musim kemarau dan awal musim penghujan, beberapa warga pergi mencari madu di hutan. Karena sebagian besar warga bekerja mengelola lahan, mereka menghimpun diri di dalam kelompok tani hutan dan pertanian. Seluruh anggotanya adalah laki-laki. Sementara kelompok perempuan yang rutin berkumpul menjalankan tabungan bersama, mereka menamainya Kelompok Saham Anggrek.¹

Pada setiap Jumat sore, pukul empat. Belasan perempuan anggota Kelompok Saham Anggrek berkumpul di teras sebuah rumah panggung. Selesai bekerja di kebun, mengurus rumah tangga, mereka selalu meluangkan waktu untuk berkumpul.

“*Massaham* kami harapkan bisa memberi dana cadangan untuk ibu-ibu di sini, sebagai tempat meminjam dana darurat, dan diharapkan menjamin kestabilan keuangan jika mengalami hal yang tidak diinginkan kemudian hari,” ucap Sutia, salah seorang anggota Kelompok Saham Anggrek.

Massaham sudah berjalan dua tahun di sana. Setiap anggota mengumpulkan uang sesuai jumlah “saham” yang ia sanggupi setiap pekan ketika mereka berkumpul, dengan satu saham biasanya senilai Rp20.000. Uang disimpan oleh salah satu anggota yang dipercayakan. Mereka menyepakati jangka waktu penabungan, misalnya tiga atau enam bulan, sehingga mereka semua akan menerima uang yang mereka tabung pada akhir kurun tabungan tersebut. Selain itu, sewaktu-waktu, seorang anggota punya kebutuhan mendesak ia bisa meminjam uang tersebut dan dibayar sebelum masa berakhirnya tabungan.

Karena berhimpun setiap pekan, ikatan emosional sesama perempuan sudah terbangun, dan membiasakan mereka membicarakan berbagai macam isu yang secara nyata mereka hadapi. Ikatan dan kebiasaan ini nantinya berperan dalam kerja-kerja bersama di luar kelompok saham.

Perempuan Bukan Petani

Para perempuan yang hadir *massaham* pada satu sore di bulan Juli 2021, duduk melingkar dan saling berbagi cerita sehari-hari, tentang harga cabai yang naik turun, kebun siapa yang akan dibantu menanam atau memanen esok hari, dan banyak lagi.

Gugusan bukit berbatu mengepung perkampungan tempat rumah panggung itu berdiri, bukit membujur dari arah selatan ke

¹ Mereka menyebutnya “*massaham*” dalam pemahaman lokal yaitu menabung (saham adalah tabungan).

utara, orang di sana menyebutnya *Juru*² atau *Buttu Mila*,³ bukit tersebut menjadi pembatas antara Desa Pundilemo dan Desa Palakka di sebelah baratnya. Dari atas bukit itu orang bisa melihat pemandangan rumah-rumah warga, kebun-kebun jagung, sawah, dan hutan belantara.

“*Pammulaimi massaham, sa la sulemiki sa mareppaki di bola* (mari kita mulai bersaham, karena kita sudah mau pulang, ada kesibukan lain di rumah),” kata seseorang di antara mereka, dan yang lain pun berhenti berbicara.

Mereka mengawali pertemuan dengan membicarakan tanaman *pangi* (kluwak)⁴ yang banyak tumbuh di kebun mereka. Mereka merasa perlu memanfaatkan tanaman itu agar bisa menambah pendapatan.

“*Pangi* itu bisa kita buat menjadi *baje pangi*,⁵ nanti kita titip di penjual *deppa tetekan*⁶ di Galonta,⁷ bisa juga saya bawa untuk dijual ke pasar,” ucap Sinta, salah satu anggota berusia tiga puluhan.

Pembicaraan terus berlanjut bicara mengenai produk lain yang bisa mereka buat seperti keripik pisang karena banyak pisang tumbuh di kebun.

Di tengah diskusi tentang aneka produk desa inilah, Awisa, seorang perempuan paruh baya, memotong pembicaraan dengan nada ketus.

“Mengapa baru sekarang kelompok perempuan dilibatkan dalam pengelolaan lahan?”

² *Juru* di dalam bahasa Indonesia artinya memanjang. Warga disana menyebut demikian, karena bentuk bukitnya memanjang menyerupai punggung kerbau.

³ *Buttu Mila* adalah bukit mengkilap. Bukit yang menjadi pembatas antara Desa Pundilemo dan Desa Palakka.

⁴ Kluwak, warga sekitar menyebutnya *pangi*, tumbuhan ini banyak tumbuh liar di hutan-hutan Desa Pundilemo, biasanya warga sekitar memanfaatkannya sebagai bahan penyedap masakan.

⁵ *Baje pangi*, makanan yang terbuat dari kluwak dan gula aren.

⁶ Salah satu makanan khas Enrekang, berbahan dasar beras ketan dan biji wijen.

⁷ Galonta, wilayah yang berada di jalan poros Enrekang-Toraja yang menghadap ke Sungai Saddang.

“Waktu awal-awal pembentukan kelompok perhutanan sosial, perempuan memang sibuk, tapi cuma bikin kopi untuk bapak-bapak yang ikut,” balas Sutia.

Awal pembentukan kelompok yang Awi dan Sutia maksud terjadi pada April 2016, ketika beberapa orang berpakaian batik datang dan mengumpulkan warga. Mereka adalah petugas dari KPH Mata Allo.⁸ Mereka, hari itu juga, meminta KTP dan KK setiap orang yang hadir, lalu mengarahkan untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Mereka menyusun struktur kepengurusan, menentukan lokasi dan luas kawasan yang akan diusulkan sebagai areal kelola kelompok. Semua ini adalah dokumen pengusulan untuk menerima izin HKM.⁹

Kelompok perempuan di Desa Pundilemo waktu itu tidak dilibatkan sama sekali. Mereka kekurangan akses informasi dan tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi. Keterlibatan mereka terbatas pada kerja-kerja domestik seperti membuat kopi, menyiapkan penganan, dan semacamnya. Penyebabnya, warga mendengarnya langsung dari petugas KPH, “Perempuan tidak wajib terlibat di dalam kelompok.”¹⁰

“Waktu itu saya ikut dalam pertemuan di rumah Pak Desa yang diadakan penyuluh kehutanan. Saya bertugas menyiapkan konsumsi,” ucap Nasma.

Kealpaan perempuan dalam pembentukan KTH ini sudah menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar orang tak membicarakannya, menganggapnya sebagai hal yang wajar meskipun bila mereka ditanya akan muncul pendapat-pendapat berbeda.

“Saya tidak pernah mendengar pembentukan kelompok tani hutan di desa ini, padahal saya juga ingin masuk menjadi anggota

⁸ Instansi kehutanan yang bertugas di Enrekang memfasilitasi kelompok ini terbentuk.

⁹ HKM (Hutan Kemasyarakatan); salah satu skema persetujuan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial, ini diatur dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021.

¹⁰ Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kepala dusun setempat.

kelompok agar dapat bantuan pemerintah dan bisa mengelola lahan yang saya miliki. Apalagi saya tidak punya lahan dan hanya bekerja sebagai buruh tani¹¹,” kata Sendeng, perempuan kepala rumah tangga berusia enam puluh–suaminya telah lama meninggal. Saat ditemui siang hari, ia sedang menjemur jagung yang ia peroleh sebagai imbalan dari membantu salah satu warga memanen jagung.

Pembentukan kelompok yang didampingi oleh penyuluh kehutanan di Desa Pundilemo, mensyaratkan agar yang terlibat di dalam KTH hanyalah warga desa yang berstatus ‘petani’. Sementara warga setempat memahami bila berhubungan dengan urusan formal petani berarti laki-laki, dan dengan begitu menjadikan perempuan sebagai kategori yang tersisih keanggotaan kelompok tani.

Sasaran penyuluh KPH dalam merekrut anggota pengelola kawasan hutan melalui KTH hanya tertuju pada petani laki-laki. Membersihkan lahan, memanen dan menanam, usaha tani yang dalam kenyataan juga dikerjakan oleh perempuan hanya mereka dianggap sebagai kerja ‘membantu’ suami atau anggota keluarga lelaki lainnya.

Pekerjaan menggarap lahan, bagi mereka, hanya bisa dilakukan oleh lelaki yang punya kekuatan fisik yang tinggi. Di sisi lain, banyak warga desa juga menganggap perempuan tidak punya kekuatan fisik semacam itu dan kecakapan bertani. Menurut mereka, perempuan adalah sosok yang lemah dan tidak cocok bekerja di bidang usaha tani yang butuh kekuatan fisik.

“Kalau sudah ada laki-laki [jadi anggota kelompok], kita tidak perlu lagi mengikutkan perempuan,” kata seorang warga laki-laki.

Anggapan bahwa bertani hanya bisa dilakoni laki-laki juga tampak dalam persetujuan negara melalui kartu identitas resmi warga negara. Perempuan yang juga terlibat dalam kerja-kerja bertani hanya diakui oleh negara sebagai ‘ibu rumah tangga’ dalam kartu identitas mereka. Anggapan itu menyebar luas, menjadi pandangan umum.

¹¹ Catatan lapangan tanggal 21 Juli 2021.

Eratnya ikatan ‘petani’ dan laki-laki memungkinkan terpinggirnanya perempuan yang juga bekerja dalam bidang usaha tani. Cara berpikir semacam inilah yang menguasai KPH ketika membentuk kelompok dan melengkapi dokumen untuk memperoleh izin pengelolaan HKm. Kecenderungan ini membuat mereka tanpa sengaja membiarkan terjadinya kesenjangan berbasis gender dalam kelompok perhutanan sosial.

Membangun Keterlibatan Perempuan

Ketika program KAPABEL mulai menjalankan program di Desa Pundilemo pada November 2020, pelan-pelan mereka mulai melibatkan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Pada awal program, anggota kelompok yang rutin mengikuti musyawarah hanya laki-laki. Namun beberapa bulan kemudian, sekitar Agustus 2021, perempuan mulai terlibat aktif dalam tiap agenda yang diadakan oleh KAPABEL. Ini dimulai dengan pelibatan perempuan dalam pertemuan rutin.

Menumbuhkan taraf partisipasi perempuan dalam Kelompok Perhutanan Sosial butuh pendekatan berbeda mengingat anggapan yang sudah mapan di banyak tempat. Saya sebagai *Field Officer*¹² KAPABEL atau pendamping lapangan di Desa Pundilemo perlu mengikuti kegiatan mereka secara rutin di kebun, baik perempuan maupun laki-laki. Saya misalnya harus menemani mereka memanen dan menanam jagung, menyadap nira, mengolah lengkuas dan kunyit. Saya pun mengusahakan untuk selalu menghadiri acara-acara ritual semisal kelahiran (aqiqah) dan pernikahan.

Dalam kesempatan-kesempatan bersama inilah ketertarikan mereka pada tujuan saya datang ke Pundilemo bertumbuh. Mereka mulai bertanya kepada saya mengenai kegiatan yang saya lakukan di sana. Cara ini juga bisa membangun rasa saling percaya dan keakraban di antara kami, sekaligus memungkinkan saya mengenali sebanyak mungkin orang dengan lebih baik.

¹² *Field Officer* adalah istilah dari manajemen program KAPABEL untuk pendamping masyarakat yang bertugas di masing-masing desa lokasi pelaksanaan program.

Sejak itu, ketika saya meminta mereka, terutama perempuan, datang dalam pertemuan KTH, mereka akan datang dengan senang hati. Mereka telah mengenal saya dan tujuan kami-KAPABEL datang, juga tahu bahwa kami justru menginginkan keterlibatan mereka, bahwa kami tengah mengusahakan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan. Sesuatu yang diam-diam sudah lama mereka nantikan.

Dari sana mereka kemudian menjadi lebih giat dalam kegiatan-kegiatan kelompok, sejak pembuatan rumah bibit, penyiapan media tanam bibit, dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.

Para perempuan terlibat dengan semangat tinggi, mungkin melihatnya sebagai peluang langka untuk berperan dalam pertanian, di ruang publik, sebagai kelompok. Atau mereka mungkin melihatnya sebagai wadah yang mengakui mereka sebagai petani. Dengan begitu, program KAPABEL mulai menggoyahkan kebiasaan mapan di Pundilemo.

Pelan-pelan perempuan mulai berperan dalam perhutanan sosial di Pundilemo.

Sebelum KAPABEL memulai kiprahnya di Desa Pundilemo, anggota KTH di sana sehari-hari melakukan kegiatan berkebun, dengan komoditi kakao, mulai tahun 1986 sampai penghujung 1990-an, namun perlahan-perlahan produktivitasnya menurun. Serangan hama gagal mereka kendalikan sehingga pada dekade 2000-an, mereka mulai berpindah ke jagung. Waktu itu, menurut tuturan warga setempat, mereka mulai membuka lahan dan menanamnya jagung atas arahan dari pemerintah. Hingga kini, tahun 2022, mereka masih berkebun jagung. Di samping itu, mereka masih terus mengambil madu dan mengolah nira aren.

Namun mereka juga sudah menghadapi masalah-masalah seperti gagal panen dan produktivitas jagung yang menurun, dan hama yang tak terkendali. Deretan masalah ini, dari banyak kajian, boleh jadi merupakan dampak dari perubahan iklim.

Karena itu, cukup beralasan bila warga setempat, perempuan maupun lelaki, menerima baik KAPABEL yang berfokus pada kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mereka berharap

KAPABEL membantu menyelesaikan masalah-masalah yang bagi mereka belum punya jalan keluar.

Kelompok tani hutan Desa Pundilemo kemudian bersepakat untuk berkumpul, mengadakan pertemuan rutin setiap pekan keempat.

Terobosan dan Dilema dalam Pembibitan

Melalui rentetan diskusi antara anggota kelompok, bersama saya, mereka mulai membicarakan jenis bibit yang mereka butuhkan untuk mereka tanam di kebun dan di dalam kawasan hutan yang menjadi wilayah kelola mereka. Mereka mengusulkan antara lain bibit, mahoni, alpukat, dan aren. Secara bersamaan mereka juga membicarakan usulan pembangunan rumah bibit untuk kegiatan tersebut.

Sebelum usulan bantuan bibit ini tersampaikan, pada April 2021, datang bantuan bibit durian dari BPSKL¹³ Wilayah Sulawesi. Kedatangan tiba-tiba ini memaksa mereka mendahulukan rencana pembuatan rumah bibit ketimbang usulan bantuan bibit. Peralihan rencana ini kemudian menandai pertama kali keterlibatan perempuan dalam kegiatan kelompok KTH.

“Besok kita akan adakan pembuatan rumah bibit, sampaikan kepada ibu-ibu yang lain untuk membantu membuat makanan,” ucap Sukarman kepada Sutia, istrinya, di tengah makan malam. Istrinya mengiyakan.

Keesokan harinya, Sutia mengunjungi rumah beberapa anggota kelompok massaham untuk meneruskan informasi tentang pembangunan rumah bibit.

“Bapak-bapak ingin dibuatkan makanan untuk besok,” tutur Sutia.

“Oke, nanti saya bawa [sayur] daun kelor,” Awisa menjawab.

Mereka mulai mengerjakan rumah bibit dengan membangun

¹³ Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

rangka bambu, menutupnya dengan paranet, dan direkatkan dengan paku. Sementara kelompok perempuan membuatkan santapan untuk mereka.

Ketika para perempuan menyusul ke tempat pembuatan rumah bibit untuk membawa makanan, terjadi sesuatu yang mungkin menjadi penanda beralihnya watak keterlibatan perempuan dalam kelompok.

“Pak, bangunannya digeser sedikit ke sini, biar nanti tidak panas kalau kita membibit,” perintah Sinta kepada Dande, suaminya, saat sedang memasang rangka bangunan rumah bibit. Para anggota lelaki pun menggeser rangka rumah bibit, mengikuti saran Sinta.

Setelah merampungkan pembangunan rumah bibit, pada hari berikutnya, kelompok mulai menyiapkan media tanam yang akan digunakan untuk membibitkan pala, sukun, dan porang. Namun sebelumnya mereka perlu menyiapkan media tanam terlebih dahulu dan membakar sekam padi. Mereka mempercayai sekam padi dapat membantu menumbuhkan tanaman. Dalam kegiatan ini perempuan kembali mengambil peran.

Sutia, bergantian dengan Mustari, seorang anggota kelompok tani, mengaduk sekam di atas tungku batu yang disusun membentuk segitiga, dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Ia berhenti mengaduk ketika warna sekam yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi coklat kehitaman. Setelah media tanamnya siap, keesokan harinya, di bawah koordinasi Sutia, mereka mulai memasukkan tanah ke dalam *polybag*.

Perempuan yang awalnya cuma diundang sebagai penyedia makanan berubah menjadi peserta penuh dalam pembangunan rumah bibit dan pembuatan wadah tanam. Ini sebuah terobosan.

Seusai merampungkan rumah bibit dan wadah tanam, pada November 2021, kelompok kembali bertemu untuk membahas rencana pembibitan dalam kerangka program KAPABEL. Para perempuan sangat antusias menyambut kegiatan ini. Mereka mulai punya rencana yang ditambahkan pada kelompok. Mereka merasa sudah punya ‘saham’ dalam kelompok. Mereka mulai berpikir tentang bagaimana memenuhi deretan kebutuhan lewat kelompok, mulai dari menyekolahkan anak, membayar cicilan,

sampai kebutuhan rumah tangga lainnya. Pikiran itu kemudian tertaut dengan hasil panen yang bisa meningkat dari bantuan bibit porang yang akan dipasok oleh program KAPABEL. Sebelumnya, ibu-ibu di Desa Pundilemo sudah mengetahui kabar kalau porang adalah komoditas yang sedang mahal dan laku di pasaran.

Para ibu datang berbondong-bondong ke rumah bibit, mengangkat sekop untuk mencampur tanah dengan pupuk kandang yang sudah disiapkan. Mereka lalu mengambil *polybag* sebanyak yang mereka inginkan, lalu mereka menyebar di sudut-sudut rumah bibit untuk mengisi *polybag* dengan tanah yang sudah mereka siapkan, sambil berbincang.

“Ini tanaman yang mau kita bibitkan, cepat sekali panen, mahal harganya,” teriak Sinta, mengumumkan sesuatu yang belum diketahui sebagian kawannya.

“Iya, itulah kenapa saya mau ambil juga, untuk saya tanam di kebun saya,” balas Nasma.

Kelompok perempuan, bersama anggota laki-laki, mulai membibitkan sukun sebanyak 2.000 bibit, porang 2.700 bibit, dan pala sebanyak 247 bibit. Bibit ini kemudian dibagikan kepada para anggota KTH. Di titik ini, para perempuan sudah terlibat dalam kegiatan KTH namun belum secara resmi menjadi anggota.

Para istri anggota KTH itu mungkin sudah mulai terlibat, sedikit mengendalikan kegiatan, dan menerima manfaat, namun belum bisa mengakses langsung bantuan program tanpa perantara suami mereka. Ini karena KTH di Pundilemo terbentuk sebelum KAPABEL mengupayakan pelibatan perempuan secara resmi sebagai anggota kelompok.

Dampak lain dari situasi seperti ini ialah kesulitan melebarkan akses kepada perempuan-perempuan yang bukan keluarga anggota KTH—yang semuanya laki-laki.

Situasi ini menghadirkan dilema bagi KTH dan KAPABEL. Di satu sisi mereka berusaha membangun organisasi yang inklusif, namun di sisi lain mereka dibatasi oleh sejarah pembentukan KTH. Hasida dan Naing, misalnya, dua perempuan desa yang juga menginginkan bibit porang dan pala namun tidak bisa

mengaksesnya karena mereka bukan anggota keluarga KTH. Karena pembagian bibit memprioritaskan anggota, yang memang terlibat sejak penyiapannya, mereka hanya bisa menunggu bila ada yang tersisa buat mereka.

Seluruh bibit tandas dibawa pulang para anggota.

Dari Gula Aren Cair hingga Kesadaran Kritis

Setelah mengerjakan pembibitan, KTH Pundilemo lantas beralih ke agenda kelompok selanjutnya, pengolahan komoditi aren. Cukup banyak warga Pundilemo mengolah nira aren menjadi gula batok, dan pohon aren yang mereka sadap sebagian tumbuh di dalam kawasan hutan. Pembuatan aren bukan pekerjaan asing bagi perempuan Pundilemo. Beberapa perempuan sehari-hari membantu suami membuat gula aren, mereka bertugas memasak aren yang telah disadap oleh suami. Perempuan di sana juga banyak yang memanen rempah-rempah yang tumbuh liar di hutan. Ini cara lazim mereka memanfaatkan hutan, sebagian dari mereka menganggap menebang pohon dapat mempengaruhi air bersih yang tersedia di gunung.

Dengan begitu, memperbaiki pengolahan aren bisa sekaligus menambah pendapatan dan pengelolaan kawasan hutan. Namun upaya ini ternyata bisa menjangkau titik capaian yang lebih jauh.

Pada Agustus 2021, ketua KTH, mengunjungi rumah beberapa anggota kelompok, menyampaikan rencana musyawarah rutin guna membahas komoditi aren. Sebelumnya, pada Juni sampai Juli 2021, para pendamping lapangan KAPABEL di Enrekang telah mengerjakan riset pasar untuk komoditas-komoditas unggulan di desa-desa dampingan program. Riset ini salah satunya menemukan bahwa gula aren dalam bentuk cair punya cukup banyak peminat di pasar, terutama kafe-kafe di Kota Enrekang dan sekitarnya, juga toko-toko kelontong yang menjual bahan kue (menurut mereka gula cair lebih mudah untuk digunakan mencampur penganan manis seperti cendol dan kue-kue tradisional).

Mereka pun telah melakukan serangkaian eksperimen untuk membandingkan kualitas gula cair yang diolah langsung dari nira aren dengan yang diolah dari gula batok.

Hasilnya, mengolah gula cair dari gula batok menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik.

KAPABEL lewat pendamping lapangannya kemudian menyajikan hasil riset ini kepada kelompok. Dari diskusi itulah kelompok bersepakat untuk mengolah nira aren menjadi gula cair, ketimbang menjadi gula batok sebagaimana praktik lazim selama ini di Pundilemo.

Kesepakatan ini kembali membuka jalan bagi keterlibatan perempuan, kali ini secara lebih intensif.

“Bagus juga mungkin kalau diikuti perempuan ke dalam pembahasan ini,” kata Disman, seorang anggota dalam salah satu pertemuan awal membahas pengembangan komoditas di Pundilemo.

Anggota lain langsung sepakat. Mereka berpikir bahwa menjalankan proses pengolahan aren batok menjadi gula cair akan banyak membutuhkan perempuan—pengolahan nira menjadi gula batok yang selama ini mereka kerjakan lebih banyak melibatkan laki-laki.

Dalam pertemuan selanjutnya mereka mulai mengikuti perempuan.

Sutia secara langsung berkeliling ke rumah anggota Kelompok Saham perempuan, mengundang mereka, setelah mendengar keinginan anggota KTH untuk menghadirkan perempuan. Namun upaya ini tidak selalu berjalan mulus.

“Untuk apa lagi kami dipanggil?” kata seorang ibu dengan wajah sedikit menekuk.

Ungkapan ini menyiratkan keluhan atas pola hubungan timpang yang sudah berlangsung lama. Dalam bayangan sang ibu, perempuan hanya akan diundang untuk membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk kaum lelaki. Sesuatu yang akan menambah kepenatan setelah seharian mengurus rumah dan kebun. Ini bukan keluhan sepele.

Perempuan Pundilemo selalu sibuk mengurus anak, menyiapkan makan, mengurus kebun, dan membersihkan rumah.

Akibatnya, dalam kegiatan kelompok perempuan selalu hanya dianggap pantas terlibat dalam pekerjaan domestik-menyiapkan konsumsi. Dan itu dianggap sebagai peran yang benar. Selain itu, pikir sebagian perempuan, mereka tidak terdaftar sebagai anggota kelompok sehingga tidak bisa berharap menerima manfaat langsung dari kegiatan KTH.

Mereka baru bersedia datang ke rapat-rapat selanjutnya karena Sutia menjelaskan kepada mereka bahwa program ini bakal memberikan bantuan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka.

“Jadi bagaimana ini aren?” tanya Sukarman memulai pertemuan.

Beberapa peserta perempuan yang hadir sontak kaget karena mereka mengira akan bicara usaha keripik, entah itu dari sukun, pisang atau lainnya. Rupanya mereka luput menerima keterangan lengkap mengenai pertemuan itu. Tetapi pertemuan berlanjut dengan peserta laki-laki berusaha menjelaskan bahwa mereka sudah sepakat untuk mengusahakan aren, mengingat di sana tumbuh banyak sekali aren dan sayang apabila tidak dimanfaatkan. Selain itu, menurut mereka, bahan baku keripik tidak selalu tersedia karena sifatnya yang musiman.

Setelah mendengar alasan itu, para perempuan yang hadir sedikit kecewa, tapi itu tidak menyurutkan keinginan mereka untuk turut serta. Alasan itu kemudian pelan-pelan mereka terima mengingat banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus mereka penuhi. Mereka memilih untuk mengerjakan dan mengembangkan komoditi yang telah disepakati.

Situasi yang keras juga turut mendorong mereka untuk terus melibatkan diri. Kita bisa bayangkan, misalnya, perempuan seperti Sinta yang sudah bersiap ke kebun saat matahari terbit untuk mengambil hasil hutan seperti pangi, kunyit, lengkuas, untuk dijual keesokan harinya di pasar. Semenjak ibu mertuanya meninggal, ia mulai menggantikan pekerjaannya menjual rempah-rempah masakan di pasar.

Mengendarai sepeda motor, ia melewati jalanan berkerikil. “Hati-hati bawa motor, orang biasa terpeleset,” ucap Sinta. Setiba

di kebun ia bergegas menggali lengkuas, mengambil umbi yang sudah tua berwarna putih kekuningan.

“Saat musim lebaran, permintaan lengkuas dan kunyit sangat tinggi,” ucap Sinta.

Setelah menggali lengkuas, ia lalu membawanya pulang ke rumah untuk ia olah menjadi rempah masakan. Ia mencuci, membelahnya menjadi potongan-potongan kecil, menghaluskannya di lesung, dan mengukusnya. Ia pun melakukan pengolahan nyaris serupa untuk kunyit. Ia menghaluskannya di pabrik setelah mencuci, mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil, dan menjemurnya. Kedua bumbu masakan ini kemudian ia jual.

Dan perempuan Pundilemo betul-betul terlibat penuh pengolahan gula aren cair. Banyak proses mereka lalui ketika mengolahnya, termasuk mencari komposisi yang pas dan aren yang tepat dijadikan sebagai bahan baku. Beberapa dari mereka awalnya ragu dengan pengelolaan aren, khawatir mengenai pasarnya, dan lain-lain. Belum lagi tantangan dari dalam. Salah satu anggota kelompok usaha perhutanan sosial yang sehari-harinya mengelola aren merasa tersaingi akan kehadiran kelompok. Menanggapi masalah tersebut, mereka memberi tanggung jawab kepada anggota itu untuk mencari bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk.

Namun kendala-kendala itu tidak menjadikan semangat para anggota surut. Mereka terus mencari informasi yang mereka butuhkan untuk memastikan kelancaran usaha ke depan. Harapan mereka sangat besar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui usaha bersama, beberapa dari mereka berharap dapat membantu perekonomian keluarga.

Di tengah ketidakpastian hasil-hasil usaha tani yang mereka kerjakan sebelumnya, seperti jagung, coklat. Bukan lagi menjadi kendala yang berarti mereka, mereka kini punya pilihan selain menunggu hasil-hasil kebun yang tidak menentu.

Bergantung pada komoditi yang dikerjakan sebelumnya, misalnya jagung, bukan lagi menjadi pilihan bagi mereka, mereka punya pilihan lain selain bergantung pada ketidakpastian hasil-

hasil hutan yang tidak menentu.

Keterlibatan perempuan ini bukan hanya menghasilkan pendapatan baru, mempelajari pengetahuan dan teknologi pembuatan gula cair, dan menguatkan pengakuan terhadap keanggotaan perempuan dalam kelompok. Keterlibatan mereka juga menumbuhkan daya kritis perempuan. Mereka mulai bisa memberi tanggapan kritis terhadap diskriminasi yang mereka alami.

Di salah satu pertemuan rutin kelompok, di tengah perbincangan, Sinta berbisik kepada peserta rapat lainnya.

“Mungkin dulu kalau kita dilibatkan dalam diskusi mengenai apa yang akan dikembangkan kelompok ini, kita bisa memberikan sedikit masukan, kita bisa mengerjakan apa yang kita sukai, yang kita prioritaskan.”

Keluhan Sutia terhadap bantuan alat yang kelompok terima dari badan pemerintah menunjukkan daya kritis serupa. Menurutnya, alat-alat yang diberikan untuk menunjang produksi gula aren mereka, “tidak sesuai”. Wajan yang mereka terima, misalnya, terlalu berat bila dibandingkan dengan yang biasa mereka gunakan. Mereka paham betul, kesenjangan semacam ini tentu terjadi karena perempuan tidak dilibatkan dalam membahas pengadaan alat.

Satu Kebetulan di Desa Paku

Cerita dari Desa Paku, Kabupaten Tana Toraja, menampilkan gambaran yang sedikit berbeda dari Desa Pundilemo. Program perhutanan sosial di sana, bahkan sejak awal, meski lewat sejumlah soal, lebih banyak melibatkan perempuan.

Sebagaimana banyak perempuan desa di berbagai penjuru dunia, sebagian besar perempuan Pundilemo juga digantungi beban ganda. Mereka setiap pagi berangkat ke kebun setelah mempersiapkan keperluan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan memasak. Di kebun, perempuan menanam, memanen buah, sayuran untuk pakan ternak, dan mengumpulkan kayu bakar dari limbah ranting kayu.

Mariana Liku, misalnya, ibu dua anak berusia 37 tahun. Ia bekerja sejak pagi buta sampai malam harus untuk seluruh keperluan rumah tangga, dari menyiapkan sarapan, mencuci piring dan pakaian, sampai memberi makan ternak. Ia pun harus ke kebun mengumpulkan keperluan makanan ternak esok harinya. Saat petang tiba, ia harus kembali ke dapur menyiapkan makan malam untuk keluarganya dan membersihkan piring sendirian. Baru setelah itulah, ia bisa bercengkrama dengan keluarganya.

Ia juga mengelola kebun kopi di Desa Paku, biasanya ditanam di dalam kawasan hutan yang berjarak lumayan jauh dari permukiman. Pengelolaan lahan kopi yang lazimnya dimulai dengan pembukaan lahan dikerjakan oleh suaminya. Pekerjaan selanjutnya, pembuatan lubang untuk penanaman, mereka lakukan bersama. Sementara penyiangan, pemangkasan, pemanenan seluruhnya dilakukan olehnya, demikian pula dengan penggilingan, penjemuran, dan penjualan.

Selain beban ganda, pada banyak kejadian, perempuan-perempuan Desa Paku mendapat kesempatan setelah laki-laki. Mereka bahkan seringkali tidak diberi pilihan untuk memilih dan berpartisipasi atas inisiatif mereka sendiri, mereka tidak ditawarkan posisi yang baik di dalam kelompok karena mereka diterima sebagai bawahan laki-laki. Hal ini mempengaruhi posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan lahan.

Sebagai bentuk diskriminasi, peran ganda perempuan berbanding terbalik dengan distribusi manfaat yang merugikan mereka, satu dampak dari kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Kurangnya manfaat dari pelaksanaan rentetan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan bagi perempuan di Desa Paku bisa kita lihat dari partisipasi dalam pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas.

Pelatihan-pelatihan yang selama ini mengikutkan warga Paku senantiasanya didominasi peserta laki-laki. Akibatnya, KAPABEL menjumpai satu desa di mana sebagian perempuan cenderung pasif menghadapi pertemuan-pertemuan formal, atau forum-forum di ruang publik. Kurang menghadiri pelatihan-pelatihan besutan lembaga-lembaga formal antara lain menyebabkan kompetensi dan kepercayaan diri mereka kurang terbangun untuk menghadiri

dan bicara untuk urusan-urusan publik. Ini masih ditambah fakta kebiasaan mengabaikan mereka dalam forum-forum formal.

Karena itulah, keterlibatan aktif perempuan, setidaknya bagi sebagian dari mereka, dalam kelompok tani di Desa Paku terjadi karena kebetulan belaka, dan bukan tanpa paksaan. Sebagian dari anggota KTH perempuan baru bisa berperan dalam kelompok karena suami mereka tidak memenuhi syarat administrasi untuk menjadi anggota kelompok, atau karena laki-laki di satu rumah tangga tengah merantau keluar desa. Perempuan adalah pilihan kedua untuk menjadi anggota kelompok tani, walaupun perempuan pada dasarnya berperan penting dalam mengelola lahan di kawasan hutan.

Dalam proses perekrutan dan pembentukan kelompok di Desa Paku, sebagian anggota perempuan awalnya diwakili oleh laki-laki. KAPABEL memang membuat undangan terbuka bagi siapa saja yang mungkin berminat menjadi anggota KTH, perempuan dan laki-laki. Namun bagi sebagian perempuan yang akhirnya menjadi anggota, mereka baru diberitahu kemudian bahwa nama mereka sudah terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Ketua KTH memberitahu saya bahwa suami saya bergabung menjadi anggota kelompok. Tetapi, KTP yang dikumpul suami saya bermasalah, karena ia pindah kependudukan. Karena itu, KTP saya yang dikumpul. Saya tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu. Keputusan ini dibuat oleh suami saya,” begitu kata seorang perempuan anggota KTH di Desa Paku.

Dorkas Tanan, anggota KTH perempuan yang lain, menyatakan bahwa, keputusan terlibat dan tidak terlibat dalam keanggotaan kelompok bukan keputusan perempuan, melainkan keputusan orang lain, yang biasanya laki-laki.

“Saya tidak ikut pada saat pembentukan kelompok, suami saya yang ikut. Tapi, nama saya yang dimasukkan oleh suami saya. Katanya, kalau dia pergi merantau, dia tidak bisa lagi terlibat aktif dalam anggota kelompok, jadi lebih baik saya yang dimasukkan dari awal sebagai anggota,” demikian tutur seorang anggota KTH perempuan lain.

Namun satu catatan penting di sini: nama-nama perempuan

itu diusulkan oleh perempuan-perempuan lain yang hadir dalam pertemuan-pertemuan di seputar perekrutan anggota KTH. Dengan kata lain, keluhan mereka bisa saja tetap tak terdengar seandainya anggota perempuan tak diundang hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Tetapi kecenderungan merantau bagi laki-laki desa ini juga secara kebetulan punya andil.

Para lelaki Desa Paku memang banyak yang merantau karena kurangnya pilihan sumber pendapatan di desa. Karena itulah mereka 'menitipkan' keanggotaan mereka dalam KTH kepada istri atau anggota keluarga perempuan lain. Kepergian para lelaki inilah yang membuka peluang lebih luas bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan resmi kelompok.

Dengan begitu, ketika KAPABEL datang pada November 2020, mereka sebenarnya mendatangi desa dengan kaum perempuan yang secara potensial lebih punya peluang terlibat sebagai anggota kelompok. Potensi ini bertaut dengan pendekatan KAPABEL yang membuka peluang bagi perempuan untuk bergabung. KAPABEL mengatur pendaftaran berbasis rumah tangga sehingga membolehkan siapa pun di dalam rumah tangga untuk menjadi anggota: suami, istri, atau anak.

Karena itulah, meski berawal dari suatu kebetulan, keterlibatan perempuan dalam KTH di Desa Paku menjadi lebih pekat (intensif). Dalam pembangunan rumah bibit, misalnya, perempuan banyak yang terlibat aktif. Para lelaki hanya menyiapkan rangka bangunan, itu pun dibantu perempuan ketika mengumpulkan bambu. Mereka ikut mengangkut batang-batang bambu ke lokasi pembibitan, sementara membuat bedeng, mengumpulkan tanah, menyiapkan media tanam, semua dilakukan oleh perempuan.

Perempuan-perempuan Desa Paku, mengetahui bentang alam di desanya. Mereka dapat mengenali perkebunan kopi, sungai dan perbukitan di sekitarnya, serta rotasi hasil hutan yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, terutama pada saat krisis ekonomi. Mereka membagi waktu dan lahan untuk menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari dan tanaman yang hendak mereka jual ke pasar untuk menambah penghasilan.

Perempuan di sana banyak terlibat dalam pengelolaan

sumberdaya alam yang terkait erat dengan ekonomi keluarga. Perempuan turut memproduksi kopi dan menjualnya ke pedagang pengepul di kecamatan, menangani pendapatan dan kebutuhan rumah tangga, juga menanam dan mengumpulkan buah dan sayuran untuk dikonsumsi.

Debora Kombong, misalnya. Ia adalah buruh tani di kebun milik tetangganya, ia mengeluhkan buah kopi yang semakin menurun produktivitasnya akhir-akhir ini, yang secara langsung melorotkan pendapatannya dan membuatnya seringkali gagal memenuhi kebutuhannya. Namun dengan pengalamannya sebagai buruh tani dan pengetahuannya tentang kondisi alam sekitar, ia tak menyerah. Ia memutar otak untuk memenuhi kebutuhannya.

Di pekarangan rumahnya, ia lantas menanam sayur-sayur seperti wortel dan daun bawang menggunakan media tanam karung semen bekas, tanaman tersebut mereka konsumsi sehari-hari dan sebagian besar dijual ke pasar.

Di tengah ketidakpastian komoditi, mereka akhirnya berinisiatif memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia melalui kelompok usaha yang mereka bangun.

Di Bawah Bayang-bayang Tradisi dan Ajaran

Di Desa Pundilemo terbangun keyakinan bahwa perempuan tidak boleh melakukan berderet praktik tertentu. Mereka misalnya tidak diperbolehkan melewati jembatan yang melintasi Sungai Saddang jika sedang hamil. Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh menyentuh beras ketan yang akan diolah menjadi sesajen pada acara *Mattoanang Marassi*. Acara adat ini digelar sebagai ucapan rasa syukur dengan berdoa dan makan bersama. Sedangkan pada acara *Mindio Saluran*, diselenggarakan pada hari Selasa bulan Safar, ritualnya hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, yaitu salat di sudut-sudut pancuran, berkeliling sebanyak tiga kali membawa gendang, memegang keris dan memegang satu buah kelapa yang di dalamnya diisi air dari pancuran. Semua harus dilakukan oleh laki-laki.

Kondisi biologis yang hanya terjadi pada perempuan membatasi akses mereka terhadap banyak hal, termasuk perempuan di

Desa Pundilemo dan Desa Paku. Masyarakat membatasi peran perempuan pada tempat dan waktu tertentu karena punya ciri biologis berbeda dari laki-laki. Pembatasan ini kemudian menjadi norma, bahkan menjadi keyakinan. Di Desa Pundilemo dan Desa Paku, keyakinan semacam ini membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan lahan. Mereka misalnya dilarang menanam bibit pertama jika sedang menstruasi.

Selain larangan yang berasal dari keyakinan setempat, sejumlah larangan lain juga dipengaruhi oleh ajaran agama. Rentetan larangan ini mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan. Seorang perempuan yang dulu aktif saat penyuluhan, pelatihan, dan agenda desa yang melibatkan laki-laki dan perempuan, undur diri sama sekali sejak suaminya rutin mengikuti pengajian keagamaan yang meyakini bahwa perempuan harus dan membatasi diri untuk berbaur bersama dengan laki-laki.

Kepercayaan ini membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam anggota KTH yang didominasi laki-laki. Karena kepercayaan tersebut, mereka kehilangan ruang untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Mereka pun cenderung tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang tidak dikhususkan untuk kelompok perempuan sehingga kesempatan laki-laki dalam peningkatan kapasitas dengan sendirinya menjadi lebih besar.

Keyakinan ini membatasi perempuan dalam pengelolaan lahan karena mereka harus membagi waktunya untuk mengurus lahan dan mengurus rumah tangga. Kebanyakan waktu mereka dihabiskan dalam mengurus urusan domestik, dan tetap terlibat dalam pengelolaan lahan yang tidak diakui secara formal sehingga perempuan memiliki peran yang lebih dibanding laki-laki.

Desa Paku juga tidak terbebas dari keyakinan sejenis, meski dalam kadar lebih rendah. Kaum perempuan dibatasi untuk berjalan di depan laki-laki pada saat menghadiri suatu perhelatan yang dihadiri oleh orang banyak. Mereka meyakini bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan sehingga mereka sepatutnya berada di depan.

Rentetan keyakinan semacam inilah, baik yang bersumber dari tradisi setempat maupun aliran agama tertentu, yang menciptakan berlapis-lapis hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara berarti dalam pengelolaan hutan dan lahan. Situasi ini sungguh merugikan bagi umat manusia yang tengah menghadapi krisis ekologi raksasa berupa perubahan iklim.

Melestarikan Hutan Butuh Kerja Bersama

Andi Putri Ramadhani Musa

Lahan-lahan pertanian di kawasan Toraja dan Enrekang pada umumnya merupakan lahan yang dimiliki secara turun temurun. Pengakuan hak atas lahan warisan selama puluhan tahun mulai terguncang dengan aturan tentang status kawasan hutan oleh pemerintah.

Status kawasan hutan pada dasarnya sudah berlaku sejak zaman Kolonial Belanda yang dapat ditemukan dengan kepemilikan surat *rincik*.¹ Namun sampai sekarang, penetapan area kawasan hutan tidak pernah jelas.

Dalam Undang-Undang tentang Kehutanan,² kawasan hutan

¹ Surat pajak atas nama pemilik di kalangan rakyat, biasanya diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan.

² UU No. 41 Tahun 1999.

telah dibagi menjadi dua; hutan negara dan hutan hak. Hutan negara seringkali ditetapkan tanpa melibatkan masyarakat yang sebenarnya telah lebih dulu bermukim dan melangsungkan hidupnya di sana. Kelak, proses ini yang melahirkan *konflik tenurial* yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya ada 300 kasus konflik yang mereka tangani pada tahun 2018. Sebagian besar, konflik itu dipicu oleh kepemilikan dan pengakuan atas lahan yang tumpang tindih.³

Jauh sebelumnya, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing⁴ melahirkan praktik pengelolaan hutan yang didominasi oleh negara. Seperti, keluarnya izin Hak Pengusahaan Hutan, baik tambang maupun perkebunan, yang merampas lahan-lahan masyarakat.⁵

Untuk memecahkan masalah tersebut, hadirilah program-program pengelolaan hutan yang berlandaskan pada masyarakat. Keputusan tersebut setidaknya mengembalikan akses warga terhadap pengelolaan lahan. Tapi, tetap saja banyak syarat untuk mendapatkan izin itu.

Sejak awal 2000-an, praktik pengelolaan hutan mulai bergeser dari yang tadinya hanya dikelola negara, menjadi lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat. Pada tahun 2001, pemerintah menjalankan program pengelolaan hutan bersama masyarakat di wilayah-wilayah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berlanjut pada 2007, kembali diperkenalkan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, PHBM. Sekarang, program serupa dikenal sebagai

³ Sumber: Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa, "Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol 5 2-2. Halaman 75-92

⁴ UU No. 5 Tahun 1964.

⁵ Sumber: Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa, "Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol 5 2-2. Halaman 75-92.

Perhutanan Sosial⁶ yang menjadi titik balik masyarakat untuk kembali mengelola lahannya secara legal.

Namun, kenyataannya lahan yang telah memiliki izin, tidak benar-benar kembali kepada masyarakat. Sebab, praktik pengelolaan hutan yang berjalan di masyarakat sekarang, tidak lagi sama seperti sebelum penetapan kawasan oleh negara. Banyak aturan membatasi gerak masyarakat. Mereka dilarang meremajakan pohon, menjual kayu, dilarang menjual dan menyewakan lahannya. Susutnya lahan yang rakyat kelola menimbulkan banyak persoalan, antara lain semakin berkurangnya tradisi kerja bersama. Misalnya, dalam pekerjaan bertani yang dulunya dikerjakan bersama-sama dan bergiliran. Mereka biasa membersihkan lahan, menanam, serta memanen bersama-sama.

Secara umum, penerbitan izin Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan bisa dengan mengajukan surat permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama gabungan kelompok tani. Kemudian melampirkan daftar nama pemohon beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), gambaran umum wilayah (data fisik, sosial, ekonomi, dan potensi kawasan, serta peta usulan).

Proses awal pengelolaan kawasan hutan sangat mempengaruhi keberlangsungan lahan dan penghidupan para petani yang bergantung pada hasil hutan. Kita lihat bagaimana izin pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diusahakan di Desa Karre Limbong yang tidak melibatkan warga. Perizinan di desa itu dikerjakan oleh segelintir aparat desa dan dua orang dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II, pada 2014. Setelah terbit izin pengelolaan, lahan itu malah menjadi lahan mati selama enam tahun, sebelum kemudian dihidupkan lagi oleh kelompok tani hutan melalui program KAPABEL.

⁶ Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Beralih ke Tana Toraja, saat pertama kali pendamping desa dari KAPABEL masuk untuk menginisiasi pertemuan untuk pengusulan izin HKm untuk Desa Sesesalu. Pertemuan itu dihadiri oleh kepala desa dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I. Sebagai bagian dari proses untuk mengusulkan izin pengelolaan kawasan hutan, KAPABEL melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, mendiskusikan jenis komoditi yang akan dikembangkan oleh masyarakat, jumlah warga yang akan mengelola lahan, dan melibatkan mereka dalam setiap tahapan perizinan. Pada Desember 2021, izin itu terbit.

Di sisi lain, aturan Perhutanan Sosial berpotensi menimbulkan perselisihan antar warga, karena aturan tersebut hanya memberikan izin atas perorangan.

Seperti yang terjadi di Desa Pundilemo, Kabupaten Enrekang. Ada lahan yang masuk kawasan hutan negara dikelola oleh beberapa orang berkerabat, secara bergiliran. Sedangkan aturan Perhutanan Sosial hanya membolehkan satu orang dari satu keluarga (dalam satu Kartu Keluarga) menjadi bagian anggota kelompok. Sehingga, secara potensial individu yang terdaftar merasa punya hak untuk mengelola lahan tersebut, dibanding dengan kerabatnya yang tidak terdaftar.

KAPABEL dan Upaya Pengorganisasian

Kedatangan para pendamping desa dari KAPABEL awalnya tidak begitu dihiraukan oleh warga. Setiap kali dimintai informasi, sebagian warga menghindar, tidak ingin terlibat dalam percakapan lebih panjang.

“Aih, saya tidak tahu juga,” ujar seorang warga di Desa Sesesalu ketika ditanya tentang kepemilikan lahan dalam kawasan. Bukan cuma itu, ajakan berkumpul dan diskusi, kerap berakhir buntu.

Warga lain, menunjukkan sikap geram ketika disinggung mengenai pengelolaan hutan di kawasan hutan.

“Kawasanku bukan ji di hutan,” kata dia sambil membantah tuduhan aparat Kehutanan yang serikali memperlakukan warga layaknya pelaku kriminal.

“Na teriaki kanni sitakke balili, na garatta kan, biasa duka na dorong kan. Na kami dikka la ala bang rakan tu apa yang bisaki jual di pasar, tae duka ra ki ma tebang pohon (Mereka meneriaki kami sambil pegang senjata, membentak, biasa juga mendorong. Padahal kami ini cuma masuk, ambil yang ada nilai jualnya, tapi tidak menebang pohon),” tambahnya.

Sikap mereka menunjukkan adanya ketidakpercayaan mereka pada pihak instansi kehutanan. Jika kita menelusuri kejadian di masa lampau, banyak cerita yang bisa dijadikan alasan prasangka. Pengalihan kepemilikan lahan, salah satunya.

Lahirnya aturan penetapan kawasan hutan menjadi lahan negara, tanpa melibatkan masyarakat menimbulkan potensi perselisihan. Masyarakat yang menganggap lahan itu milik mereka, tiba-tiba dirampas negara. Mereka kehilangan sumber penghidupan yang telah menghidupi mereka beberapa generasi.

Perampasan lahan oleh negara menjadi cerita turun temurun. Mereka mewariskan rasa kecewa terhadap anak dan cucu. Ini juga membuat warga tidak percaya terhadap apapun program-program pemberdayaan petani di hutan, termasuk program KAPABEL.

Tapi lambat laun, kepercayaan itu terbangun bersamaan dengan kerja-kerja kelompok yang terbangun bersama KAPABEL.

Bertuah dari Tradisi

Pagi itu, 25 November 2020, Marlina, harus pergi berkebun sendiri. Suaminya sedang ke pusat desa untuk membantu salah satu kerabatnya yang tengah menyiapkan upacara kematian, *rambu solo*.⁷ Upacara ini berlangsung selama tujuh hari. Masyarakat Toraja meyakini, upacara ini bisa mengantarkan arwah ke alam roh, tempat tinggal abadi bersama para leluhur.

Bagi masyarakat Toraja, kematian harus dirayakan dengan meriah. Sebab, mereka percaya, kematian merupakan bentuk

⁷ *Rambu solo*, berasal dari kata *rambu* yang berarti asap atau sinar sedangkan kata *solo* berarti turun atau terbenam, sehingga diartikan upacara yang dilakukan setelah sinar matahari mulai terbenam.

penyempurnaan arwah. Juga sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua atau kerabat mereka.

Bagi masyarakat Toraja, *rambu solo*, memiliki nilai tradisi yang paling tinggi daripada tradisi lainnya. *Rambu tuka*,⁸ misalnya. Upacara ini simbol rasa syukur atas pencapaian tertentu, seperti pernikahan, pesta rumah baru, atau pesta panen. Namun nilainya masih di bawah *rambu solo*.

Rambu solo dapat memakan biaya hingga miliaran rupiah. Mengorbankan puluhan hingga ratusan kerbau dan babi. Semakin banyak yang bisa dikorbankan oleh keluarga mendiang, semakin meriah pestanya, semakin tinggi pula kedudukannya di masyarakat. Sehingga upacara ini juga dijadikan kesempatan untuk menunjukkan kelas sosial.⁹

Sebab itu, masyarakat Toraja bisa menghabiskan masa hidupnya untuk menabung agar dapat menggelar upacara. Mereka menggambarkan dengan ungkapan “hidup untuk mati”.

Selama masa menabung itu, masyarakat Toraja menyimpan jasad keluarganya di rumah, di dalam sebuah kamar. Mereka membaringkannya di atas kasur, seakan-akan jasadnya hanya sedang tidur. Ini bisa terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hingga terkumpul uang untuk upacara.

Upacara kematian menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat Toraja, dengan cara apapun mereka pasti mengusahakan upacara tersebut. Begitulah cara mereka mengabdikan kepada orang tua atau kerabat yang meninggal serta menjaga dan melestarikan budaya atau tradisi.

Marlina tinggal di Dusun Pauan, Desa Sesesalu, Tana Toraja. Jalan utama dusun ini masih berupa tanah. Ketika hujan, jalan

⁸ Kebalikan dari *Rambu Solo*, *Rambu Tuka* diartikan sebagai asap atau sinar yang naik ke atas, sehingga upacara dilakukan pada saat matahari terbit atau saat keadaan terang.

⁹ Grace Rima, “Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat *Rambu Solo*’ Dan Implikasinya Terhadap Kekerabatan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja”. *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No.2, Agustus 2019. Halaman 227-237.

menjadi becek dan licin. Listriknya tidak menyala sepanjang hari, karena keterbatasan daya. Sebab, tenaga listriknya masih menggunakan kincir air yang dikelola oleh warga. Listrik menyala hanya pada pukul 5 sore sampai pukul 6 pagi.

Marlina menetap di Dusun Pauan, sejak 2013, satu tahun setelah menikah dengan Demianus Demmanongka yang warga dusun ini. Marlina sendiri lahir dan tumbuh di Mamasa, Sulawesi Barat.

Sehari-hari, Marlina bekerja bersama suaminya merawat pohon-pohon kopi. Sudah lumrah bagi Marlina ke kebun sendiri dari pagi hingga petang, jika suaminya sedang ada urusan lain. Kedua anaknya dititip di rumah mertuanya, saat dia berkebun.

Marlina berjalan terengah-engah menyusuri jalan tani yang sempit, yang lebarnya kurang dari satu meter. Ia harus menempuh jarak sekitar satu kilometer untuk tiba di kebunnya. Kedua sisi di sepanjang jalan itu berjajar pohon kopi, dan pohon-pohon naungan seperti kayu manis. Ia akan menghabiskan hari itu di kebun, merawat kopi.

Beberapa hari kemudian, Marlina urung ke kebun. Ia harus turut membantu acara adat di pusat desa bersama suaminya, untuk beberapa hari. Warga Desa Sesesalu sudah terbiasa meninggalkan tumpukan pekerjaan mereka untuk turut membantu pada ritual *rambu solo*, hampir setiap minggu.

Bekerja sebagai petani, ibu rumah tangga, dan menjadi bagian dari masyarakat Toraja yang masih kental dengan tradisi, tak lantas membuat Marlina enggan berpartisipasi pada program yang hadir di desanya. Sejak November 2020, ia terlibat dengan KAPABEL, yang menjalankan program pendampingan adaptasi masyarakat berbasis pangan hutan. Tujuannya, menciptakan kemandirian kelompok dalam mengelola hutan yang lestari. Program ini menginisiasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, biasa disebut KUPS. Dan Marlina terlibat di dalamnya.

Marlina menjadi bendahara kelompok, KUPS Topatindo yang berfokus mengolah kopi menjadi sebuah produk. Marlina tidak melewatkan satupun semua kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya untuk menunjang kemandirian

kelompok. Walaupun terbata-bata dalam menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ia tetap aktif bertanya dan mengutarakan pendapatnya.

Berada dalam tradisi Toraja yang sangat kuat, membuat Marlina terbiasa menerapkan nilai-nilai tradisi dalam pekerjaannya sebagai bagian dari kelompok tani. Salah satunya tentang kesadaran balas budi. Bantuan dibalas dengan bantuan. Seperti siklus, kesadaran ini menciptakan peran serta masyarakat dalam kegiatan lain, selain adat dan keagamaan.

Demikian juga kata Allo Boyong, sekretaris Desa Sesesalu. Menjadi birokrat desa bukan berarti mendapat perlakuan khusus, ia tetap orang Toraja yang terikat tradisi untuk membantu kegiatan masyarakat.

“Begitu memang. Kalau kita sudah datang untuk membantu di acaranya orang, nanti orang itu juga harus bantu kita di lain hari. Di sini itu seperti itu budayanya,” tuturnya, suatu hari di sebuah pos kamling, sepulang menghadiri *rambu solo*.

Hubungan timbal balik dalam hubungan sosial ini mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab untuk saling membantu sesama warga. Upacara *rambu solo* mempererat tali persaudaraan antar keluarga dan sistem kekerabatan.

Namun tradisi ini tidak berlaku dalam urusan pemenuhan penghidupan masyarakat. Seperti dalam urusan bertani yang sekarang menjadi pekerjaan perorangan; padahal di masa lalu, bertani dikerjakan bersama-sama.

Kerja Bersama dari Masa ke Masa

Perkembangan teknologi setidaknya menjadi satu pemicu melemahnya *collective action* (kerja bersama) dalam urusan bertani. Teknologi menghadirkan pilihan baru dalam bertani, seperti mempersingkat waktu tanam dan panen, juga mengurangi beban biaya upah tenaga kerja. Karena pola kerja bersama dalam bertani sudah hilang, para petani membutuhkan buruh harian untuk membantu mengolah lahannya.

“Dulu itu memang kita ganti-gantian kalau mau menanam atau memanen. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Sudah ada traktor, mesin penggiling. Tapi kebanyakan sewa traktor dan penggiling. Jadi tidak borongan. Kalau kami kekurangan tenaga, itu biasanya kita gaji orang untuk bekerja,” kata Andarias, salah seorang warga Desa Karre Limbong, Toraja Utara. Usianya tak lagi muda, bahkan ia pun tidak tahu, tahun berapa tepatnya ia lahir.

Hadirnya program pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan desa juga mempengaruhi perubahan tersebut. Program pemerintah identik dengan sistem kerja upahan yang secara tidak langsung membuat masyarakat bekerja tergantung upah, bukan atas tanggung jawab bersama.

“Dulu sebelum ada dana pembangunan, warga bergotong royong untuk membuat dan memperbaiki jalan desa maupun jalan tani, tapi sejak ada dananya (dana desa), warga tambah semangat dan mulai berlomba-lomba menjadi buruh. Tapi jika pengerjaannya tidak memiliki dana dari desa (upah kerja), jumlah warga yang hadir cuma sedikit,” ujar Andarias, salah satu warga Desa Karre Limbong, saat ditanya tentang bagaimana kerja bersama berlangsung di desanya.

Sementara jumlah petani di desa semakin berkurang karena perantauan, kebutuhan akan buruh tani menjadi semakin tinggi. Bersamaan dengan itu pendapatan dari hasil tani semakin berkurang karena meningkatnya ongkos produksi. Oleh sebab itu, orang-orang muda desa, yang diharapkan bisa melanjutkan kerja bertani, semakin banyak yang pergi merantau untuk mendapat penghasilan yang lebih tinggi, daripada bertani.

Seperti Roni Sambolangi, pemuda Desa Sesesalu, berusia 27 tahun. Ia sudah empat tahun merantau ke pulau Kalimantan, tempat yang dikenal menjadi surganya para perantau. Tandi Toding Gayang, pemuda berusia 24 tahun, juga sudah merantau selama tiga tahun di tempat yang sama.

Perbedaan Pola Kerja Bersama di Tiap Desa

Warga Desa Sesesalu masih melekat erat dalam kebersamaan, tak

hanya dalam tradisinya, juga dalam kegiatan lainnya. Misal pada kegiatan kelompok dalam program KAPABEL. Tak jauh berbeda dengan yang berlangsung di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang.

Warga Desa Paladang sangat menjunjung tinggi semangat kebersamaan melalui adat. Mereka menganggap dengan bekerja secara kelompok, kerja yang berat akan menjadi lebih mudah. Menurut warga Desa Paladang, Sudarmin, jauh sebelum terbentuknya kelompok-kelompok pertanian, kerja-kerja kelompok itu sudah berlangsung. Dia mengatakannya dalam *video-podcast* yang diunggah di akun Youtube: Tim Layanan Kehutanan Masyarakat.

Berbeda di Desa Karre Limbong, Toraja Utara. Selain dalam upacara *rambu solo* atau *rambu tuka*, masyarakat cukup sulit bekerja dalam kelompok.

Menurut salah satu anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di desa ini, bernama Sulaiman, warga akan tertarik bergabung dengan kelompok jika mereka melihat hasil yang menguntungkan. Sulaiman membuat stup lebah dan berburu lebah, untuk kelompok usaha madu. Ia ingin memancing gairah anggota kelompok lain.

“Otaknya ada di mata,” kata Sulaiman.

Masalah yang berbeda terjadi di Desa Pundilemo, Kabupaten Enrekang. Di sini para anggota kelompok tani hutan kesulitan mendapat lahan untuk pembibitan porang. Anggota kelompok yang mempunyai lahan, menolak memberikan sedikit lahannya untuk pembibitan porang. Para anggota kelompok juga kesulitan menghadiri pertemuan karena sibuk berkebun dan beternak.

Corak berbeda kerja bersama di desa-desa ini bersumber dari berubahnya tata guna lahan dari yang berarah pemenuhan kebutuhan sendiri menjadi sistem yang lebih bertujuan komersial. Berubahnya sistem usaha tani meningkatkan kebutuhan akan ongkos produksi. Bersama kebutuhan-kebutuhan lain yang juga meroket, petani terpaksa lebih banyak mengejar pendapatan dalam bentuk uang.

Arah baru pencarian nafkah petani ini, hingga taraf tertentu telah membelokkan kebiasaan kerja bersama. Tanpa bisa mereka

hindari, para petani semakin terdesak untuk bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola lahan dan hutan.

Soal inilah yang harus KAPABEL hadapi dalam membangkitkan Pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan yang sangat butuh semangat kerja bersama. Sebab kebersamaan bisa mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lestari. Sebagaimana tujuan program ini.

Setelah Terjatuh ke Lubang yang Sama, Berkali-kali

Abdurrahman Abdullah

Pagi itu Khalid, pendamping lapangan program KAPABEL menuju rumah Kepala Dusun Ranga. Di perjalanan ia menjumpai berderet kebun jagung. Pohon-pohon jagung berjajar rapat, mungkin sekitar 30 cm, tingginya sudah melebihi tinggi petani yang bekerja di selas-selanya, sebagian masih hijau dan yang lain sudah menguning,

Ditepikebun-kebunitubertebaran susunan wadah penjemuran jagung-orang Desa Ranga kalampang, alat penyemprotan cairan kimia-pestisida atau herbisida, dan tiang-tiang panel surya. Panel surya petani gunakan untuk mengalirkan listrik ke kawat besi yang melindungi kebun dari babi hutan. Kebun-kebun jagung ini berada di lereng perbukitan dengan tingkat kemiringan berbeda, dari yang landai sampai yang paling curam, satu hamparan bukit curam sepenuhnya ditutupi jagung.

“Banyak jagung di sini ya, Pak?” Khalid bertanya kepada Saim,

putra Kepala Dusun, tak lama setelah ia tiba di rumah Kepala Dusun.

“Iya, rata-rata petani di sini kerja jagung,” jawab Saim.

Setelah berseloroh sebentar untuk mencairkan suasana, Saim lanjut menerangkan bahwa sebagian besar warga desa memang berkebun jagung hibrida. Para pedagang datang ke desa membeli hasil panen jagung mereka. Dan sepertinya menurut Sa'im, pedagang tersebut menjualnya ke salah satu perusahaan pengolah pakan ternak. Ia lalu membelokkan ceritanya ke masa lalu. Sebelum berladang jagung, katanya, warga desa dulu bertani sawah, sebelum sawah warga mengalami kekeringan panjang dan padi terserang hama sehingga mereka memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bertani sawah.

Ia lalu kembali ke masa kini.

“Begini, Pak, itu tanaman jagung sekarang sudah ada penyakitnya, mungkin karena bibit juga. Tetapi petani sudah mulai bingung akan mengganti dengan tanaman apa lagi,” keluh Saim.

Pernyataan Saim ini, khususnya kalimat “akan mengganti dengan tanaman apa lagi” terngiang-ngiang di kepala Khalid. Dari sana mulai muncul rentetan pertanyaan. Apakah selama ini mereka sering berganti tanaman? Kenapa seperti itu? Apa saja penyebabnya? Apa saja tanaman yang sebelumnya pernah mereka usahakan? Apakah mengganti tanaman adalah satu-satunya pilihan?

Pertanyaan-pertanyaan itu membawa Khalid menyelami lebih jauh tentang sejarah pergantian tanaman di desa itu, kendala apa saja yang mereka hadapi sehingga mesti melakukannya, dan bagaimana konteks sosial-ekonomi-politik turut mempengaruhi pergantian tanaman.

Khalid memulai penelusuran dengan melacak terlebih dahulu jenis tanaman apa saja yang pernah diusahakan orang-orang Ranga. Ia kejar cerita itu dari orang-orang tua Desa Ranga. Untuk itu, ia perlu mencari tahu orang-orang tua Ranga yang bisa bercerita

kepadanya.

Orang pertama yang ia temui adalah Lapparan, seorang tetua dari Dusun Lembong. Khalid sering mendengar namanya disebut-sebut orang Ranga ketika mereka mengobrol tentang tanaman pertanian.

Lapparan tinggal di Dusun Lembong, salah satu dusun di Desa Ranga yang letaknya di lembah yang diapit perbukitan. Jalan menuju Dusun Lembong berkelok-kelok dan naik turun dengan pohon jati dan rumput gajah yang menghiasi kiri-kanan jalan.

Lapparan telah merasakan jatuh bangun sebagai petani. Ia bercerita bahwa hampir sepanjang hidupnya ia habiskan untuk bertani. Ia mulai ikut bertani bersama orangtuanya sejak tahun 1962. Mereka berpindah-pindah dari satu ladang ke ladang lain, sebelum mereka bertani secara menetap seusa membuka lahan sawah. Waktu itu, setiap kebun atau sawah hanya dikelola dengan memanfaatkan tenaga anggota keluarga. Tanah-tanah yang mereka garap, kebun atau sawah, juga diwariskan dari orangtua kepada anak mereka. Demikian pemungutan kemiri di hutan.

Sembari mengusap ubannya dan memandang langit Lapparan berusaha mengingat-ingat untuk melanjutkan ceritanya.

“Waktu yang bertani pindah-pindah itu saya tanam ubi jalar dan jagung putih, kalau yang menetap sudah mulai tanam padi,” ungkap Lapparan sembari memperbaiki sorban yang ia kenakan.

Ia pun bercerita bahwa dahulu petani menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga sehingga lahan yang mereka garap disesuaikan dengan seberapa banyak kebutuhan pangan keluarga. Petani saat itu belum dipusingkan oleh ketersediaan pasar yang akan menampung hasil bumi. Mereka lebih banyak saling bertukar panen.

Lapparan bertutur, mereka waktu itu masih bertani dengan memanfaatkan alat-alat tradisional seperti bajak dan cangkul, juga bahan yang tersedia di sekitar lahan.

“Dulu kita tidak pakai pestisida, dan kita tanam bibit lokal saja,” tutur Lapparan. Mereka pun masih saling membantu (*massiallo*) untuk menanam dan panen. Mereka menentukan waktu kerja,

misalnya dua kali sepekan pada hari Selasa dan Sabtu. Mereka akan bekerja bersama di satu lahan secara berkelompok, yang biasanya beranggotakan 30 orang. Mereka mulai di satu lahan, kemudian berpindah ke lahan lain. Seluruh anggota menyepakati urutan lahan yang akan mereka kerjakan.

Lapparan lalu bercerita seusai membetulkan gulungan sarungnya. Demi memenuhi kebutuhan lauk-pauk, katanya, ia beternak ayam dan sapi. Sementara sayur berasal dari daun ubi jalar, daun kelor, dan pakis. Ia juga memungut biji-biji kemiri di hutan untuk ia jual atau tukar untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang datang dari luar, seperti garam atau ikan.

Di Desa Ranga, katanya, hanya ada sawah tadah hujan. Mereka hanya bisa menanam padi ketika musim penghujan, dan pada musim kemarau mereka menanam bermacam-macam tanaman jangka pendek seperti kacang tanah, jawawut, dan jagung putih.

Dari cerita tentang corak pertanian dan penghidupan masa lalu yang subsisten, Lapparan melompat ke dua tanaman yang pernah menjadi penghasil uang tunai utama di desanya.

Ia memulai cerita dengan terbata-bata pada dekade 1970-an, ketika ia menambah tanaman kemiri di lahan warisan orang tuanya. Bibit kemiri ia cabut dari bawah pohon-pohon kemiri yang ditanam oleh leluhurnya. Pohon kemiri muda yang tumbuh dari buah-buah yang jatuh ia cabut dan pindahkan ke titik lain.

Sekira satu dekade kemudian, pada 1980-an, ia menandai datangnya komoditi baru, yaitu cengkeh. Ia menjadi orang pertama yang menanam cengkeh di Desa Ranga. Untuk memulai usaha tani cengkehnya, ia membeli bibit dalam bentuk biji cengkeh dari Dinas Pertanian Kabupaten. Biji cengkeh yang ia beli dari Dinas Pertanian ia ketahui berasal dari Ambon, Maluku.

Adalah penyuluh pertanian kabupaten yang menyarankan kepadanya dan petani Ranga lainnya untuk menanam cengkeh. Lapparan bahkan perlu mendengar langsung kesaksian putranya tentang kesuburan tanaman cengkeh di Bogor untuk meyakinkan

dirinya sebelum menanam komoditi itu.

Pemeliharaan dan pemanenan cengkeh cukup mudah, katanya, Pemupukan ia lakukan dengan menabur pupuk pada tanah di sekeliling batang pohon cengkeh. Jika sekeliling tanaman tumbuh banyak rumput, ia menyemprotkan herbisida. Jumlah pupuk yang ia gunakan mengikuti usia dan kondisi tanaman. Semakin tua tanamannya semakin banyak pula pupuk ia gunakan. Sementara pemanenan ia lakukan dengan cara memanjat pohon cengkeh menggunakan tangga yang terbuat dari bambu.

Tak lama sebelum cengkeh masuk ke Desa Ranga, pada rentang 1975-1980, terjadi perubahan besar dalam sistem cocok tanam padi. Para petani mulai mengenali pupuk kimia, pestisida, dan benih atau “bibit unggul” yang mereka peroleh melalui subsidi pemerintah. Sebagian kecil membeli sendiri dari kabupaten tetangga, Pinrang dan Sidenreng Rappang.

Pemerintahan Orde Baru pada masa itu memang sedang gencar melancarkan kampanye revolusi hijau, sebuah proses peralihan mendasar dari sistem cocok tanam tradisional ke pertanian modern. Perubahan ini berlangsung di negara-negara berkembang sejak dasawarsa 1950-an, dan tiba di Indonesia pada 1970-an. Revolusi ini bekerja untuk meningkatkan produktivitas pertanian (lewat intensifikasi) dan pembukaan lahan-lahan baru (ekstensifikasi). Penerapannya di Indonesia berlangsung lewat program Bimbingan Massal (Bimas), bertujuan merangsang para petani untuk menggunakan varietas hasil rekayasa bibit, menggunakan pupuk kimia, melindungi tanaman dengan pestisida, menjadikan pasar sebagai tujuan utama hasil panen, dan memanfaatkan kredit yang khusus dirancang bagi petani.¹

Lapparan juga mengungkapkan bagaimana penggunaan benih unggul, pupuk kimia, dan pestisida memang meningkatkan hasil panen. Tapi biaya yang harus petani belanjakan di sepanjang musim tanam juga semakin banyak karena petani harus membeli benih, pupuk, dan pestisida. Subsidi yang pemerintah sediakan

¹ Nugroho, Wahyu Budi (2018) “Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru”, *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 12(1).

tidak mencukupi kebutuhan lahan dan tanaman petani.

Lapparan juga bercerita tentang tanah di lahannya yang mengeras dan air sungai yang menimbulkan bau setelah petani menggunakan bahan kimia.

Pada awal dekade 1990-an Lapparan kembali mengusahakan tanaman baru, kali ini ia mengusahakan tanaman kakao setelah mendengar cerita dari kerabatnya yang pulang dari perantauan tentang potensi tanaman yang berkembang pesat di Malaysia dengan permintaan pasar yang tinggi. Lapparan juga mendengar kabar tentang kakao dari sumber yang lebih dekat, Kabupaten Luwu. Sejak awal 1980-an, para petani Luwu memang sudah mulai menanam kakao dan mulai menuai hasil pada dekade 1990-an, ketika Ranga memulai demam kakao.

Lapparan awalnya menanam di halaman rumahnya dengan membibitkan sendiri biji kakao yang para perantau Ranga bawa dari Malaysia. Penanaman pertama ini pun berhasil tumbuh. Beberapa waktu setelah penanaman pertama, Lapparan mulai menanam kakao di kebun-kebunnya. Petani Ranga lainnya kemudian mengikuti Lapparan dengan menanam kakao secara bertahap. Namun setelah mengetahui harga kakao yang menjanjikan, para petani Ranga kemudian menanam kakao secara besar-besaran. Penanaman kakao dengan pola monokultur mengorbankan pohon kemiri dan pohon-pohon lainnya sehingga mengubah secara signifikan bentang alam Desa Ranga.

“Satu gunung itu semuanya kakao,” kata Rudi, petani Ranga.

Harga kakao yang relatif tinggi pada masa itu, tentu menarik bagi para petani Ranga. Krisis moneter pada akhir 1990-an yang menjatuhkan nilai rupiah segera menggerek naik harga biji kakao yang berorientasi ekspor. Rata-rata harga jual dari petani ke pedagang mencapai Rp30.000 per kilogram. Kelebihan lain tanaman kakao yang menarik bagi petani Ranga ialah pemeliharaan tanaman kakao. Bagi mereka, kakao cuma butuh perawatan yang ringan. Jika tikus mengganggu buah kakao, mereka hanya perlu

memberi racun tikus. Belum ada hama lain. Mereka pada masa itu bisa memanen antara 100 sampai 500 kilogram setiap pekan, dan menjualnya ke pasar lokal menggunakan kuda atau dengan cara memikul.

Masa keemasan tanaman kakao tidak bertahan lama. Sepuluh tahun sejak ledakan penanaman kakao di Ranga, tanaman ini mulai menunjukkan gejala-gejala akan terjadinya krisis. Gejala yang terjadi adalah penurunan jumlah hasil panen dan munculnya hama penggerek buah, tikus, dan monyet. Hama monyet bahkan memakan buah kakao yang masih muda. Selain hama, penyakit busuk buah juga menyerang tanaman kakao yang menyebabkan buah kakao berwarna hitam dan mengering.

Gelombang besar serangan hama dan penyakit melorotkan hasil panen tanaman andalan petani Ranga dalam dekade terakhir.

“Tanaman kakao awalnya menghasilkan panen yang besar, waktu pemanenan tiap pekan. Ketika penyakit busuk buah menyerang, buahnya menghitam dan mengering. Sisa kakao yang masih aman dari gangguan penyakit malah terserang tikus dan monyet,” tutur Rudi.

Dengan serangan bertubi-tubi dan tanpa henti itu Rudi akhirnya angkat tangan dan memutuskan berhenti melanjutkan usaha tani mereka dengan tanaman kakao.

Tidak hanya kakao yang sedang berada di ujung tanduk, padi mereka pun bernasib serupa. Pengusahaan padi mengalami penurunan hasil panen akibat lahan-lahan sawah mulai mengalami kekeringan dan serangan penyakit yang menyebabkan padi menjadi merah, buahnya berwarna putih, tidak berisi beras, selain penyakit yang menghentikan pertumbuhan padi.

Tidak berhenti sampai di situ, petani yang hanya mengandalkan sawah tadah hujan mulai kebingungan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam padi karena kesulitan memperkirakan datang dan berakhirnya musim kemarau ataupun penghujan. Sebagian petani menganggap bahwa ini mungkin pengaruh dari pemanasan global.

Di tengah kebimbangan, petani mulai mencari tanaman lain yang dapat menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, cocok untuk jangka panjang dan lebih tahan hama dan penyakit dibandingkan dengan tanaman yang mereka usahakan sebelumnya. Petani kemudian kembali mengusahakan tanaman cengkeh dan kacang tanah serta kembali masuk ke tengah hutan untuk mencari kemiri seperti yang nenek moyang mereka dulu kerjakan.

Krisis yang berkepanjangan mencapai puncaknya pada tahun 2010, petani yang mengusahakan tanaman padi mengalami gagal panen. Di sisi lain, tanaman kakao juga sudah mencapai titik nadir, petani kalah dalam pertarungan melawan hama dan penyakit sehingga hasil panen mereka terus menyusut setiap tahun. Rentetan kejadian itu menjadi pukulan telak bagi petani Ranga. Banyak petani akhirnya memutuskan berhenti menanam padi yang mereka usahakan secara turun-temurun dan mengabaikan pohon-pohon kakao yang pernah menjadi primadona di Desa Ranga.

Penanaman kakao besar-besaran yang beberapa dekade sebelumnya memusnahkan pohon-pohon dan tumbuhan lain, kini mereka anggap turut bertanggung jawab atas kekeringan di lahan-lahan sawah mereka karena berkurangnya debit air sungai. Beberapa petani juga beranggapan bahwa air sungai mulai berkurang akibat pohon jati di sekitar sungai mulai membesar sehingga banyak menyerap air.

Pemeliharaan tanaman kakao yang banyak menggunakan pupuk dan bahan kimia petani Ranga anggap memberikan efek penyakit pada tanaman yang lain.

Pada tahun 2011, pemerintah melalui Program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao mencoba menghadirkan jalan keluar bagi masalah tanaman kakao di Indonesia, termasuk di Ranga. Mereka memberi beraneka macam bantuan, salah satunya berupa pelatihan peremajaan dengan metode sambung pucuk.

Waddu, ketua kelompok tani kakao di Desa Ranga, mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Enrekang. Hasil pelatihan yang ia dapatkan kemudian ia sampaikan ke para petani, lalu mereka mencoba menerapkannya di beberapa lahan. Upaya Waddu dan para petani terbilang cukup berhasil dengan

berkurangnya penyakit yang muncul pada tanaman kakao. Pelan-pelan, panen kakao mulai meningkat. Namun upaya ini belum memadai guna menyelesaikan persoalan kakao di Ranga: monyet masih memakan tanaman kakao para petani.

Pada tahun 2016, Mondelēz International, salah satu produsen camilan berbahan dasar coklat terbesar dunia menghadirkan program *Cocoa Life* di Desa Ranga. Petani Ranga mendapatkan pendampingan agar mau mengusahakan kembali kebun-kebun kakao mereka yang beberapa tahun belakangan terlantar. Program ini mulai dengan menjadikan kebun-kebun itu sebagai plot percontohan yang mendapatkan perlakuan fisik khusus demi menyelesaikan persoalan penyakit tanaman.

Namun hingga awal tahun 2022, lima tahun pendampingan itu, pohon kakao di kebun-kebun percontohan itu belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Serangan hama terhadap tanaman kakao masih sering terjadi. Petani Ranga pun melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan demi membebaskan diri dari belitan krisis demi krisis akibat rentetan kegagalan dari satu tanaman ke tanaman lain—yang kali ini berlangsung lebih lama, sekitar dua dekade.

Mereka pun beralih ke tanaman lain.

Ketika hasil panen kakao dan padi yang menjadi sumber penghasilan utama para petani terus merosot, dan krisis ini tidak kunjung menemui jalan keluar, salah satu petani Ranga memulai pertarungan dengan tanaman lain.

Di tengah impitan kebutuhan hidup, Julaema mulai mencoba menanam jagung hibrida di sisa-sisa lahannya, pada tahun 2006, setelah mendapatkan informasi mengenai kesuburan tanaman jagung di Enrekang bagian utara dan timur. Bermodalkan bibit yang ia beli dari pasar Enrekang, Julaema memulai usahanya yang hasilnya menentukan mengepul tidaknya asap di dapur.

Percobaan penanamannya tidak langsung berhasil, pada percobaan pertamanya, pertumbuhan jagung yang ia tanam

terhenti bahkan sebelum berbunga. Julaema belum menyerah, ia sadar bahwa informasi yang ia miliki tentang budidaya jagung belum memadai. Ia pun mencari informasi ke kerabatnya di desa lain yang sudah berhasil membudidayakan jagung. Ia lalu mencoba menanam kembali setelah merasa memiliki informasi lebih baik. Jagung yang ia tanam kali ini berhasil berbunga hingga menghasilkan buah. Harapannya menanjak. Ia beritahu kerabatnya di desa lain tentang perkembangan jagungnya dan segera menyarankan petani lain untuk turut mencoba. Dan setelah menunggu cukup lama, jagung yang telah berbuah tidak kunjung menghasilkan bulir (bogang).

Setelah percobaan pertama dan kedua gagal, ia berpikir untuk meninggalkan usahanya menanam jagung. Namun beberapa saat kemudian, ia teringat kenyataan akan kebutuhan sekolah anak-anaknya dan asap dapur yang harus tetap mengebul. Percobaannya pun berlanjut, ia dengan telaten mengumpulkan informasi dan mempelajari teknik budidaya yang tepat, yang cocok dengan topografi dan tanah di lahannya.

Percobaan ketiga kali akhirnya berhasil dengan jenis jagung hibrida yang berkualitas cukup baik. Ia kemudian berfokus menambah luasan kebun jagung dengan mengganti tanaman kakao yang menurutnya tidak lagi menguntungkan.

Berita uji coba penanaman jagung hibrida tersebar dengan cepat, beberapa petani menghampiri Julaema untuk menimba informasi dengan mendengarkan pengalaman budidayanya. Para petani ini mencoba mengembangkan tanaman jagung dengan memanfaatkan sebagian lahan di lahan-lahan kakao dan padi yang tak kunjung memberi kepastian.

Tanaman lain yang petani Ranga coba budidayakan ialah ubi jalar. Tanaman ini sebenarnya dulunya menjadi makanan pokok orang-orang tua para petani Ranga namun mulai kehilangan pamor semenjak merebaknya tanaman padi. Para petani mulai mengusahakan tanaman ubi jalar dengan mengambil pucuk ubi jalar dari daerah Randanan, satu daerah di pusat Kota Enrekang.

Pengusahaan tanaman ubi jalar banyak petani kerjakan karena modal untuk mendatangkan bibit ubi jalar cukup mudah, hanya perlu mengambil pucuk dari tanaman ubi jalar yang sudah tumbuh

lebih dulu. Pemeliharaannya pun hanya butuh modal yang kecil, dan akses pasarnya sudah tersedia berkat keterangan dari jejaring mereka di desa lain.

Petani Desa Ranga mengusahakan tanaman ubi jalar sejak tahun 2015. Hasil panen yang melimpah ternyata mampu menopang beban ekonomi keluarga mereka. Namun kisah ubi jalar tidak jauh berbeda dengan kakao. Komoditi ini bahkan lebih parah, tanaman ini hanya bisa bertahan sebagai gantungan pendapatan keluarga di Ranga selama tiga tahun. Ubi jalar mereka mulai terserang hama ulat yang menjadikan kulit umbinya berlubang-lubang. Dengan kondisi yang seperti itu minat pasar terhadap ubi jalar mereka segera menyusut, pedagang menolak membelinya.

Petani kemudian mengupayakan penanganan hama dengan menaburkan racun di sekeliling tanaman ubi jalar, dan upaya ini pun gagal karena ulat masih menyerang tanaman. Ubi jalar yang telah terserang hama ini berakhir sebagai pakan ternak. Satu per satu petani menghentikan budidaya ubi jalar dan kembali harus memikirkan jalan keluar lewat tanaman lain.

Sebagaimana sebelumnya, para petani Desa Ranga hanya bisa mengatasi persoalan yang menimpa tanaman mereka dengan bahan kimia. Ketika itu pun gagal, di tengah jepitan kebutuhan sehari-hari, pilihan yang tersisa bagi mereka adalah beralih ke tanaman lain.

Pada tahun 2017, harga jagung hibrida di Desa Ranga melonjak menjadi Rp2.500 per kilogram, dari yang sebelumnya hanya beringsut di kisaran harga Rp1.000 sampai 1.500 per kilogram. Kenaikan harga jagung hibrida untuk pakan ternak ini memuaskankan para petani hingga akhirnya menetapkan tanaman jagung jenis ini sebagai tanaman utama, pengganti padi maupun kakao yang sudah mengalami banyak masalah.

Tahun itu juga terjadi fenomena luar biasa ketika sebagian besar perantau pulang kampung. Rupanya mereka tergoda untuk mengusahakan tanaman jagung setelah mendengar kabar tentang

“sepeda motor dan *smartphone* baru” yang para petani Ranga miliki.

Hasil panen melimpah dan harga menjanjikan membuat para petani Ranga kemudian berfokus mengusahakan jagung hibrida. Beberapa petani bahkan tidak lagi mengurus kebun cengkeh sehingga kebun-kebun cengkeh mereka terabaikan. Begitupun dengan kacang tanah, yang turut membantu kehidupan petani pada masa-masa krisis padi dan kakao, mereka tinggalkan dan menggantinya dengan jagung hibrida. Para petani yang ingin meningkatkan hasil panen pada akhirnya melakukan pembukaan lahan-lahan baru untuk memberi ruang bagi jagung hibrida. Luas kebun jagung di Desa Ranga, berdasarkan analisis citra drone, kini mencapai 300 hektare.

Huti, petani sekaligus pedagang jagung hibrida, menceritakan bagaimana harga jual jagung hibrida sempat melonjak pada tahun 2017. Menurutnya, harga jagung di Desa Ranga sangat mudah berubah-ubah, bahkan itu bisa terjadi setiap bulan. Ia bercerita bahwa harga jagung sempat kembali menyentuh harga Rp2.000 per kilogram pada masa panen raya karena jumlah produksi yang melimpah, biasanya terjadi saat musim penghujan. Sedangkan pada musim kemarau, tepatnya pada periode tanam kedua antara Oktober dan Desember, harga jual jagung hibrida menyentuh harga tertingginya di kisaran harga Rp 4.900 per kilogram. Harga jagung pada periode tanam pertama yaitu antara Februari sampai April mencapai Rp. 3.800 per kilogram. Huti juga menganggap harga jual ini turut dipengaruhi oleh banyaknya kepemilikan usaha ternak.

Harga jual jagung hibrida mendatangkan keuntungan yang besar bagi petani Ranga. Mustakim salah satu warga Ranga bahkan mengatakan bahwa di antara semua tanaman yang pernah mereka usahakan di Ranga, jagung hibrida yang paling menguntungkan. Hasil penjualan jagung dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan petani dapat membeli berbagai macam kebutuhan tersier, seperti sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak dan *smartphone*.

Namun persoalan baru sepertinya akan mendatangi petani, sekali lagi. Pada akhir tahun 2021, jagung hibrida mulai menunjukkan sejumlah gejala akan datangnya krisis di masa mendatang. Beberapa petani yang menanam jagung hibrida mulai mengeluhkan munculnya penyakit-penyakit pada buah jagung

yang akan mereka panen, gejalanya berupa jamur berwarna putih yang terdapat pada buah jagung.

Dengan pengalaman krisis pada tanaman padi dan kakao, petani Ranga tentunya tidak ingin merasakan pil pahit yang sama. Mereka saat ini mulai dengan mencoba mengganti-ganti benih jagung sembari berharap menemukan varietas yang bisa selamat dari kondisi fisik Desa Ranga. Namun sepertinya usaha ini belum bisa menjamin keamanan komoditi utama mereka.²

Mereka butuh jalan keluar yang lebih kokoh. Solusi dengan mencoba berbagai bahan kimia untuk mengusir hama dan mengganti tanaman selama ini belum berhasil mengamankan kehidupan mereka dari krisis.

Khalid tiba di Ranga pada November 2020. Ia memanfaatkan acara *ma'damulu*, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk berkenalan dengan banyak warga dan pemerintah desa yang hadir. Ia datang sebagai pendamping lapangan Program Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan, program kerjasama Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*) dan KAPABEL (Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan).

Pagi itu, sekitar pukul 11, dengan setelan pendaki gunung, menggendong tas besar, Khalid masuk ke dalam masjid di kampung Ranga Baru, tempat penyelenggaraan acara. Ia bertemu banyak warga Desa Ranga di sana. Rangkaian acara dimulai dengan *ma'barasanji* (duduk melingkar membacakan sejarah dan pujian kepada Nabi Muhammad), lalu berlanjut dengan ceramah agama singkat oleh seorang pria usia paruh baya. Setelah itu, Camat Enrekang memberikan sambutan, dan di akhir sambutannya ia memperkenalkan Khalid sebagai orang yang akan tinggal di desa untuk “program pemberdayaan masyarakat desa”.

² Selain itu, pada awal tahun 2022, para petani Ranga mulai mencoba menanam kacang kedelai setelah mengikuti penyuluhan dan menerima bantuan benih dari Dinas Pertanian Enrekang.

Lebih lengkapnya, program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang rentan terhadap efek dari perubahan iklim agar memiliki daya tahan (*resilience*).

KAPABEL mendekati persoalan di Desa Ranga dengan mengampanyekan penganekaragaman pangan, khususnya dengan memanfaatkan pangan hutan. Untuk itulah, Khalid mengawali kegiatan dengan mengamati deretan persoalan pertanian yang Desa Ranga hadapi dan menyelidiki potensi pangan hutan yang tersedia di Desa Ranga, mempertimbangkan jenis pangan apa saja yang menjadi permintaan para petani Ranga.

Setelah melakukan pengamatan terhadap tanaman-tanaman hutan yang potensial untuk petani kembangkan sebagai sumber pendapatan baru. Dari sanalah ia menemukan sejumlah tanaman seperti *sikapa'* (gadung), aren, jahe, sukun, dan kemiri. Bersamaan dengan itu Khalid mengajak petani Desa Ranga untuk membentuk kelompok Tani Hutan, dalam kerangka Perhutanan Sosial, khususnya dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Berhasil membentuk 6 KTH, dengan total jumlah anggota 203 secara bertahap sejak Desember 2020 sampai Januari 2021. Enam KTH ini tergabung dalam dua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut); Salu Bulu dan Sipatuju. Masing-masing Gapoktanhut merupakan gabungan dari tiga KTH.

Para anggota dan pengurus KTH kemudian mulai melakukan pertemuan-pertemuan rutin membicarakan pengajuan usulan untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, untuk pengajuan usulan tersebut, mereka mulai berdiskusi tentang tanaman-tanaman potensial yang bisa mereka kelola sebagai kelompok.

Sementara menunggu proses birokrasi yang panjang untuk mengeluarkan persetujuan pengelolaan HKm, anggota juga merencanakan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang baru bisa resmi dibentuk setelah terbitnya persetujuan KLHK untuk pengelolaan HKm. Pada tahap inilah mereka mulai membicarakan komoditi apa saja yang kelak akan mereka kelola sebagai kelompok. Mereka mulai mengidentifikasi

tanaman-tanaman yang bisa mereka kelola.

Untuk memilih deretan komoditas ini, KAPABEL mengajak warga untuk mempertimbangkan kemampuan mereka beradaptasi terhadap kondisi ekologis yang semakin labil. Dengan kata lain, apabila mereka kelak berhadapan dengan krisis tanaman utama, sebagaimana yang berulang kali mereka hadapi—termasuk jagung, mereka akan punya usaha tani alternatif yang bisa menjadi penyangga yang lebih kokoh. Alternatif ini lebih kokoh apabila bisa bertahan menghadapi kegagalan cuaca, salah satu dampak perubahan iklim yang kerap mereka alami. Kegagalan cuaca antara lain bisa menyebabkan kekeringan, angin kencang, dan curah hujan tinggi—yang juga bisa mengaktifkan hama dan penyakit.

Awalnya petani setempat menyatakan tertarik untuk mengembangkan tanaman *sikapa'* (gadung), tetapi setelah melihat potensi pasarnya yang cenderung menurun terutama pada masa pandemi Covid-19, pilihan ini dibatalkan. Petani kemudian beralih pada beberapa alternatif tanaman.

Di antara tanaman yang Khalid identifikasi yang bisa KTH kembangkan, mereka antara lain mengusulkan pengembangan aren, jahe, sukun, dan kemiri. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan segala masukan, para petani bersepakat untuk mengarahkan perhatian pada kemiri.

Menurut mereka, kebanyakan petani masih punya lahan-lahan kemiri yang mereka warisi dari leluhur. Meskipun semua kebun kemiri berada di kawasan hutan lahan-lahan ini masih bisa mereka manfaatkan dengan memungut bijinya. Cara pemanfaatan seperti ini juga tidak melabrak aturan-aturan yang telah pemerintah tetapkan untuk kawasan hutan negara, yang antara lain hanya dapat dimanfaatkan tanpa menebang tegakan.

Pemeliharaan dan pengolahan kemiri juga bukan pekerjaan asing bagi para petani Ranga. Kemiri sudah lama mereka usahakan sebagai salah satu gantungan hidup, terutama untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang. Sebagian bahkan telah mereka tebang untuk menanam jagung. Mereka hanya mengabaikannya, untuk sementara, ketika sumber-sumber keuangan lain datang silih berganti sejak masa jaya cengkeh, lalu kakao, dan kini jagung

hibrida.

Selain itu, pasar biji kemiri belum pernah terhenti, terus terbuka bagi petani. Di sini peran KAPABEL cukup besar untuk mencari informasi tentang sejumlah tempat pembelian kemiri, di Kabupaten Pinrang. Dan ternyata mereka, pengusaha kemiri, memang masih bisa membeli lebih banyak kemiri daripada yang sudah ada pada saat itu. Informasi ini meyakinkan petani untuk kembali mengembangkan kemiri mereka.

Usai memutuskan untuk mengolah dan menjual kemiri, masih sembari menunggu izin pengelolaan HKm, setiap Gapoktanhut juga membentuk kelompok yang terpisah dari Gapoktanhut. Kelompok baru ini mereka rencanakan untuk menjadi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bila kelak persetujuan atau izin mereka sudah keluar. Mereka menamainya kelompok "Home Industry" yang sebagian besar beranggotakan perempuan.

Pengusahaan kemiri di Desa Ranga khususnya pada proses pemecahan cangkang masih menggunakan cara tradisional, orang setempat menyebutnya *makkaraba*'. Proses memecahkan cangkang kemiri ini menggunakan alat dari pelepah pinang yang bentuknya memanjang mirip pentungan yang di ujungnya terdapat lubang untuk menjepit kemiri yang kemudian dipukulkan ke batu atau besi. Pekerjaan ini memang secara tradisional dilakukan oleh perempuan.

Makkaraba' menurut orang Ranga punya sejumlah kekurangan, antara lain butuh tenaga yang besar dan waktu yang panjang untuk melepas biji kemiri dari cangkang. Dengan cara ini petani biasanya menghabiskan dua sampai tiga hari untuk menghasilkan sekarung atau 20 kilogram kemiri. Kendala lainnya ialah cukup besarnya kemungkinan biji kemiri pecah berkeping-keping (tidak bulat utuh), yang akan menurunkan harga jual.

KAPABEL kemudian mencoba mencari jalan keluar atas kendala yang petani hadapi. Khalid mencari alat-alat yang bisa menyelesaikan persoalan itu, lalu mengusulkan kepada kelompok alat pemecah kemiri dan mesin pendingin kemiri. Alat pemecah kemiri dapat memecahkan kemiri dengan kapasitas 1 ton per jam dan mesin pendingin berguna untuk mengurangi kemungkinan

biji kemiri pecah saat dimasukkan ke dalam alat pemecah. Anggota kelompok setuju, Khalid menyampaikan kepada KAPABEL untuk mengadakan dua alat tersebut.

Akhirnya, pada Februari 2022, para anggota KTH mulai mengumpulkan biji kemiri mereka untuk diolah oleh kelompok "Home Industry", dan pada Maret 2022, kelompok "Home Industry" mulai mengolah kemiri dengan mesin pemecah dan lemari pendingin kemiri. Dengan begitu, para petani Ranga dapat mengurangi beban tenaga sekaligus waktu kerja untuk menghasilkan biji kemiri.

Biji-biji kemiri kemudian mereka kirim ke Pinrang, dan perusahaan di sana mengemasnya bersama biji kemiri dari daerah-daerah sekitar, dan di bawah merek "Cahaya Kemiri" biji-biji itu berlayar ke Hongkong.

Tumpukan Masalah Itu Terus Mengalir dari Hulu

Pettarani Sastranegara

Jauh dari hulu yang bermula di Kabupaten Toraja Utara, Sungai Saddang mengalir sembari menggerus kerikil, pasir, dan lumpur. Ia menyusuri dua kabupaten lain sebelum akhirnya tiba di muara, di Kabupaten Pinrang.

Aliran sungai purba ini terbelah sebelum tiba di Paria dan Bababinanga, dua desa di Pinrang tempat sungai ini bermuara. Satu anak sungai mengarah ke timur, ke Bababinanga, dan yang lainnya mengalir ke barat dan membelah Paria.¹ Di selatan kedua desa terdapat pantai Selat Makassar.

Perjalanan aliran sungai ini, yang memindahkan lebih dari 300 ton material per tahun,² berlangsung sepanjang masa, menciptakan

¹ Data primer yang diolah tahun 2021.

² Arsyad et al., 2020. hl. 48-62.

gerusan di satu kelokan sungai dan timbunan di kelokan lain, yang di kawasan hilir bahkan membentuk dataran-dataran baru. Orang setempat menyebut daratan ini sebagai tanah timbul.

Gerusan dan tanah timbul ini membawa nasib berbeda bagi dua desa bertetangga di Kabupaten Pinrang: menenggelamkan banyak lahan di Desa Bababinanga dan menimbulkan daratan baru di Paria.

Pada 1980-an banjir beberapa kali datang ke Bababinanga mengikis tambak warga yang berada di tepian sungai. Seorang warga Bababinanga menuturkan bahwa banjir pada masa itu biasanya surut dalam waktu yang relatif singkat, meski tambak-tambak milik warga tetap mengalami pengikisan. Banjir berasal dari luapan sungai Saddang kala musim hujan tiba.

Sebaliknya, sejak awal 1990-an, bagian muara di Paria mulai tertimbun sedimentasi dalam jumlah besar. Timbunan ini membuka peluang bagi warga untuk memanfaatkannya sebagai tambak. Sementara itu, tambak-tambak di Bababinanga kian terkikis, dan banjir yang datang menambah luas sungai secara bertahap, sampai pada akhir periode 1990-an anak sungai di Bababinanga bertambah.

Seorang warga lelaki Katompurang, desa tetangga tepat di utara Paria, juga di tepi Sungai Saddang, menuturkan kesaksiannya.

“Dulu itu Sungai Saddang lebarnya kurang dari 50 meter bahkan pada saat kondisi surut warga bisa menyeberangi sungai dengan jalan kaki untuk pergi ke desa. Bahkan dulu waktu saya masih SD pada 1990-an tanah timbul itu saya tempati main bola bersama teman-teman.”

Pada akhir 1990-an ini pula orang-orang Paria menyaksikan tubuh sungai yang menyempit dan menyebabkan terjadinya banjir beberapa kali di desa mereka.

Meski sama-sama kebanjiran sejak 1980-1990-an, Bababinanga hanya mendapatkan luapan air, sedangkan Paria menerima sedimentasi yang akan menjadi tanah timbul pada akhir 2000-an dan menaikkan tinggi permukaan tanah di pinggiran sungai.

Pada tahun 2000, pemerintah Desa Paria menginisiasi pembangunan tanggul di bagian utara desa guna memperkecil

arus sungai yang mengikis daratan Paria. Melalui bantuan BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), pembangunan tanggul ini terlaksana.

Pembangunan tanggul ini sejalan dengan keinginan pemerintah kabupaten yang berencana menjadikan Bababinanga sebagai pusat kawasan tambak. Tanggul diharapkan membuat arus sungai lebih banyak mengalir ke Bababinanga dan dapat mengairi tambak milik warga.

Sayangnya setahun kemudian, 2001, volume sedimentasi yang tertahan di tanggul sudah berlebih. Tanggul pun jebol dan membawa arus sedimentasi ke Paria sehingga daratan kini menjadi lebih tinggi.

Pada 2010, air bah menerjang Bababinanga dan menenggelamkan permukiman dan tambak. Paria yang sudah menampung sedimentasi sejak lama mendapat bukti dari keyakinan mereka, Sungai Paria mengecil seiring meluasnya tanah timbul.

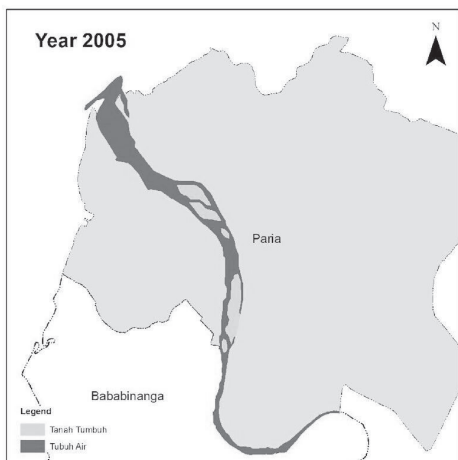
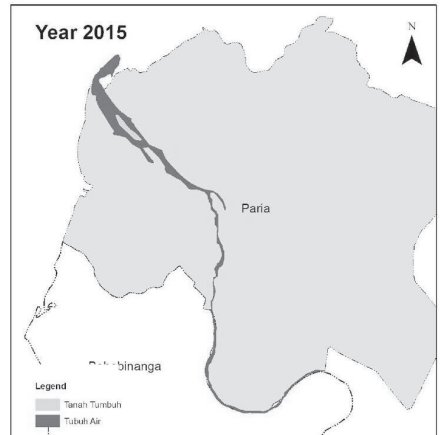
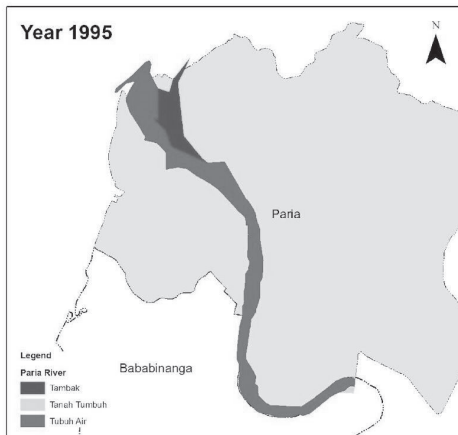
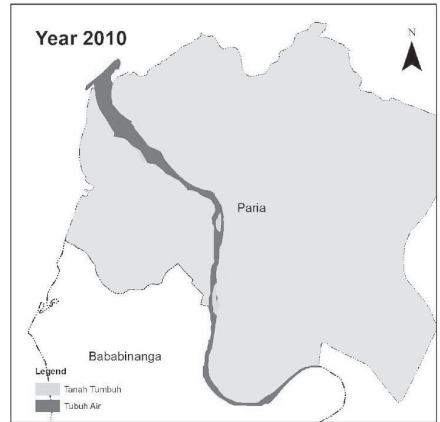
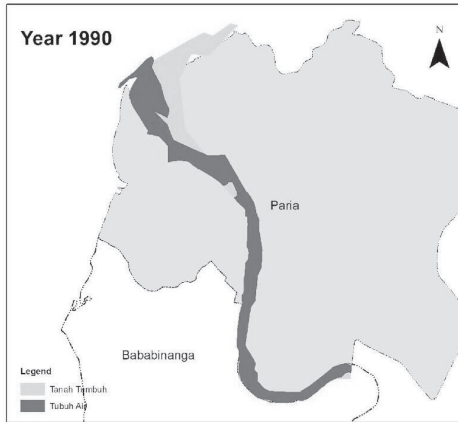
Kurun 2010-2015 menjadi momentum perpisahan nasib yang gamblang antara Paria dan Bababinanga, banjir bandang menerjang Bababinanga dan menenggelamkan tambak serta pemukiman warga. Sedangkan di Paria banjir tidak lagi datang karena sebagian luas sungai telah berubah menjadi daratan yang lebih tinggi dari Bababinanga.

Rentang sejarah perubahan di kedua desa, berupa peralihan aliran sungai dan pertumbuhan daratan, membawa beraneka efek turunan bagi masing-masing, sosial, ekonomi, dan ekologis.

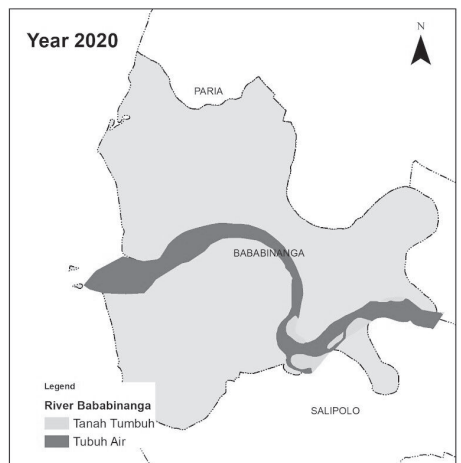
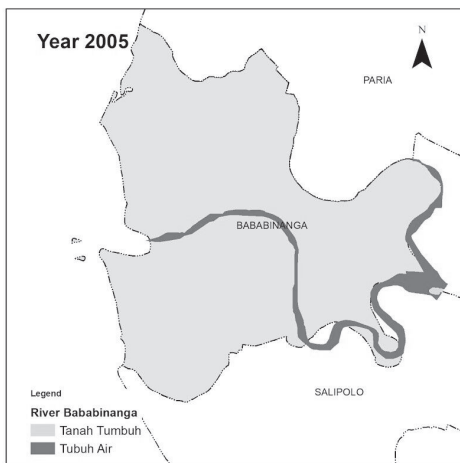
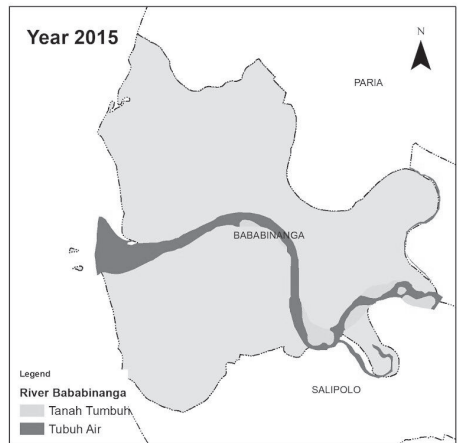
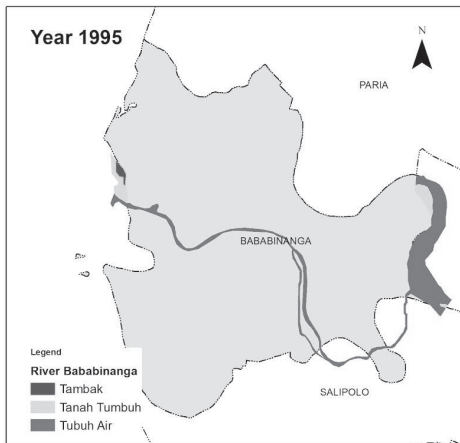
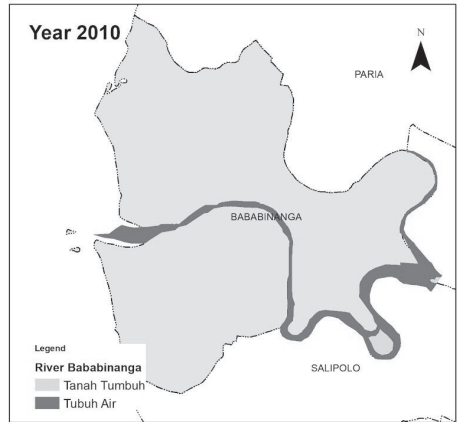
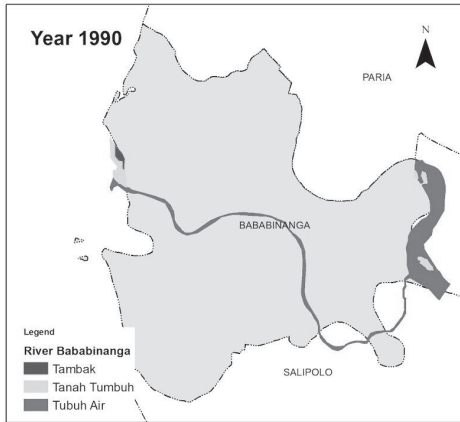
Tanah yang Timbul dan Tenggelam

Paria, 1940-1950-an, orang-orang yang kini disebut sebagai kerabat *arung*, pemimpin tradisional masyarakat setempat, mulai mengklaim *ongko* terhadap tanah timbul. *Ongko* adalah cara warga setempat untuk menyebut hak kepemilikan sebidang tanah. Hak ini diperoleh oleh orang pertama yang membuka sebidang tanah, sebuah cara yang mendapat pengakuan oleh masyarakat setempat hingga sekarang. Tanah itu kemudian bisa diwariskan secara turun temurun. Pada masa itu, hak membuka lahan di tanah timbul, juga

Paria



Bababinanga



hutan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari kelas *arung*.

Tanah-tanah para kerabat *arung* biasanya dibuka di tepi sungai Paria, tanah pertanian selalu butuh sumber air. Tanah-tanah timbul yang terus bertumbuh di tepi sungai, banyak yang berada di sisi tanah-tanah *ongko*, menambah luasan tanah-tanah kerabat *arung*. Di sini, aturan masyarakat setempat mengatur siapa yang memiliki lahan paling dekat dengan lokasi lahan timbul, merekalah yang berhak mengelola tanah itu.

Saat berada di Bababinanga, kerabat *arung* dalam keadaan mengungsi karena sedang terjadi perang sipil yang juga melibatkan pasukan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar dan pemimpin-pemimpin tradisional. Kerabat *arung* berasal dari bagian utara Sulawesi Selatan yang merupakan masyarakat petani. Saat tiba di Bababinanga yang hidup sebagai nelayan, kerabat *arung* rupanya kesulitan mengikuti kebiasaan nelayan setempat, karena itu mereka membuka lahan pertanian di Paria.

Pada saat itu Paria masih berupa hutan lebat yang minim penghuni. Para kerabat *arung* masih menetap di Bababinanga ketika mereka mulai membuka lahan. Pada dasawarsa 1960-an banyak kerabat *arung* pindah dan menetap di Paria untuk mengelola lahan. Petani penggarap dalam jumlah lebih besar mengiringi perpindahan mereka. Permukiman pun bertumbuh di Paria.

Memasuki dasawarsa 1990-an, tubuh sungai Paria mulai mengalami penyempitan ditandai munculnya sedimentasi di kelokan-kelokan sungai. Permukaan tanah di Paria perlahan naik.

Perubahan berjangka panjang ini perlahan memunculkan kesepakatan di antara orang-orang Paria bahwa seseorang bisa mendapat hak kepemilikan tanah jika dia telah menggarap lahan itu selama 20 tahun lebih. Kesepakatan ini, dan keyakinan bahwa air bah dari hulu akan datang dan mengubah arus sungai ke Bababinanga dan menciptakan daratan baru, mendorong pudarnya kekuasaan tradisional kerabat *arung*.

Setelah berpuluh tahun mengamati gelagat sungai, orang-orang Paria dan Bababinanga punya kepercayaan bahwa air bah dari hulu akan datang setiap 20-30 tahun, dan kedatangan air ini akan membuat arus sungai berpindah dari Paria ke Bababinanga,

maupun sebaliknya.

AH,³ misalnya, punya tanah *ongko* warisan dari orang tuanya, dan tenggelam pada dasawarsa 1990-an. Tanah warisan itu perlahan muncul kembali pada dasawarsa 2010-an, tapi AH tidak bisa lagi mengklaim tanah warisan itu, karena warga lain telah mengelola tanah di samping tanah AH yang baru timbul kembali. Kita tahu, berdasarkan kesepakatan di desa, tanah timbul menjadi milik orang yang mengelola tanah paling dekat dari lokasi tanah timbul. AH kehilangan tanah warisannya.

Kasus AH berkebalikan dengan DH salah seorang warga Paria yang awalnya hanya menggarap tanah seluas satu hektare yang sudah dikelola sejak tahun 1990-an. Tanah itu bukan miliknya, dia petani penggarap. Tanah yang dia garap tepat berada di pinggir sungai yang menjadi lokasi penyeberangan perahu antar desa. DH sejak 1990-an menanam jagung dan pisang di tanah itu.

Pada kurun 2000-an, sebagian petani Paria, termasuk DH, yang memiliki tanah di pinggir sungai berupaya mempercepat kedatangan daratan baru. Mereka tanam beraneka tanaman yang dapat menahan erosi di sekitar pinggir sungai, lalu menumpuk batang-batang pisang yang telah dipanen ke sungai, batang-batang ini kemudian menjadi penahan bagi sedimentasi di Sungai Paria.

DH dan warga yang mengelola lahan di tepi sungai mulai menanam rumput raja di pinggir lahan untuk mencegah erosi yang mengikis lahan mereka. Namun ini belum cukup untuk mencegah air bah yang mengalir deras ke muara kala musim penghujan tiba, menggerus dan menenggelamkan tanah-tanah di tepi sungai.

Banjir beberapa kali datang dan menenggelamkan lahan garapan milik DH. Ketika banjir melanda, hampir pasti tanaman jagung milik DH terendam sampai mendekati pucuk. Ketika banjir sudah surut, tanaman ini tidak dapat bertahan lama dan meranggas beberapa hari kemudian. Untuk menyiasati ini, DH lalu membangun

³ Penulisan nama tokoh menggunakan inisial adalah orang-orang yang memiliki konflik atas tanah di desa, untuk melindungi identitas pribadi mereka maka nama disamarkan.

tanggul dari tanah di sekitar lahannya guna menjadikannya tambak. Tambak ini juga berfungsi menjauhkan pengikisan langsung dari sungai ke lahan garapan DH. Di kemudian hari tambak ini akan menjadi tempat sedimentasi dan berubah menjadi tanah timbul.

Banjir yang berasal dari luapan Sungai Saddang sebenarnya dapat diminimalisir dengan cara mengeruk sedimentasi yang memperkecil luas sungai, agar volume air sungai tetap dapat mengalir, tapi keinginan untuk mendapatkan lahan dari tanah timbul tampaknya mencegah pilihan ini. Akhirnya tanah terus bertumbuh seiring susutnya sungai.

Kita tahu Desa Paria mengalami penyempitan luas sungai, sedangkan Bababinanga mendapat tambahan luas sungai sejak 1990-an. Tambahan lahan ini memperluas kepemilikan tanah orang-orang Paria yang sebelumnya memiliki tanah di pinggir sungai. Tanah itu mereka manfaatkan untuk membuat tambak dan persawahan. Arus sungai yang relatif kecil dan air permukaan sungai yang tidak begitu tinggi menciptakan tempat ideal bagi tambak. Kawasan sepanjang pinggir sungai sampai pertemuan dengan laut didominasi tambak dan persawahan.

Tahun demi tahun berlalu, lahan kelola milik DH terus bertambah sedepa demi sedepa, dari 1 menjadi 3 hektare. Pertambahan tanah ini membawa masalah bagi DH. Orang-orang Bababinanga yang memiliki tanah berseberangan dengan tanah milik DH di Paria tertarik untuk mengklaim tanah timbul itu, semakin luas tanah berarti semakin banyak hasil panen. Perselisihan antarwarga desa yang saling bersebelahan ini mendorong pemerintah desa bertindak dan memberi pengakuan hak milik kepada DH. Tanah timbul itu memang lebih menjorok ke lahan milik DH dan dataran Desa Paria.

Warga Paria mulai menikmati kelebihan tanah yang mereka dapat dari tanah-tanah timbul, luas tanah timbul yang berada di Paria rentan 1990-2000 sekitar 35 sampai 44 hektare.⁴ Selama rentang itu juga banjir mulai berkurang di Paria.

⁴ Data primer diolah tahun 2020.

Situasi menjadi lebih rumit ketika makelar tanah mulai mondar-mandir di Paria. Makelar tanah tahu, tanah timbul adalah tanah tanpa hak milik legal, kesempatan untuk membawa tanah itu menjadi tanah sengketa terbuka lebar. DH pun harus berseteru dengan makelar tanah yang ingin mencaplok lahannya. Dengan modal akta yang entah keluar dari mana, makelar tanah menjual tanah timbul yang dikelola DH. Tanah itu kemudian dibeli oleh orang dari luar desa. DH tak lagi berurusan dengan makelar, melainkan dengan si pembeli. Tanah itu menjadi sengketa bertahun-tahun.

DH tetap bersikukuh bahwa itu adalah tanahnya, begitupun dengan si pembeli, makelar tanah yang menjual tanah DH tanpa persetujuannya kini hilang. Sekali lagi, DH hanya bisa berharap dari dukungan warga Paria yang bersimpati padanya. Pembeli tanah beberapa kali menghampiri tanah milik DH, cekcok tidak terhindarkan, baru bisa mereda setelah kepala desa memberi keterangan kalau tanah itu memang milik DH.

Meski sekali lagi DH berhasil memenangkan sengketa atas lahannya, berkat dukungan warga dan pemerintah Desa Paria, kasus ini menunjukkan betapa erosi dan sedimentasi Sungai Saddang, yang menciptakan tanah timbul, telah menimbulkan kerentanan persoalan ekonomi dan sosial bagi warga desa.

Setelah banjir bandang 2010, kehidupan warga Bababinanga benar-benar berubah, tambak dan permukiman yang tenggelam membuat mereka harus memikirkan ulang bagaimana cara menyambung hidup.

NA sudah puluhan tahun tinggal di Bababinanga, punya tambak 4 hektare yang didominasi ikan bandeng. Seperti warga Paria, warga Bababinanga juga percaya suatu saat air bah akan datang. NA sudah meyakinkannya sejak lama, namun dia hanya punya tambak. Untuk bertahan, NA sudah mengikatkan rumah panggunnya ke pasak yang ditanam di tanah agar tidak terbawa hanyut arus sungai yang deras. Untuk tambaknya, dia hanya bisa berharap agar air segera surut.

Tanah di Bababinanga perlahan menjadi lebih rendah dibanding tanah di Paria, sedimentasi di Paria turut menambah tinggi tanah, dan pada tahun 2010, air yang telah diprediksi itu benar-

benar datang. Hujan dengan curahan tinggi yang berlangsung beberapa hari di Enrekang hanya butuh sehari perjalanan dan menenggelamkan Desa Bababinanga.

Tambak, rumah, dan harta benda lainnya tersapu luapan air sungai. Dalam sehari semua tambak milik NA tenggelam. Dalam kurun 2010-2011 intensitas hujan terus tinggi. Banjir berkali-kali menenggelamkan pinggiran Sungai Bababinanga, sampai pinggiran sungai itu benar-benar tidak terlihat lagi-setidaknya sampai tahun 2022.

NA yang awalnya memiliki tambak seluas 4 hektare telah kehilangan 3,5 hektare, dan kemungkinan luas Sungai Bababinanga terus bertambah seiring tingginya curah hujan di hulu akibat perubahan iklim. NA hanya bisa menunggu waktu sampai semua lahan miliknya tenggelam.

Seusai banjir 2010, sebagian warga Bababinanga terpaksa meninggalkan desa. Sebagian pindah ke Desa Salipolo di timur Bababinanga, sebagian lainnya-seperti NA pindah ke Desa Paria di barat. Sebelum memutuskan pindah, NA terlebih dulu menjual perahunya. Kita tahu, sebagian warga Bababinanga memang bekerja sebagai nelayan.

Warga Bababinanga yang pindah ke Paria mesti melewati sejumlah hambatan untuk memulai penghidupan di tempat baru. Lahan-lahan di Paria sudah punya pemilik sehingga untuk bisa mengelola tanah seorang penggarap harus mendapatkan izin dari pemilik melalui orang kepercayaannya maupun membayar uang jaminan. Uang jaminan ini diberikan kepada pemilik tanah yang akan mengembalikan uang itu kepada pengelola jika suatu saat pemilik ingin mengelola tanahnya sendiri. Dengan uang jaminan ini penggarap dan pemilik menjalin hubungan bagi hasil dari lahan yang dikelola. Sistem bagi hasil yang mereka terapkan ialah dengan masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian dari hasil panen setelah menyisihkan biaya produksi.

NA tidak punya apa-apa lagi setelah menjual perahu dan tambak yang telah berubah menjadi sungai. NA memutuskan pindah bersama keluarganya dan menjadi petani penggarap di Desa Paria.

Sejak 2019, di Paria, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak menentu turut mengakibatkan kerugian bagi para pemilik tambak. AJ, seorang warga Paria menceritakan bagaimana ia mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, mengakibatkan ikan Bandeng yang dibudidayakan mati. Pada saat malam terjadi hujan deras, pada siang hari matahari begitu terik, dan tidak ada angin berhembus, ini sangat mempengaruhi kualitas air. Ikan di tambak akan mendadak mati saat cuaca tidak menentu.

Tanpa lahan milik sendiri, anak NA pun harus merantau. Saat masih punya tambak, anaknya membantu bekerja di tambak. Setelah tambak lenyap, anaknya pun harus mencari pekerjaan lain di Kalimantan.

Orang-orang Bababinanga yang telah lebih dulu pindah ke Desa Salipolo dengan dukungan pemerintah kabupaten kembali memulai penghidupan dengan membuat tambak. Salipolo terletak di seberang Sungai Bababinanga, seperti saat masih di Bababinanga, mereka membuat tambak di pinggiran sungai.

Sebagian warga yang tidak ikut ke Salipolo punya ketakutan Salipolo akan bernasib sama seperti Bababinanga melihat sudah ada anak sungai yang muncul di sana, dan dataran Paria merupakan dataran tertinggi di antara ketiga desa. Pilihan menjadi penggarap lebih aman ketimbang harus menghadapi banjir berkali-kali, begitu pikir mereka yang pindah ke Paria.

Investasi Berkedok Normalisasi

Sedimentasi meninggalkan cerita getir tentang berderet bencana dan krisis yang dialami warga di bantaran Sungai Saddang. mereka pun terus mencari jalan keluar demi mengurangi dampak dari perubahan aliran sungai.

Warga dan pemerintah telah menjalankan sejumlah upaya mitigasi masing-masing. Dalam kurun 2005-2013, pemerintah membangun tanggul di sepanjang DAS Saddang, utamanya di desa-desa yang terdampak banjir.⁵ Pada 2013 tanggul itu memagari

⁵ Unit Pelaksana Teknis Dinas PSDA Saddang, 2019. *Data Profil Sungai Saddang*.

sungai sepanjang satu kilometer di Desa Salipolo dan satu kilometer di Desa Bababinanga. Tahun 2015, tanggul itu jebol. Pada beberapa titik rawan di Bababinanga tanggul hanya menyisakan bongkahan batu, sebagian besar tanggul sudah hanyut terbawa air.

Desa-desanya di utara Paria dan Bababinanga, seperti Katomporang dan Massewae, mengalami nasib berbeda. Di sana sedimentasi mendorong warga berinisiatif menambang pasir untuk mengurangi volume sedimentasi supaya aliran air tidak terhambat, dan sungai menjadi lebih dalam, sehingga bisa mencegah banjir. Prakarsa ini juga dipicu hadirnya investor yang memberi akses modal pada warga untuk menambang pasir dan menjanjikan penghasilan tambahan. Pada 2015, sudah ada 37 perusahaan penambangan pasir yang beroperasi di sana, dan terus bertambah: pada 2017 menjadi 55 perusahaan dan 2019 menjadi 80.

Penambangan pasir sudah menjadi mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi warga Katomporang dan Massewae. Tingginya permintaan merangsang pertumbuhan penambangan pasir di Kabupaten Pinrang. FJ, seorang pemuda penambang pasir di Desa Massewae, mengatakan, “Semenjak ada tambang pasir di Massewae, tidak pernah lagi terjadi banjir, mungkin karena sungai menjadi dalam sehingga air lancar mengalir.”

AB, pria berusia 24 tahun, membenarkan banjir sudah jarang terjadi di Desa Katomporang sejak adanya penambangan pasir. Mereka menilai, selain mengurangi kejadian banjir, penambangan pasir tidak juga mendatangkan pendapatan baru bagi warga setempat.

Berbagai penelitian menjelaskan penambangan pasir memberikan dampak positif bagi warga karena membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penambangan pasir dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara dan warga di negara-negara berkembang.⁶ Namun perusahaan penambangan pasir di Kabupaten Pinrang tidak membawa pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah.

⁶ Mattamana, B.A., Varghese, S., Paul. 2013. *The Economic Benefits and Costs for Frac-Sand mining in West Central Wisconsin*. Wisconsin towns association and the institute for agriculture and trade policy.

Ini karena sebagian besar perusahaan penambangan pasir tidak memiliki izin beroperasi, atau menambang secara ilegal.

Sementara di tingkat desa, jalan keluar yang sama di satu tempat belum tentu berujung serupa di tempat lain. Bila penambangan pasir bisa membawa untung dan disambut baik di Massewae dan Katompurang, usaha serupa bisa menuai tanggapan berbeda di desa-desa lain. Penambangan pasir, misalnya, menemui penolakan gigih oleh sebagian besar warga di Desa Salipolo, Paria, dan Bababinanga.

Cerita berawal dari prakarsa pemberian izin menambang pasir dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Selain untuk peningkatan pendapatan, pemerintah beralasan bahwa penambangan pasir juga bisa berperan untuk normalisasi sungai, seperti penambangan yang lebih dulu berlangsung di Katompurang dan Massewae. Pada 2017 pemerintah daerah membuka keran investasi bagi investor yang mau menambang pasir di Bababinanga, Paria, dan Salipolo.

Izin penambangan ini tentu menjadi angin segar bagi perusahaan penambang pasir. Menurut para penambang, berdasarkan informasi dari para investor, pasir sungai di Kabupaten Pinrang memiliki kualitas baik. PT Alam Sumber Rezeki (ASR) mendapatkan izin usaha penambangan di Kecamatan Duampanua dengan wilayah usaha seluas 182,46 hektare.

Pada 2019, perusahaan ini mulai mendatangkan mesin-mesin penyedot pasir ke Desa Bababinanga, dan warga segera menyambutnya dengan penolakan keras. Sekitar 300 orang mendatangi kediaman kepala desa untuk menyampaikan penolakan mereka serta mengancam akan membakar alat penghisap pasir apabila tidak ditarik keluar dari Desa Bababinanga.

NW, pria berusia 61 tahun, salah satu warga di desa Bababinanga mengatakan, bahwa mereka tidak menerima sosialisasi mengenai akan datangnya penambangan pasir di desanya. Warga baru tahu ketika melihat peralatan tambang tiba di Bababinanga. Mereka melanjutkan penolakan dengan berdemonstrasi di Kantor Bupati Pinrang. Aksi tersebut membuahkan hasil berupa komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengirim surat kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang agar meninjau

kembali izin penambangan pasir.

Setelah ditolak di Bababinanga pada 2019, pihak perusahaan mendatangkan ekskavator ke Desa Salipolo. Awalnya warga mengira keberadaan ekskavator ini untuk membuat jalan tani, namun mesin penyedot pasir datang menyusul, lalu keduanya bahu membahu mengeruk pasir sungai dengan kawalan polisi.

Mengetahui warga akan menolak penambangan pasir, penambangan sudah membawa perangkat pengaman agar penambangan tidak terganggu. Warga memang tidak akan segan-segan mengusir para penambang dari desa mereka meski tantangan berat sudah siap menghadang.

“Siapa pun warga yang menghalangi penambangan maka akan diproses hukum,” ujar seorang polisi yang dituturkan kembali oleh seorang warga yang menyaksikan kejadian itu.

Aksi penolakan pun kembali terjadi, warga berbondong-bondong mendatangi kantor Camat Cempa–Desa Salipolo berada di Kecamatan Cempa. Mereka menuntut penghentian aktivitas alat berat di Salipolo. Upaya mengusir alat berat terjadi berkali-kali dan perusahaan bersikeras untuk terus menjalankannya. Melihat ini, warga mengancam akan membakar alat berat jika penambangan masih berlanjut.

AH, pria berusia 40 tahun, bercerita, “Kami sudah komitmen, kalau ada ekskavator masuk akan kami usir. Alat berat di lokasi malahan sudah kami siram bensin dan ancam akan membakar, tetapi kami dilarang sama Kapolsek Cempa. Seandainya tidak ada Kapolsek, sudah kami bakar. Kami tidak mau ada aktivitas penambangan karena kampung kami akan rusak dan bisa terkena banjir.”

Penolakan warga terhadap penambangan pasir justru berujung pada panggilan polisi, salah satu warga yang dipanggil adalah NW.

“Saya ditanya polisi, apa alasan saya menghalangi tambang pasir? Dengan tegas saya jawab, perusahaan mana yang saya halangi? Saya tidak pernah menghalangi tambang, yang saya lakukan adalah menolak,” tutur NW.

NW serta warga yang lain tetap teguh menolak penambangan

pasir. Bagi mereka sikap ini adalah upaya mencegah bencana lebih besar datang dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Bagi mereka, penambangan pasir tidak hanya mengurangi sedimentasi, tapi juga akan merembet sampai ke permukiman warga.

Proses panjang penolakan warga akhirnya, pada tahun itu juga, berhasil mendudukkan pihak-pihak yang bertikai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, satu pertemuan menghadirkan pihak-pihak yang bertikai. Pertemuan ini berbuah kesepakatan untuk menghentikan penambangan serta membentuk tim evaluasi izin, dampak sosial, ekonomi serta lingkungan.

Warga yang hadir menuturkan bahwa mereka menutup telinga ketika mendengar pihak-pihak yang menjelaskan tentang manfaat perusahaan tambang jika beroperasi di Desa Salipolo dan Desa Bababinanga. Meskipun normalisasi sungai menjadi alasan pemerintah—alasan yang didukung dengan regulasi, warga tetap menolak penambangan. Mereka khawatir penambangan akan berdampak jangka panjang, mereka bisa kehilangan lahan garapan dan tempat tinggal. Mereka takut akan bernasib sama seperti warga Bababinanga.

Perubahan Iklim dan Upaya-upaya Mengatasinya

Banjir yang menenggelamkan kawasan hilir seperti Bababinanga, dan menciptakan tanah tumbuh di Paria, turut dipengaruhi kondisi di hulu, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang yang mengalami longsor dari waktu ke waktu. Pendamping lapangan KAPABEL di tiga kabupaten itu menyebut keterangan ini, demikian pula data-data statistik. Dalam kurun 2019-2021, Toraja Utara mengalami longsor sebanyak 82 kali, Tana Toraja 104 kali, Enrekang 66 kali.⁷ Karena tingginya intensitas hujan dan pembukaan lahan yang menciptakan lahan terbuka di daerah lereng, longsoran ini terbawa ke sungai sebagai sedimentasi yang

⁷ Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022.

selanjutnya mengalir ke kawasan hilir.

Semakin berkurangnya tutupan lahan menyebabkan tanah mudah lepas, juga menyebabkan iklim lokal menjadi labil karena berkurangnya penyerapan karbon dari pohon yang berujung pada memanasnya suhu. Kondisi ini sudah terjadi dalam skala global, karena itu salah satu jalan keluarnya ialah memulihkan tutupan (rehabilitasi) lahan.

KAPABEL berupaya menumbuhkan semangat warga desa dalam mencegah, menghadapi, serta menanggulangi bencana di desa-desa pesisir Pinrang melalui inisiasi pembentukan dan pengorganisasian kelompok pemuda yang disebut sebagai Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI).

Warga Bababinanga dan Paria bersama KAPABEL dan KPPI lalu mengupayakan perbaikan di daerah pesisir melalui penanaman mangrove pada tahun 2021-dan seterusnya berlanjut.

Sejak 2010, kondisi Bababinanga tidak kunjung membaik, kehilangan tambak terus bertambah, selain menggerus daratan, juga menggerus kehidupan warga sekitar yang kehilangan rumah dan lahan yang merupakan harta terakhir mereka.

Perubahan bentang alam ini juga mengakibatkan mereka harus beralih profesi, mayoritas warga desa Bababinanga dan Paria berada pada rentang usia lanjut, tidak banyak pilihan yang mereka punya. Jika kondisi ini terus berlanjut, desa-desa ini akan kehilangan pemuda karena lahan dan pekerjaan akan terus menyusut. Migrasi adalah pilihan paling masuk akal ketimbang bertahan di lahan sempit yang rentan bencana, seperti yang dilakukan anak NA.

KAPABEL berusaha memfasilitasi kebutuhan pemuda di desa melalui kerja sama dengan KPPI yang berada di Paria, Bababinanga, Salipolo, Katompurang, dan Massewae.

Pengalaman mereka hidup bersama bencana sudah terakumulasi, sudah menjadi bagian dalam hidup mereka. Karena itulah mereka menyambut baik upaya perbaikan lingkungan. Dengan antusias orang-orang muda di lima desa yang melibatkan diri dalam pengembangan usaha kelompok, pengembangan kelompok pemuda, dan melakukan kerja-kerja perbaikan lingkungan.

Mereka menanam rumput raja dan mangrove di tepi sungai di Paria, Bababinanga, dan Salipolo. Warga desa menyambut baik kerja ini karena sejak lama mereka telah memikirkannya tapi terhambat akses untuk mendapatkan bibit mangrove. Melalui bantuan dan pendampingan oleh KAPABEL, warga mulai menanam.

KPPI dan KAPABEL bekerjasama membangun pembibitan mangrove sejak bulan Juni 2021. Selain memasok bibit mangrove pembibitan juga menambah pendapatan. Pada bulan September, pembibitan sudah bisa memberikan pemasukan kepada para anggota melalui usaha penjualan bibit mangrove.

Kerjasama ini pun membangun kelompok usaha yang melibatkan ibu-ibu. Kelompok usaha ini memproduksi keripik salak dan rumput laut dalam bentuk kemasan dan sudah memasarkannya. Upaya ini pun berjalan cukup mulus lancar dengan para perempuan desa menyambut antusias. Kurangnya penghasilan akibat susut dan labilnya pendapatan dari tambak telah lama memaksa mereka mencari-cari sumber penghasilan lain.

Program yang berlangsung di desa mengalami keberhasilan berkat antusias warga, namun program yang melibatkan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Ini bisa terlihat pada upaya perbaikan sistem peringatan dini di Bendungan Benteng.

Bendungan Benteng terletak di Kecamatan Patampanua, Pinrang, dibangun sejak era kolonial Belanda. Bendungan ini mengendalikan volume air Sungai Saddang yang masuk ke Pinrang dan membilas sedimen yang tertahan di pintu air agar bisa mengurangi sedimentasi yang terbawa dari hulu. Bababinanga dan Paria yang berjarak sekitar 33 kilometer di hilir bendungan ini bisa sangat tertolong bila di sana sistem peringatan dini bekerja lebih baik.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai Saddang sebagai pengelola Bendungan Benteng punya sistem peringatan dini ketika harus membuka pintu air karena volume air yang tertampung sudah terlalu banyak. Sistem peringatan dini ini berupa surat kepada pemerintah desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Saddang.

Warga Bababinanga dan Paria mengeluhkan sistem peringatan

dini karena lambatnya informasi peringatan dini tiba di desa mereka. Kelambanan ini terjadi karena surat penyampaian biasanya tiba sehari setelah pintu air bendungan dibuka.

Jarak bendungan dari desa mereka sekitar 33 km, dan hanya perlu hitungan jam bagi air dari bendungan tiba di desa mereka. Saat bendungan dibuka karena volume air sudah terlalu banyak—ketika musim penghujan, hampir pasti desa mereka akan banjir. Saat surat peringatan dini tiba di Bababinanga, rumah dan tambak warga sudah banjir.

Karena itu, warga sejak lama menginginkan sistem peringatan dini yang cepat, selain upaya normalisasi sungai agar abrasi dan banjir yang menimpa Bababinanga tidak memusnahkan desa itu di masa mendatang.

Dalam kondisi inilah KAPABEL mengajukan permohonan izin kepada BPSDA untuk pemasangan alat pendeteksi gerak pintu air di Bendungan Benteng secara *real-time*, yang nantinya akan akan terhubung dengan sistem informasi iklim berbasis DAS yang dibangun oleh KAPABEL. Sistem ini dapat membangun prakiraan cuaca dan mendeteksi gerakan pintu air sehingga ketika pintu air terbuka, sistem dapat mengirimkan pesan singkat melalui SMS bahwa pintu air telah terbuka kepada nomor telepon genggam yang telah didaftarkan. Informasi ini juga dapat diterima melalui pemberitahuan di aplikasi *smartphone*⁸ berbasis *Android* maupun *iOS*—yang pada umumnya sebagian warga desa juga telah miliki, agar warga bisa bersiap menghadapi banjir ketika pintu bendungan terbuka.

Namun, sistem ini belum sepenuhnya berjalan, alat pun belum dapat dipasang, karena belum terjalin kesepahaman antara KAPABEL dan BPSDA.

BPSDA beralasan mereka hanya menjalankan tugas saat membuka dan menutup pintu air, mereka juga beralasan seharusnya warga sudah tahu jika banjir akan terjadi karena warga Pinrang sering datang ke bendungan untuk memancing ikan kala

⁸ Aplikasi ini bernama *Komunitas Cerdas Iklim* yang dapat diunduh di *smartphone* berbasis *Android* maupun *iOS* (Apple).

volume air sudah penuh di bendungan. BPSDA berkesimpulan warga sebenarnya sudah tahu kalau banjir akan tiba.

Jika warga mengetahui informasi lebih cepat, kemungkinan mereka untuk mengungsi dan menyelamatkan harta benda menjadi lebih besar sebelum banjir tiba.

Tanpa upaya normalisasi yang masif dan sistem peringatan dini yang cepat, warga Bababinanga dan Paria hanya bisa menunggu sampai tambak dan permukiman mereka tenggelam.

Tapi apakah kita akan membiarkan itu terjadi?

EPILOG

Refleksi Program Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Saddang

M. Gusti Zainal

(Koordinator Program KAPABEL)

“Tanaman jenis apa yang dapat memberikan penghasilan?”

-Yohane Palin, Perempuan Lembang Paku

Suatu hari pada tahun 1960-an, seorang perempuan paruh baya namanya Yohane Palin melakukan perjalanan seorang diri menuju Mamasa. Yohane Palin tinggal di puncak perbukitan salah satu pegunungan di Tana Toraja.

Ia berasal dari suatu perkampungan bernama Lembang paku, yang berada di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja. Lembang Paku memiliki luas 1.543 hektare dan terdapat kawasan hutan konservasi seluas 367 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 540 hektar, serta 636 hektar areal penggunaan yang bisa warga manfaatkan sebagai wilayah permukiman, persawahan,

kebun, dan lainnya. Namun, dengan posisi di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan memiliki topografi berbukit-bukit yang terjal. Sehingga hanya sebagian kecil yang warga bisa gunakan sebagai areal permukiman dan persawahan.

Sebelum matahari terbit, Yohane Palin siap-siap melakukan perjalanan menuju pasar tradisional yang terletak di Kabupaten Mamasa, jaraknya sekitar 4 jam perjalanan kaki dari rumah Yohane. Saat itu, Mamasa masih berstatus kecamatan dalam Kabupaten Polewali-Mamasa. Mamasa dengan Tana Toraja lebih dekat dari aspek budaya dan bahasa ketimbang Polewali yang umumnya dari suku Bugis dan Mandar. Sejak 2002, Mamasa telah menjadi kabupaten tersendiri, dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, saat terjadi pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Saat Yohane melakukan perjalanan, kondisi hutan Tana Toraja dan Mamasa sebagai jalur yang dilewatinya masih sangat rimbun. Bukit-bukit pegunungan masih hijau ditutupi pohon-pohon besar, sungai-sungai yang dilewatinya masih mengeluarkan suara aliran sungai yang terdengar dari jauh. Kicauan burung-burung yang beragam menghibur Yohane selama perjalanan. Ia tidak pernah khawatir atau takut selama dalam perjalanan karena ia tahu jalanan itu aman dilalui.

Yohane memilih ke Pasar Mamasa hari itu meskipun jaraknya sangat jauh karena ia juga akan menyempatkan mampir di rumah kerabatnya di sepanjang perjalanan. Masa itu, di tahun 1960-an, pasar tradisional masih sangat kurang. Pasar-pasar tradisional hanya ada di pusat kabupaten. Sedangkan pasar di pusat kecamatan bergantung dengan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka peluang pasar terbuka ada. Itu pun tidak terbuka setiap hari, punya jadwal harian. Pasar di kecamatan memiliki jadwal pasar setiap minggu dengan bergiliran dengan pasar-pasar di kecamatan lain.

Warga desa yang berkunjung ke pasar tradisional, selain yang memiliki tujuan untuk belanja, ada juga yang membawa hasil bumi untuk dijual di pasar. Hasil jualannya itu digunakan untuk belanja kebutuhan lainnya yang tidak dihasilkan oleh anggota keluarganya. Jika ada uang sisa dari hasil jualannya setelah membelanjakan

kebutuhan lainnya, mereka menyimpan untuk keperluan lainnya yang terkadang tiba-tiba.

Yohane tiba di Pasar Mamasa itu sekitar pukul 9 pagi. Setelah menjual barang dagangannya, ia membeli beberapa barang untuk kebutuhan rumah tangganya. Setelah istirahat cukup dan berbincang-bincang dengan beberapa kenalannya, ia meninggalkan Pasar Mamasa sekitar pukul 2 siang. Dalam perjalanan pulang, ia sering mampir di rumah-rumah warga untuk istirahat sejenak, melepaskan lelahnya sambil berbincang ringan dengan pemilik rumah.

Sore itu Yohane bertanya ke pemilik rumah tempat ia singgahi sejenak. “Tanaman apa yang baik untuk ditanam agar dapat menghasilkan?”

Pertanyaan Yohane mungkin sederhana. Ia hanya menanyakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan. Namun jika ditelusuk lebih dalam dapat mengandung banyak penafsiran. Misalnya, Yohane yang tinggal di wilayah yang penuh tanaman pohon berarti tanaman itu belum dapat menghasilkan atau diperjualbelikan. Ia membutuhkan tanaman yang berbuah sehingga hasilnya dapat diperjualbelikan.

Saat itu juga, Yohane mendapat jawaban dari seorang pria, yang memberikan usul untuk menanam kopi. Yohane tanpa malu-malu meminta bibit tanaman kopi ke pria itu untuk diperbanyak di kampungnya. Pria itu memberikan bibit kopi sebanyak 3 pohon. Dengan senang hati, Yohane kembali ke kampungnya dengan membawa bibit tanaman kopi.

Bibit itu lalu ia tanam di kampung Uru Lima.¹ Warga menamakan wilayah itu dengan menjadikan pohon *uru* yang bercabang lima sebagai penanda. Warga memilih wilayah Uru Lima untuk ditanami kopi karena masih banyak tegakan pohon yang dapat dijadikan pelindung tanaman kopi. Di areal itu banyak pohon suren yang dapat dijadikan pelindung kopi. Bibit kopi hasil perbanyakkan yang

¹ Uru adalah sebutan lokal untuk jenis tanaman pohon *Elmerrillia ovalis* (Miq) dandy (Magnolaceae) dan *lima* adalah karena pohon itu bercabang lima.

dilakukan Yohane bersama petani lain di kampung itu ditanam di areal itu.

Mereka menjadikan areal itu sebagai perkebunan kopi dan tidak mengetahui bahwa areal itu adalah kawasan hutan produksi terbatas. Pihak instansi kehutanan pun sebenarnya mengetahui bahwa warga yang tinggal berbatasan dengan hutan produksi terbatas banyak yang mengolah kawasan itu dan mereka sebatas menegur karena menyadari keterbatasan lahan olahan warga di wilayah itu. Seperti yang ungkapkan Ambe, salah seorang warga desa, bahwa selama ini mereka hanya diberi teguran dari penyuluh atau petugas dari Dinas Kehutanan ketika melakukan kunjungan sosialisasi. Namun warga tidak peduli dan tetap melakukan perkebunan kopi model *agroforestry*. Saat ini, perkebunan kopi di Desa Paku seluas 160-an hektare yang berawal hanya tiga bibit yang dibawa oleh seorang perempuan sepulang dari pasar.

Hingga program *Adaptation Fund* melalui KAPABEL sebagai *Executing Entity* dan KEMITRAAN (*The Partnership for Governance Reform*) selaku *National Implementing Entity* memperkenalkan dan menjalankan konsep Perhutanan Sosial di desa itu menjadikan perkebunan kopi yang telah dikelola warga memperoleh persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama 35 tahun dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pertanyaan Yohane terkait jenis tanaman apa yang dapat mengasapi dapurnya akhirnya terbukti. Perasaan was-was warga yang selama ini telah mengelola kawasan hutan secara ilegal akhirnya lega dengan adanya persetujuan pengelolaan berkat dampingan KAPABEL selama kurang lebih dua tahun dengan proses yang panjang.

Para perempuan di desa itu terlibat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan mengupayakan kopi sebagai usaha utama mulai dari *green bean*, *roasted been* dan *ground coffee* (bubuk kopi), hingga pengemasan dan pemasarannya.

Mengakses Kawasan karena Kebutuhan Hidup

“Meskipun kami tidak mengurus izin, kami tetap dapat mengolah kawasan hutan itu sebagai kebun kopi”

-Ambe, Warga Petani Desa Paku

Andarias seorang petani kopi di Desa Paku sejak masih muda. Selama satu dekade terakhir, ia juga meluangkan waktu mengajar di Sekolah Dasar 169 sebagai tenaga honorer, non-PNS. Sekolah itu satu-satunya sekolah yang ada. Jika ingin melanjutkan pendidikan tingkat atas, warga harus merelakan anak-anaknya meninggalkan desa itu.

Dalam pertemuan pemilihan ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) di kampung itu, para anggota KTH mempercayakan Andarias sebagai ketua. Begitu juga ketika terjadi pemilihan Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) sebagai wadah yang menghimpun kelompok tani-kelompok tani hutan lainnya, Andarias juga dipilih dengan suara bulat.

KTH menjadi syarat wajib melakukan pengusulan pengelolaan kawasan hutan. Para petani yang telah mengakses kawasan hutan lindung dan hutan produksi wajib membentuk KTH yang didaftarkan di Dinas Kehutanan untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebelum mengajukan pengusulan perhutanan sosial, syarat administrasi harus lengkap. Data anggota KTH dan berita acara pembentukannya yang seluruh anggota menandatangani dokumen itu dilampirkan dalam Surat Permohonan Surat Keputusan (SK) KTH kepada Kepala Lembang sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. SK KTH itulah yang dimasukkan di Dinas Kehutanan Provinsi dalam meregistrasi KTH sebagai bukti administrasi keberadaan kelompok tani.

Saat itu, Kepala Lembang Paku sangat mendukung program *Adaptation Fund* yang dilaksanakan KAPABEL. Markus Litting Paretta, yang telah menjabat dua periode sebagai Kepala Lembang, antusias menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok. Bahkan

saat pembuatan rumah pembibitan, ia turun tangan mengerahkan tenaga dan sumber daya lainnya seperti mobil bak terbuka untuk digunakan mengangkut bahan-bahan bangunan. Ia sangat berharap program ini sukses apalagi akan dilakukan pembibitan porang di desa itu.

Saat pembangunan rumah bibit, para perempuan lebih banyak terlibat aktif ketimbang laki-laki. Meratakan tanah dengan menggunakan alat cangkul dan sabit. Ada yang merapikan bambu untuk bedeng-bedeng, dan sebagian menyiapkan menu makanan dan minuman. Laki-lakinya mengambil bahan bangunan seperti bambu dan balok lalu mendirikan bangunan rumah bibit. Namun jumlah bambu yang tersedia di desa itu tidak cukup. Saat itu, tanaman bambu tidak ada di desa itu. Kepala Lembang menawarkan bambu bekas pondok kegiatan *rambu solo*² di Kecamatan Bittuang. Bahkan ia menggunakan mobil truk untuk mengambil dan mengantar langsung bambu itu ke lokasi tanpa imbalan.

Berselang beberapa hari setelah bangunan itu rampung, semangat dan antusias Kepala Lembang memudar. Ini berawal setelah pertemuan pembahasan pengadaan bibit porang di tingkat kelompok. Pengadaan bibit porang dengan jumlah ratusan bibit di desa itu dianggap sedikit. Ia merasa ada yang berbeda dengan penyampaian awal dari program ini. Cerita yang ia terima dari pendamping lapangan sebelumnya bahwa program ini akan melakukan penanaman porang besar-besaran. Bahkan Kepala Lembang juga sudah mempersiapkan lahan yang luas untuk tanaman porang.

Memang waktu itu, Porang menjadi komoditas primadona bagi petani. Hampir semua petani mengharapkan keberuntungan nilai jual dari umbi porang. Banyak petani di berbagai desa melakukan penanaman porang secara besar-besaran. Banyak petani mengganti komoditas pertaniannya. Seperti sebelum-sebelumnya, jika ada satu komoditas yang *booming* tiba-tiba, maka semua petani beralih ke komoditas itu dengan mengganti komoditas lama.

² *Rambu solo* merupakan upacara adat kematian masyarakat Toraja.

Rasa penasaran warga Desa Paku terhadap bibit porang sangat tinggi. Mereka mengusulkan pengadaan bibit kepada KAPABEL saat program *kick off meeting* dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Kantor Bappelitbangda Sulawesi Selatan. Usulan warga itu kemudian dimasukkan dalam revisi perencanaan kegiatan. Tanaman porang saat penyusunan proposal program *Adaptation Fund* tahun 2016 belum semarak saat ini. Sehingga jenis tanaman umbi-umbian yang diusulkan waktu itu adalah *sikapa* atau gadung, jenis tanaman lokal yang tumbuh liar di dalam hutan.

Kekecewaan Kepala Lembang berujung pada permintaan agar pendamping lapangan baru ini diganti, karena dianggap tidak pandai dalam melakukan pendampingan. Ia juga sempat menyatakan bahwa program ini tidak akan berhasil di desanya jika apa yang disampaikan sebelumnya bukan itu yang dilaksanakan. Ia menganggap jumlah bibit yang diadakan sangat sedikit karena ia sudah terlanjur menghubungi salah seorang pedagang pengadaan bibit porang jauh hari sebelumnya. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa proses pengadaan bibit harus melewati proses *bidding*, yaitu perusahaan memasukkan harga penawaran pengadaan bibit lalu dilakukan penilaian.

Rasa kecewa seorang Kepala Lembang tentu menghambat proses kerja lapangan. Eka, pendamping lapangan yang menggantikan pendamping sebelumnya, tidak tahu menahu informasi apa yang diterima Kepala Lembang. Ia merasa informasi yang disampaikan kepada anggota kelompok sesuai dengan informasi dalam perencanaan program. Tidak ada informasi yang disembunyikan. Situasi serba salah yang dirasakan Eka disampaikan kepada Andarias selaku ketua Gapoktanhut di desa itu.

“Bagaimana ini pak, Pak Lembang sudah tidak mendukung program kita. Saya khawatir program ini terhenti di tengah jalan,” jelas Eka kepada Andarias.

Andarias terdiam sejenak mendengarkan penjelasan Eka terkait dengan kekecewaan Kepala Lembang. Apalagi Kepala Lembang selalu mengatasnamakan petani yang berada dalam keanggotaan KTH yang merasa kecewa dengan program. Bahkan menyebutkan beberapa ketua KTH juga kecewa.

“Kalau menurut saya tetap jalan saja. Saya yang menjamin program ini akan sukses meskipun Kepala Lembang saat ini kecewa dan tidak mendukung,” tegas Andarias kepada Eka.

Jaminan seorang petani terhadap kesuksesan suatu program di saat Kepala Lembang kecewa sedikit memberikan angin segar bagi Eka. Meskipun masih menyimpan tanda tanya besar di benaknya. Bagaimana mungkin seorang petani mampu menghadapi seorang Kepala Lembang yang sudah dua periode mendapat kepercayaan dari warga.

Andarias menganggap program ini sangat penting. Baru kali ini ada program pendampingan di desanya terkait dengan kehutanan. Penyuluh ataupun polisi kehutanan pun jarang melakukan sosialisasi. Mereka hanya datang saat terjadi kebakaran hutan di desa itu pada tahun 2002. Kebakaran itu nyaris menghabiskan tanaman kopi warga, termasuk milik Andarias. Sejak kejadian itu, semangat petani desa mulai lesu dalam memelihara tanaman kopi. Selain itu, produktivitas tanaman kopi menurun seiring dengan munculnya penyakit pada tanaman. Harga biji kopi di tingkat petani juga rendah, tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan petani.

Keinginan kuat Andarias selaku ketua para petani di desa itu dalam melanjutkan dan menyukseskan program ini belum terjawab. Kalau kebutuhan legalitas pengelolaan kawasan hutan sebagai motifnya, tentu jawabannya bukan. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan legalitas izin pengelolaan karena selama ini mereka telah mengakses kawasan hutan produksi terbatas dengan menanam tanaman kopi di bawah naungan pohon-pohon suren yang ada dalam hutan itu. Mereka mengolah areal hutan dengan model *agroforestry*.

Desa Paku hanyalah salah satu desa dari sekian banyak desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Warga desa yang tinggal di desa-desa itu menyimpan banyak cerita terkait dengan pengelolaan hutan berserta konflik warga dengan pemerintah. Sumber konfliknya, tentunya, berawal dari pengakuan para pihak. Pengakuan warga berasal dari jejak-jejak tangan secara turun temurun yang disampaikan secara lisan.

Posisi warga memang lemah secara administrasi hukum

sebagai legalitas formal. Namun di sisi lain, warga sangat kuat karena keberadaannya di wilayah itu turun temurun dan bertambah seiring waktu dari generasi ke generasi. Sementara pihak pemerintah yang melakukan pengawasan hanya beberapa orang untuk kawasan hutan yang sangat luas. Jumlah penyuluh perhutanan hanya tiga orang di KPH Saddang I.

Suatu hari, KAPABEL melakukan pertemuan dengan warga desa untuk menyosialisasikan program Perhutanan Sosial di Desa Paku. Salah seorang warga desa menyampaikan bahwa untuk apa lagi warga mengurus izin pengelolaan kalau tanpa izin pun warga tetap dapat mengolah. Pak Ambe, warga desa yang pekerjaannya sebagai petani, menceritakan bahwa petugas kehutanan mengetahui kalau kami mengolah kawasan hutan produksi. Petugas penyuluh dan polisi kehutanan sangat jarang ke tempat kami. Kalau pun datang, itu hanya menegur secara lisan. Setelah itu tidak pernah lagi datang.

“Sebenarnya, biar saya tidak usulkan ini izin saya bisa tetap berkebun di kawasan itu,” ungkap Pak Ambe di pertemuan itu.

Pernyataan Pak Ambe mewakili suara-suara petani lainnya. Suara yang ingin menyampaikan penegasan bahwa apa pun yang terjadi mereka akan tetap mengelola kawasan hutan itu untuk kelanjutan hidup mereka. Mereka mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka dari hasil perkebunan kopi yang mereka usahakan sejak lama.

Mereka sangat menyadari kalau itu adalah larangan kecuali ada izin. Bukan hanya itu, mereka pun menantang maut dengan tinggal di lereng-lereng bukit yang senantiasa dapat terjadi longsor dan menimpa rumah-rumah mereka di musim hujan yang ekstrem. Suatu waktu di hari lain, saat fasilitator lapangan berbincang ringan dengan Pak Andarias, seorang petani kopi yang juga mengajar di Sekolah Dasar, mengungkapkan ketiadaan pilihan lain tinggal di kampung itu. “Lebih baik mati tertimpa longsor daripada tinggalkan ini kampung karena kami tidak punya lahan lain,” tegas Pak Andarias kepada Eka, fasilitator lapangan yang ditugaskan mendampingi warga desa itu.

Rumah Pak Andarias berada di depan punggung bukit yang

dibatasi dengan jalanan yang lebarnya hanya untuk satu mobil. Bukit-bukit di depan rumahnya adalah lahan yang dijadikan kebun kopi. Sebenarnya ia dapat saja memindahkan bangunan rumahnya jika pemerintah memberikan lahan untuk rumah yang aman. Meskipun begitu ia tetap tidak dapat meninggalkan kebunnya agar dapurnya tetap berasap.

Bagi Andarias, Yohane, dan Ambe lahir di kampung itu di mana kedua orang tua mereka juga lahir di tempat itu termasuk kakek dan nenek mereka. Kampung itu adalah tanah tempat kelahiran dan juga kematian mereka. Memang beberapa warga meninggalkan desa itu mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih layak. Khususnya para pemuda desa itu pergi ke berbagai kota. Ada yang ke Tana Toraja, Makassar, Kalimantan, dan Papua. Mereka menjadi buruh pabrik, buruh tani, dan berjualan di pasar-pasar.

Andarias memilih tinggal di kampung. Meskipun hasil kebun kopi tidak mencukupi namun itu dapat menopang hidup keluarganya. Ia menilai jika tanaman kopi dirawat dengan baik lalu diolah untuk menghasilkan *green bean* atau bubuk kopi sesuai dengan kebutuhan pasar maka bertani kopi, tentu saja, dapat meningkatkan kesejahteraan. Sama seperti yang diharapkan Yohanes Palin ketika pertama kali membawa bibit tanaman kopi ke desa itu.

Sejak awal program *Adaptation Fund* dengan kegiatan pengusulan pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial berbasis pangan hutan, Andarias selalu melakukan koordinasi dengan PMU KAPABEL, meluangkan waktu menyosialisasikan kegiatan ke anggota KTH lain, menginisiasi pertemuan di luar agenda formal, dan menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan.

Andarias meneruskan program terpacu dari semangat kelompok perempuan di desa itu yang sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan program.

Pengajuan pengusulan pengelolaan kawasan hutan terus berlanjut. Para ketua kelompok bersama pendamping desa terus berkoordinasi dengan KPH dan BPSKL sembari tetap melakukan pendekatan persuasif kepada kepala lembang. Di akhir tahun 2021, KLHK mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan

Verifikasi Teknis terhadap semua usulan Perhutanan Sosial di desa dampingan KAPABEL.

Hingga akhir masa program KAPABEL pada Juli 2022, KLHK akhirnya mengeluarkan 10 surat persetujuan PS termasuk di Desa Paku. Total luasan PS yang mendapat persetujuan yaitu 2.670 hektare di 10 desa di tiga kabupaten. Toraja Utara di empat desa seluas 1.115 hektare, Toraja Utara di dua desa seluas 283 hektare, dan Enrekang di empat desa seluas 1.372 hektare.

Desa Paku yang diusulkan oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Mesa Penawa mengusulkan seluas 292, 92 hektar dan disetujui seluas 293 setelah dilakukan verifikasi teknis. Persetujuan izin PS skema Hutan Kemasyarakatan ini selama 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan itu memang telah lama dijadikan sebagai kebun kopi oleh warga desa Paku.

Meskipun Ambe menganggap tidak ada perbedaan apakah mereka mendapatkan persetujuan atau tidak dari pemerintah namun dengan adanya izin kelola ini, warga merasa lebih senang dan tidak was-was lagi. Selain itu, warga juga lebih matang melakukan perencanaan pasca izin.

KAPABEL melakukan pendampingan pasca izin dengan membuat Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Proses pengerjaan RKPS dan RKT didiskusikan semua anggota KTH sebagai pemegang izin HKm kemudian disepakati bersama di tingkat KTH lalu dimasukkan dalam RKPS dan RKT Gapoktanhut.

RKPS terdiri dari kegiatan konservasi perlindungan dan pengaman hutan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan penguatan kelembagaan, kegiatan pengembangan usaha, dan kegiatan kearifan lokal.

Kegiatan konservasi, kelompok ini telah melakukan penanaman pohon suren, jati, dan *uru*. Untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan dimulai dengan melakukan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan, pemanenan, dan pengolahan hingga pemasaran.

Sedangkan untuk pohon yang akan dimanfaatkan hasilnya

yaitu dengan melakukan penanaman kayu manis sebanyak 15.800, tanaman kopi sebanyak 38.500, dan tanaman alpukat sebanyak 3.950. Semuanya dibibitkan di rumah bibit masing-masing kelompok tani.

Kepala Lembang akhirnya menyadari pentingnya program pendampingan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam menggerakkan perekonomian desa melalui komoditas kopi yang diusahakan kelompok perempuan. Beberapa pertemuan di tingkat kabupaten dan provinsi, Kepala Lembang hadir dan menyampaikan rasa terima kasihnya.
